

LKJIP KOTA PEKANBARU

TAHUN ANGGARAN 2025

Disusun Oleh :
Tim LKjIP Kota Pekanbaru Tahun 2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	2
1.2. GAMBARAN KOTA PEKANBARU.....	3
1.2.1. Letak Wilayah Geografis.....	3
1.2.2. Luas Wilayah.....	4
1.2.3. Topografi	6
1.2.4. Geologi	6
1.2.5. Hidrologi.....	7
1.2.6. Karakteristik Wilayah.....	7
1.3. KEDUDUKAN, KEWENANGAN, DAN TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI	9
1.3.1. Kedudukan.....	9
1.3.2. Kewenangan Dan Tugas Pokok.....	10
1.4. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....	20
1.4.1. Permasalahan Pembangunan.....	20
1.4.2. Isu Strategis	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
2.1. RENCANA STRATEGIS.....	31
2.1.1 Indikator Kinerja Utama	31
2.1.2. Perjanjian Kinerja	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
3.1. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU	43
3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun ini	43
3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya	46
3.1.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Awal RPD	51
3.1.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Nasional.....	51
3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta <i>alternative</i> solusi yang telah dilakukan	56
3.1.6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya	97
3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja 103	



3.2. REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU	105
BAB IV PENUTUP.....	158
1. Perjanjian Kinerja Walikota Pekanbaru 2025	159
2. Surat Pernyataan Telah Direviu Atas LKjIP Kota Pekanbaru TA 2025	170

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Pekanbaru.....

3

Gambar 1.2 Luas Wilayah Kota Pekanbaru.....

4

Gambar 1.3 Rata- rata Suhu Udara dan Kelembaban Udara di Kota Pekanbaru 2024

8

Gambar 3.1 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran.....

45

Gambar 3.2 Prosentase Perbandingan Capaian IKU 2024 dan 2025

49

Gambar 3.3 Prosentase Realisasi Indikator Kinerja Kota Pekanbaru Terhadap Target Indikator
Nasional Tahun 2024

54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2025	5
Tabel 1.2 Curah Hujan, Hari Hujan, Dan Durasi Matahari Di Kota Pekanbaru Tahun 2024	8
Tabel 1.3 Suhu Temperatur Rata-Rata Kota Pekanbaru Tahun 2024	9
Tabel 1.4 Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2025	15
Tabel 1.5 Jumlah PNS Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2025	16
Tabel 1.6 Jumlah PNS Menurut Tingkat Kepangkatan di Kota Pekanbaru Tahun 2025	17
Tabel 1.7 Jumlah PNS Menurut Dinas dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2025.....	18
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Kota Pekanbaru Tahun 2025.....	32
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Walikota Dalam Sasaran Strategis Sesuai Hasil Reviu Tahun 2025	35
Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2025	36
Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja.....	42
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2025.....	44
Tabel 3.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya.....	46
Tabel 3.4 Realisasi Indikator Kinerja Kota Pekanbaru Terhadap Target Indikator Nasional	52
Tabel 3.5 Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Pekanbaru.....	63
Tabel 3.6 Target Objek Pemajuan Yang mengalami Ketahanan Budaya Tahun 2025	63
Tabel 3.7 Hasil Evaluasi Persentase Cagar Budaya Yang terlindungi s/d Tahun 2025	64
Tabel 3.8 Program, kegiatan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025.....	67
Tabel 3.9 Hasil Survei Kepuasan Konsumen Kota Pekanbaru Tahun 2025	83
Tabel 3.10 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kota Pekanbaru 2025.....	86
Tabel 3.11 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	98
Tabel 3.12 Program Kegiatan Tahun 2025	103
Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Tahun 2025	106



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, kami persembahkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Pekanbaru Tahun 2025. Laporan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan amanah yang dipercayakan oleh masyarakat.

LKjIP ini disusun sebagai refleksi dari perjalanan pembangunan Kota Pekanbaru sepanjang tahun 2025. Dokumen ini tidak hanya memuat capaian kinerja, tetapi juga menjadi cerminan dari upaya kolektif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Dengan mengacu pada prinsip akuntabilitas dan transparansi, laporan ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi Kota Pekanbaru untuk terus melangkah maju. Berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan telah diimplementasikan dengan semangat kolaborasi dan inovasi. Kami percaya bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka-angka capaian, tetapi juga dari dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Laporan ini terdiri dari empat bab utama:

- **BAB I Pendahuluan**, yang memuat latar belakang, gambaran umum Kota Pekanbaru, serta kedudukan dan tugas pokok pemerintah daerah.
- **BAB II Perencanaan Kinerja**, yang menjelaskan tujuan pembangunan daerah, perjanjian kinerja, dan indikator kinerja utama.
- **BAB III Akuntabilitas Kinerja**, yang berisi pengukuran kinerja, analisis capaian, dan realisasi anggaran.
- **BAB IV Penutup**, yang menyajikan kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru, serta sinergi yang terjalin dengan berbagai pihak terkait. Untuk itu, kami sampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi.



Semoga laporan ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja, merumuskan kebijakan, dan merancang langkah-langkah strategis untuk masa depan yang lebih baik. Kami berharap, melalui upaya bersama, Kota Pekanbaru dapat terus tumbuh menjadi kota yang maju, berdaya saing, dan sejahtera. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Maret 2026

WALIKOTA PEKANBARU,

AGUNG NUGROHO

BAB I PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas tersebut dilaksanakan melalui sistem pelaporan kinerja yang disusun secara periodik, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaporan kinerja merupakan amanat berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Kepala Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu, penyusunan LKjIP Kota Pekanbaru Tahun 2025 merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan LKjIP Tahun 2025 mengacu pada dokumen perencanaan daerah, khususnya RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2025–2029 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan ini menyajikan capaian indikator kinerja sasaran strategis daerah yang dilengkapi dengan analisis atas tingkat pencapaian kinerja, perbandingan target dan realisasi, serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat.

Dengan demikian, LKjIP Kota Pekanbaru Tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

1.2. GAMBARAN KOTA PEKANBARU

1.2.1. Letak Wilayah Geografis

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101° 14' – 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' – 0° 45' Lintang Utara. Ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 – 50 meter. Sedangkan permukaan wilayah bagian utara merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5 – 11 meter, dan dibelah oleh aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur, serta memiliki beberapa anak sungai seperti sungai; Umban Sari, Sail, Air Hitam, Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan.

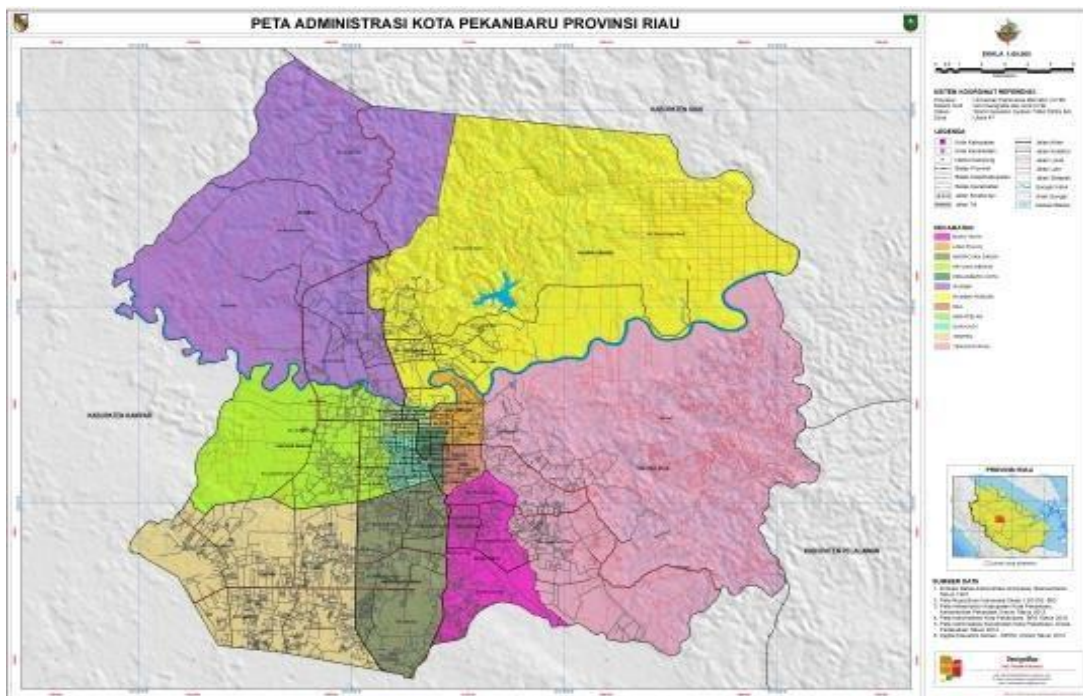
Secara administratif, Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, yaitu:

- 1) sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar;
- 2) sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar;
- 3) sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan; dan
- 4) sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.



Dengan posisi wilayah yang sangat strategis, Pekanbaru memiliki potensi yang unik, karena berada tepat di tengah propinsi Riau dan di jantung pulau Sumatera.

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Pekanbaru



Sumber: Data Pemerintah Kota Pekanbaru, 2025

1.2.2. Luas Wilayah

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau sekaligus pusat pemerintahan, ekonomi, dan perdagangan di wilayah tersebut. Hingga tahun 2025, luas wilayah administratif Kota Pekanbaru tercatat sekitar $\pm 638,33$ km² berdasarkan data Badan Pusat Statistik.

Secara historis, luas wilayah Pekanbaru mengalami beberapa kali perubahan. Pada awal perkembangannya sebelum tahun 1960, luas kota ini hanya sekitar 16 km², kemudian berkembang menjadi 62,96 km², dan terus mengalami perluasan wilayah hingga mencapai lebih dari 600 km² seperti saat ini.

Perluasan wilayah tersebut terjadi seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitas pembangunan di kota ini. Pekanbaru berkembang menjadi kota metropolitan di Provinsi Riau yang memiliki fungsi penting sebagai pusat perdagangan, jasa, pendidikan, serta transportasi di wilayah Sumatra bagian tengah.

Secara administratif, Kota Pekanbaru saat ini terdiri dari 15 kecamatan dan puluhan kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah kota. Wilayahnya didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian sekitar 5–11 meter di atas permukaan laut, sehingga sebagian wilayahnya memiliki karakter topografi yang relatif datar dan cocok untuk pengembangan kawasan perkotaan.

Gambar 1.2 Luas Wilayah Kota Pekanbaru



Sumber: Pekanbaru Dalam Angka, 2025

Dengan posisi geografis yang strategis sebagai ibu kota Provinsi Riau serta pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera bagian tengah, Kota Pekanbaru memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas wilayah, pengembangan investasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdaya saing.

Peningkatan kegiatan pembangunan menyebabkan peningkatan kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkat pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.2 Tahun 2020 menjadi 15 kecamatan dan kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan.

Wilayah Kota Pekanbaru tersebut dibagi menjadi beberapa wilayah administratif, yang terdiri atas:

- 1) 15 Kecamatan yang masing-masing dikepalai oleh seorang Camat,
- 2) 83 Kelurahan yang masing-masing dikepalai oleh seorang Lurah,
- 3) 3.844 Rukun Warga (RW) dan 9.890 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 1.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru, 2025

Kecamatan <i>District</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of District</i>	Luas Total Area (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Payung Sekaki	Labuh Baru Barat	35,55
Tuahmadani	Tuahmadani	29,84
Binawidya	Simpang Baru	36,59
Bukit Raya	Simpang Tiga	22,05
Marpoyan Damai	Sidomulyo Timur	29,74
Tenayan Raya	Sialang Sakti	114,40
Kulim	Mentangor	56,87
Limapuluh	Rintis	4,04
Sail	Cinta Raja	3,26
Pekanbaru Kota	Kota Tinggi	2,26
Sukajadi	Pulau Karam	3,76
Senapelan	Kampung Bandar	6,65
Rumbai	Meranti Pandak	61,86
Rumbai Barat	Maharani	86,01
Rumbai Timur	Limbungan	138,31
Pekanbaru		632,26

Sumber: Pekanbaru Dalam Angka, 2025

1.2.3. Topografi

Kota Pekanbaru terletak pada ketinggian 5 – 50 meter di atas permukaan laut. Kawasan pusat kota dan sekitarnya relatif datar dengan ketinggian rata-rata antara 10-20 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kawasan Tenayan Raya dan sekitarnya umumnya mempunyai ketinggian antara 25-50 meter di atas permukaan laut. Kawasan yang relatif tinggi dan berbukit terutama di bagian utara kota, khususnya di Kecamatan Rumbai, Rumbai Timur, dan Rumbai Barat dengan ketinggian rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Pekanbaru (44%) mempunyai tingkat kemiringan antara 0-2% atau relatif datar. Sedangkan wilayah kota yang agak landai hanya berjumlah sekitar 17%, landai 21%, dan sangat landai 13%. Sedangkan yang relatif curam hanya sekitar 4 – 5% yang terdapat di Rumbai Timur dan Rumbai Barat.

1.2.4. Geologi

Kota Pekanbaru mempunyai struktur geologi yang terdiri atas sesar mendatar dengan arah umum barat laut – tenggara, lipatan siklin dan antiklin dengan arah penunjaman ke timur – laut daya. Struktur geologi tersebut masuk dalam sistem patahan Sumatera. Sementara itu sesar- sesar mendatar ini termasuk dalam sistem patahan Semangko yang diduga terjadi pada masa Miosen Tengah.

Secara Morfologi atau bentang alam Kota Pekanbaru dapat dibedakan atas 3 bagian, yaitu:

- Morfologi dataran, terutama di Kecamatan Pekanbaru Kota, Senapelan, Lima Puluh, Sukajadi, Sail, dan sebagian wilayah Rumbai, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya, Tampan, Marpoyan Damai, dan Payung Sekaki. Luas morfologi ini diperkirakan sekitar 65% dari wilayah kota. Daerah ini merupakan endapan sungai dan rawa, dan sebagian besar merupakan daerah yang rawan genangan dan banjir. Kawasan ini relatif datar dengan kemiringan kurang dari 5%.
- Morfologi perbukitan rendah, terutama terdapat di kawasan utara, selatan, dan sebagian wilayah barat dan timur, memanjang dari barat laut – tenggara. Satuan morfologi ini tersusun oleh batu lumpur, batu pasir, sedikit batu lanau, batuan malihan, dan granit. Kawasan ini terletak pada ketinggian antara 20-35 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan kurang dari 20%.
- Morfologi perbukitan sedang, terutama di bagian utara wilayah kota yang merupakan kawasan perbukitan dengan arah memanjang dari barat laut – tenggara.

Wilayah ini ditumbuhi vegetasi tanaman keras sebagai hutan lindung.

1.2.5. Hidrologi

Aliran sungai di Kota Pekanbaru di antaranya sebagai berikut :

- Sungai Siak, dengan lebar rata-rata 96 meter dan kedalaman rata-rata 8 meter, dipengaruhi oleh pasang surut air laut, kecepatan aliran rata-rata 0,75 liter/detik.
- Sungai Senapelan merupakan penampung utama bagi wilayah sebelah Barat Jl. Jenderal Sudirman dan sebelah utara Jl. Tuanku Tambusai, dengan lebar rata-rata 3-4 meter
- Sungai Sail, merupakan penampung utama bagi wilayah sekitar Pasar Cik Puan yang dibatasi Jl. Pelajar di sebelah barat, Jl. Pepaya di sebelah timur, Jl. Mangga di sebelah utara dan Jl. Tuanku Tambusai di selatan
- Sungai Sago merupakan penampung bagi wilayah sebelah barat Jl. Sudirman, Sungai Lunau, Sungai Tanjung Datuk I dan II

Sistem drainase Kota Pekanbaru memanfaatkan saluran alami yang ada, seperti sungai, rawa. Sistem drainase Kota Pekanbaru mempunyai karakteristik sebagai berikut :

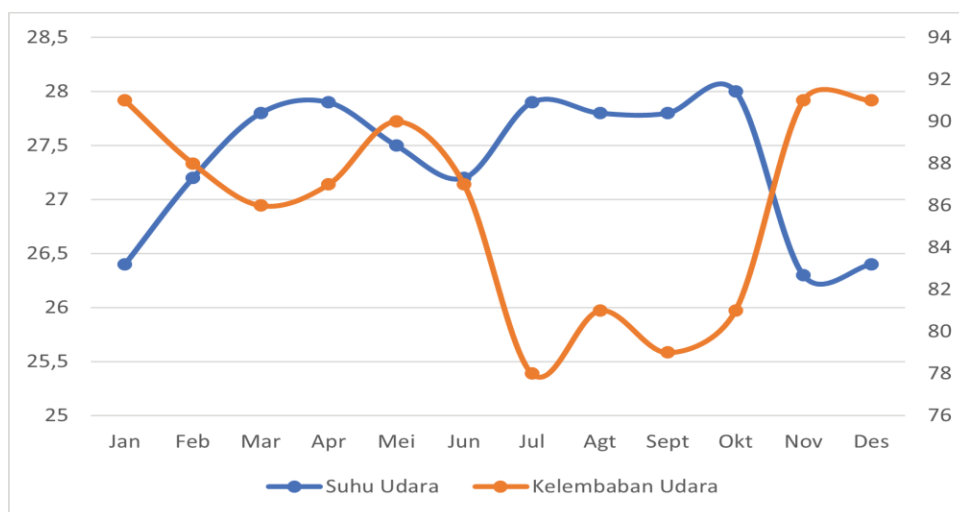
- Lokasi pembuangan utama drainase kota adalah Sungai Siak ;
- Saluran drainase primer adalah anak-anak Sungai Siak ;
- Saluran drainase sekunder dan tersier pada sub basin anak-anak Sungai Siak ;
- Sistem drainase Kota Pekanbaru umumnya menggunakan sistem gravitasi yang tergantung pada kondisi topografi. Kondisi topografi Pekanbaru yang relatif datar menyebabkan sistem pengaliran air hujan tidak dapat terjadi dengan baik.

1.2.6. Karakteristik Wilayah

❖ Iklim

Suhu udara maksimum di Kota Pekanbaru pada tahun 2024 mencapai 33,60C yang terjadi pada bulan Oktober, sedangkan suhu udara minimum mencapai 23,80C yang terjadi pada bulan Januari, Juni, Juli, September, November, dan Desember. Curah hujan maksimum di Kota Pekanbaru pada tahun 2024 mencapai 476,4 mm³ dengan jumlah hari hujan 24 hari yang terjadi pada bulan November, sedangkan curah hujan minimum terjadi pada bulan Juli sebesar 50,7 mm³ dengan jumlah hari hujan 12 hari.

Gambar.1.3 Rata-rata Suhu Kota Pekanbaru tahun 2024



Sumber/Source : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/The Agency for Meteorology, Climatology, and Geophysics

❖ Curah Hujan

Dalam rentang tahun 2021 – 2024, hari hujan Kota Pekanbaru terjadi di setiap bulan dengan frekuensi yang berfluktuatif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.4. Curah hujan tinggi secara rerata dalam 5 (lima) tahun terlihat banyak terjadi di bulan Oktober s/d Januari dan terendah berada pada kisaran bulan Juli. Selama 5 tahun terakhir rata-rata hari hujan dan curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2022.

Tabel 1.2 Curah Hujan dan Hari Hujan Di Kota Pekanbaru Tahun 2024

Bulan	2021		2022		2023		2024	
	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH
Jan	21	326,1	16	299	15	184	19	286
Feb	14	96,9	20	291	12	271	23	307
Mar	18	357,2	18	214	12	251	20	183
Apr	20	409,9	24	417	15	176	22	287
Mei	22	256,8	16	295	122	193	18	378
Jun	14	207	18	268	12	201	16	355
Jul	8	91,3	17	285	8	94	12	51
Agt	20	199,1	16	184	12	184	20	160
Sep	18	310,8	17	179	7	205	21	79
Okt	22	343,2	26	473	12	154	16	207
Nov	18	342,4	23	190	19	385	24	476
Des	22	206,3	24	343	24	508	19	268
Rerata Tahun	18	262	20	287	13	233	19	253

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Tahun 2024

❖ Suhu

Sementara itu keadaan suhu di Kota Pekanbaru selama periode 2020 - 2024 mencapai suhu tertinggi di bulan Agustus tahun 2023 yang mencapai 41,00C dan terendah pada bulan Juni dan Juli tahun 2021 dan Desember tahun 2022 dengan suhu mencapai 20,40C (Lihat Tabel). Bila mencermati rerata suhu maksimal di tahun 2024 maka telah terjadi penurunan rerata suhu maksimal ditahun sebelumnya yang sempat mencapai 35,03 0C pada tahun 2021. Namun demikian perlu diperhatikan juga meski rerata suhu maksimal mengalami penurunan akan tetapi rerata suhu minimal di tahun 2024 mengalami kenaikan mencapai 24,1 0C dari sebelumnya yang hanya mencapai 23,51 0C pada tahun 2023.

Tabel 1.3 Suhu Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2024 (0C)

Bulan	2021		2022		2023		2024	
	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min
Januari	33	22,2	34,2	21,6	30,7	22,9	30,9	23,8
Februari	35	21,5	35	21,8	31,7	22,9	32,2	24,2
Maret	35,5	21,4	35,5	22,4	31,3	23,2	33	24,4
April	34,8	22,2	35,9	21,9	33,2	23,5	33,5	24,5
Mei	34,8	22,9	35,3	21,8	33,6	23,8	32,7	24,5
Juni	35,1	21	34,2	22	33,1	23,7	32,6	23,9
Juli	35,1	21	34,2	21,2	33	23,7	33	23,9
Agustus	35	21,8	34,2	22	41	23,5	32,2	24
September	34,5	21,3	33,6	22	33	23,7	32,1	23,8
Oktober	35,6	22,4	34,5	22	32,7	23,7	33,6	24
November	34,8	22,6	33,8	22,2	32,3	23,6	30,8	23,8
Desember	34,5	21,4	33	21	26,5	23,9	30,9	23,8
Rerata	34,81	21,81	34,45	21,83	32,68	23,51	32,3	24,1

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Tahun 2025

1.3. KEDUDUKAN, KEWENANGAN, DAN TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1.3.1. Kedudukan

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, berkaitan dengan otonomi daerah, dalam pelaksanaannya di Kota Pekanbaru dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek yaitu:

➤ Aspek Politik

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Pekanbaru dari aspek politik ditandai dengan program legislatif dalam membahas perubahan atas peraturan tentang struktur organisasi dan tata kerja dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah.

➤ Aspek Administrasi/Manajemen Pemerintah

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah), dan manajemen pelayanan publik.

1.3.2. Kewenangan Dan Tugas Pokok

❖ Kewenangan

Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai penyelenggara daerah otonom, kewenangannya mencakup seluruh bidang pemerintahan daerah kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional.

Berdasarkan pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru menyelenggarakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya terdiri dari :

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.



B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi :

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olahraga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan;
18. Kearsipan.

C. Urusan Pilihan, meliputi :

1. Perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Perdagangan;
5. Perindustrian.

❖ Tugas Pokok

Pemerintah Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Walikota sebagai Kepala Daerah dan Penyelenggara Pemerintah Daerah mempunyai tugas :

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Bersama DPRD;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta Menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam menjalankan tugasnya Walikota berwenang :

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- b. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- c. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat, dan
- d. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, sebagaimana yang telah diubah melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, Organisasi Pemerintah Kota Pekanbaru terdiri dari Dinas/Badan dan Kecamatan. Perangkat Daerah yang membantu Walikota Pekanbaru

dalam penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah.
- b. Sekretariat DPRD.
- c. Inspektorat.
- d. Dinas, terdiri dari :
 1. Dinas Perhubungan;
 2. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 5. Dinas Pertanian;
 6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 8. Dinas Kesehatan;
 9. Dinas Sosial;
 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 11. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 12. Dinas Pendidikan;
 13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 16. Dinas Tenaga Kerja;
 17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 21. Dinas Pertanian dan Perikanan;
 22. Dinas Ketahanan Pangan.
- e. Badan, terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Pendapatan Daerah;
 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

4. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan, Kecamatan di Kota Pekanbaru terdiri atas:

1. Kecamatan Rumbai;
2. Kecamatan Rumbai Barat;
3. Kecamatan Rumbai Timur;
4. Kecamatan Tenayan Raya;
5. Kecamatan Bukit Raya;
6. Kecamatan Marpoyan Damai;
7. Kecamatan Payung Sekaki;
8. Kecamatan Sail;
9. Kecamatan Senapelan;
10. Kecamatan Sukajadi;
11. Kecamatan Pekanbaru Kota;
12. Kecamatan Bina Widya;
13. Kecamatan Limapuluh;
14. Kecamatan Tuah Madani;
15. Kecamatan Kulim.

❖ **Aparatur Pemerintah**

Keadaan Aparatur Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada Tahun 2025 sejumlah 7.583 orang, yang terdiri dari :

1. Fungsional Tertentu sebanyak 5.502 orang
2. Fungsional Umum / Pelaksana sebanyak 1.345 orang
3. Struktural :
 - Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama / Esselon II sebanyak 29 orang
 - Administrator / Esselon III sebanyak 177 orang



- Pengawas / Esselon IV sebanyak 530 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2025 sebanyak 7.583 orang yang tersebar di 49 institusi pada ruang lingkup kabupaten dan kecamatan.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, tercatat sebanyak 66.42 persen PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki tingkat pendidikan terakhir sarjana, 13,6 persen dengan tingkat pendidikan diploma, 8,83 persen dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat, dan masih ada sebanyak 0,42 persen yang memiliki tingkat pendidikan terakhir di bawah SMA/ sederajat.

Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Pekanbaru pada Bulan Februari Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4 Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru TA 2025

Tingkat Pendidikan <i>Educational Level</i>	2023		
	Laki-laki/ <i>Male</i>	Perempuan/ <i>Female</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Sekolah Dasar (SD) <i>Primary School</i>	3	1	4
Sekolah Menengah Pertama (SMP) <i>Junior High School</i>	15	2	17
Sekolah Menengah Atas (SMA) <i>Senior High School</i>	336	159	495
Diploma I/Akta I <i>Diploma I/Akta I</i>	1	4	5
Diploma II/Akta II <i>Diploma II/Akta II</i>	13	31	44
Diploma III/Akta III <i>Diploma III/Akta III</i>	110	485	595
Diploma IV/Akta IV <i>Diploma IV/Akta IV</i>	74	111	185
S1/Sarjana <i>Under Graduate/Bachelor</i>	1.309	3.977	5.286
S2/Pasca Sarjana <i>Graduate</i>	389	547	936
S3/Doktor/Ph.D <i>Post Graduate</i>	12	4	16
Jumlah/Total	2.262	5.321	7.583

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2025



Tabel 1.5 Jumlah PNS Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru
Tahun 2025

Jabatan <i>Occupation</i>	2023		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama <i>Senior Executives</i>	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya <i>Middle Executives</i>	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama <i>Junior Executives</i>	24	5	29
Administrator/Administrator	130	47	177
Pengawas/Supervisor	282	248	530
Eselon V/5 th Echelon	-	-	-
Jabatan Fungsional Dosen <i>Certain Functional Position for Lecturer</i>	-	-	-
Jabatan Fungsional Guru <i>Certain Functional Position for Teacher</i>	674	3.113	3.787
Jabatan Fungsional Medis <i>Certain Functional Position for Medical Field</i>	111	985	1.096
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana <i>General Functional Position</i>	1.041	923	1.964
Jumlah/Total	2.262	5.321	7.583

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2025



Tabel 1.6 Jumlah PNS Menurut Tingkat Kepangkatan di Kota Pekanbaru Tahun 2023

Pangkat/Golongan/Ruang <i>Hierarchy</i>		2023		
		Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)
	Golongan I/Range I			
1. I/A	(Juru Muda/Junior Clerk)	-	-	-
2. I/B	(Juru Muda Tingkat I/First Class Junior Clerk)	-	-	-
3. I/C	(Juru/Clerk)	5	-	5
4. I/D	(Juru Tingkat I/First Class Clerk)	1	1	2
	Golongan II/Range II			
5. II/A	(Pengatur Muda/Junior Supervisor)	59	14	73
6. II/B	(Pengatur Muda Tingkat I/First Class Junior Supervisor)	25	5	30
7. II/C	(Pengatur/Supervisor)	85	91	176
8. II/D	(Pengatur Tingkat I/First Class Supervisor)	100	123	223
	Golongan III/Range III			
9. III/A	(Penata Muda/Junior Superintendent)	631	1.476	2.107
10. III/B	(Penata Muda Tingkat I/First Class Junior Superintendent)	321	798	1.119
11. III/C	(Penata/Superintendent)	262	596	858
12. III/D	(Penata Tingkat I/First Class Superintendent)	445	1.139	1.584
	Golongan IV/Range IV			
13. IV/A	(Pembina/Administrator)	184	381	565
14. IV/B	(Pembina Tingkat I/First Class Administrator)	92	352	444
15. IV/C	(Pembina Utama Muda/Junior Administrator)	52	344	396
16. IV/D	(Pembina Utama Madya/Middle Administrator)	-	1	1
17. IV/E	(Pembina Utama/Senior Administrator)	-	-	-
	Jumlah/Total	2.262	5.321	7.583

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2025



Tabel 1.7 Jumlah PNS Menurut Dinas dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2025

Dinas/Instansi Pemerintah Daerah <i>Regional Government Institution</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru	94	64	158
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36	41	77
Badan Kesbangpol	29	7	36
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21	6	27
Badan Pendapatan Daerah	85	79	164
Badan Penelitian dan Pengembangan	15	12	27
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	43	24	67
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23	20	43
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	17	20	27
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	18	7	25
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19	43	62
Dinas Kesehatan	113	943	1056
Dinas Ketahanan Pangan	10	15	25
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	28	12	40
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15	14	29
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	36	29	65
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59	27	86
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	60	8	68
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	29	36
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42	33	75
Dinas Pendidikan	731	3169	3 900
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	15	23
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	34	15	49
Dinas Perhubungan	67	20	87



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	24	26	50
Dinas Pertanahan	20	13	33
Dinas Pertanian dan Perikanan	46	40	86
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	37	12	49
Dinas Sosial	17	21	38
Dinas Tenaga Kerja	16	16	32
Inspektorat Kota Pekanbaru	27	33	60
Kecamatan Binawidya	18	31	49
Kecamatan Bukit Raya	15	32	47
Kecamatan Kulim	25	16	41
Kecamatan Limapuluh	13	18	31
Kecamatan Marpoyan Damai	23	34	57
Kecamatan Payung Sekaki	20	25	45
Kecamatan Pekanbaru Kota	13	22	35
Kecamatan Rumbai	23	19	42
Kecamatan Rumbai Barat	26	9	35
Kecamatan Rumbai Timur	15	11	26
Kecamatan Sail	16	19	35
Kecamatan Senapelan	14	18	32
Kecamatan Sukajadi	18	26	44
Kecamatan Tenayan Raya	35	21	56
Kecamatan Tuahmadani	25	22	47
RSD. Madani	51	145	196
Satuan Polisi Pamong Praja	77	12	89
Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	38	28	66
Jumlah/Total	2.262	5.321	7.583

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2025

Dengan kewenangan yang dimiliki tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien, responsif, serta berorientasi pada hasil (outcome oriented) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1.4. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

1.4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah (PD). Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis dari data yang didapatkan sehingga menjadi agenda utama dalam perencanaan menengah, permasalahan Pembangunan yang ada adalah sebagai berikut, yaitu:

➤ Urusan Pendidikan

Permasalahan terkait Urusan Pendidikan di Kota Pekanbaru yaitu;

- Masih belum optimalnya daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan khususnya jenjang pendidikan SMP;
- Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
- Belum optimalnya tingkat kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- Belum meratanya mutu lembaga pendidikan yang dapat dilihat dari akreditasi lembaga pendidikan tersebut.

➤ Urusan Kesehatan

Permasalahan terkait Urusan Kesehatan di Kota Pekanbaru yaitu ;

- Masih ditemukannya balita dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk, dan stunting.
- Cakupan pelayanan untuk ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita dan anak masih perlu ditingkatkan.

- c) Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan baik di Rumah Sakit, Puskesmas dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan.
- d) Masih diperlukannya peningkatan pencegahan dan penanganan terhadap penderita penyakit menular antara lain Covid-19, HIV/AIDS, TB, dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, kanker, diabetes, dan lain-lain.

Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM tenaga kesehatan.

➤ **Urusan Kebudayaan**

Permasalahan terkait Urusan Kebudayaan di Kota Pekanbaru yaitu ;

- a) Masih kurangnya penyelenggaraan festival seni dan budaya;
- b) Belum optimalnya pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya.

➤ **Urusan Tenaga Kerja**

Beberapa Permasalahan terkait Urusan Tenaga Kerja antara lain:

- a) Tingginya jumlah penduduk usia kerja Kota Pekanbaru (Usia 15-64 Tahun) sebesar 486.834 jiwa pada tahun 2024;
- b) Angka pengangguran terbuka masih tinggi, dimana pada tahun 2025 tercatat mencapai angka 47.967 jiwa atau 4,63 persen;
- c) Adanya pemutusan hubungan kerja terutama sebagai dampak pandemi covid-19;
- d) Masih diperlukannya fasilitasi pembentukan wirausaha baru untuk peningkatan perekonomian masyarakat;
- e) Masih kurangnya sinergitas antara informasi kesempatan kerja dari pengusaha dan penyediaan tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan;
- f) Pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan serta hubungan industrial belum optimal dijalankan.

➤ **Urusan Sosial**

Beberapa Permasalahan terkait Urusan Sosial antara lain:

- a) Perlunya pemutakhiran pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara berkala;
- b) Masih ditemukannya PPKS yang bukan penduduk Kota Pekanbaru;
- c) Kurang optimalnya partisipasi PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial;
- d) Belum optimalnya program penanganan PPKS.

➤ **Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Pangan**

Beberapa Permasalahan terkait Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Pangan antara lain:

- a) Rendahnya kapasitas Wirausaha (*Entrepreneur*);
- b) Rendahnya persentase Koperasi Aktif, jumlah koperasi yang ada masih didominasi oleh koperasi yang tidak aktif mencapai 657 koperasi atau sebesar 59,03%.

➤ **Urusan Ketahanan pangan**

Permasalahan Ketahanan Pangan di kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan Jumlah penduduk yang tinggi;
- b) Ketergantungan Pasokan pangan dari luar Kota Pekanbaru;
- c) Perubahan Iklim (*Climate Change*);
- d) Fluktuasi Harga produk pangan utama;
- e) Laju pertumbuhan konsumsi pangan;
- f) Gangguan infrastruktur/transportasi dari daerah pemasok bahan pangan;
- g) Tekanan perkembangan industri Non Pertanian;
- h) Terbatasnya Lingkungan pendukung bagi produksi tanaman dan ternak;
- i) Produktivitas Tanaman pangan masih Rendah;
- j) Perkembangan Keberagaman Pola Konsumsi masyarakat yang rendah;
- k) Terbatasnya tenaga kerja bidang pertanian;
- l) Alih Fungsi Lahan.

➤ **Urusan Pariwisata**

Permasalahan terkait Urusan Pariwisata yaitu:

- a) Penurunan jumlah wisatawan asing dan wisatawan mancanegara;
- b) Belum optimalnya promosi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c) Belum optimalnya pengembangan infrastruktur pariwisata;
- d) Masih terbatasnya SDM pariwisata dan SDM ekonomi kreatif.

➤ **Urusan Komunikasi dan Informatika**

Beberapa Permasalahan terkait Urusan Komunikasi dan Informatika antara lain:

- a) Belum optimal Penerapan *e-government* dalam menunjang Reformasi Birokrasi;
- b) Masih rendahnya SPBE untuk pelayanan publik;
- c) Masih kurangnya fasilitas jaringan internet pada area publik.

➤ **Urusan Lingkungan Hidup**

Beberapa Permasalahan terkait Urusan Lingkungan Hidup antara lain:

- a) Volume sampah yang ditangani jauh di bawah dari volume sampah yang dihasilkan masyarakat;
- b) Masih Kurangnya Ruang Terbuka Hijau publik yang di kelola;
- c) Pencemaran Air Permukaan yang cukup masif;
- d) Belum terintegrasinya pengelolaan hutan kota.

➤ **Urusan Penanggulangan Bencana**

Permasalahan terkait Urusan Penanggulangan Bencana:

- a) Masih Rentannya Kota Pekanbaru terhadap bencana banjir di musim hujan;
- b) Masih Rentannya Kota Pekanbaru terhadap bencana kekeringan di musim kemarau.

➤ **Urusan Perhubungan**

Permasalahan terkait Urusan Perhubungan adalah:

- a) Pelayanan angkutan umum massal hanya dapat menjangkau jalan-jalan besar;
- b) Belum adanya angkutan *feeder* yang belum dapat dijangkau oleh trayek utama.

➤ **Urusan Perdagangan**

Adapun permasalahan utama urusan perdagangan, sebagai berikut:

- a) Belum tersedianya data base urusan perdagangan yang valid;
- b) Belum optimalnya kerja sama dengan berbagai pihak;
- c) Belum memadainya infrastruktur penunjang sektor perdagangan;
- d) Masih rendahnya daya saing produk;
- e) Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap tertib ukur;
- f) Belum tertatanya Pedagang Kaki Lima (PKL).

➤ **Urusan Perindustrian**

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pengelolaan Kawasan Industri Tenayan, meliputi:

- a) Belum optimalnya jaminan dan kepastian berusaha bagi investor;
- b) Masih kurangnya penyediaan infrastruktur penunjang kegiatan industri;
- c) Belum optimalnya iklim yang kondusif bagi investor.

➤ **Urusan Kesatuan Bangsa**

Permasalahan Urusan Kesatuan Bangsa terkait Pemilu 2025:

- a) Pemilu dan Pilkada 2025 akan memakan anggaran dana yang cukup besar;
- b) Kontestasi politik menyebabkan suhu Politik akan naik;
- c) Para kontestan partai Politik rentan membuat isu-isu politik yang tidak baik.

1.4.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Kota Pekanbaru merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu-isu strategis di level internasional, nasional, dan regional Provinsi Riau. Isu strategis merupakan jangkar (*anchor*) sebagai pengendali dan sekaligus sebagai petunjuk arah (*compass*) yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kota Pekanbaru ke depan. Ketepatan dalam perumusan isu strategis sangat penting dalam penentuan arah kebijakan pembangunan. Isu strategi Kota Pekanbaru sebagai berikut:

❖ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Konsep pembangunan yang berpusat pada manusia (*people center development*) mendasari isu ini. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu kemajuan suatu negara atau daerah. Investasi pada sumber daya manusia memiliki dampak positif yang besar dalam jangka panjang pada seluruh aspek secara berkelanjutan. Berbagai variabel yang bisa mengilustrasikan isu ini antara lain:

- a) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dan tenaga pendidik secara merata di seluruh wilayah Kota Pekanbaru;
- b) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata di seluruh wilayah Kota Pekanbaru;
- c) Mempromosikan budaya hidup sehat di tengah masyarakat;
- d) Pengarusutamaan gender;
- e) Kesetaraan akses terhadap disabilitas;
- f) Jaminan sosial bagi masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- g) Pemenuhan akses terhadap kesempatan berusaha dan meningkatkan kemampuan

❖ Menurunkan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Meningkatkan Ketahanan Budaya Melayu

Pembangunan fisik kalau tidak diiringi dengan pembangunan mental dan peningkatan penerapan nilai-nilai budaya dan agama tidak akan memberi hasil yang maksimal untuk kemajuan Kota

Pekanbaru. Perhatian terhadap pembangunan mental dan penerapan nilai-nilai budaya melayu dan pengamalan ajaran agama menjadi lebih penting bagi daerah untuk menangkis pengaruh negatif keterbukaan informasi melalui media sosial dan masuknya budaya-budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Berbagai variabel yang bisa mengilustrasikan isu ini antara lain:

- a. Pengelolaan pemerintahan yang transparan, bersih, efektif dan terpercaya;
- b. Menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik melalui inovasi berbasis *information and communication technology* (ICT);
- c. Pengembangan komitmen dan kualitas ASN berbasis sistem merit secara berkelanjutan;
- d. Pemantapan sistem informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

❖ Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi

Kajian teori ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Infrastruktur merupakan penunjang utama untuk terselenggaranya proses pembangunan suatu daerah. Dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi telah mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyediakan Kerangka kerja dalam rangka menarik investasi proyek-proyek infrastruktur yang dibutuhkan.

Pembangunan di bidang infrastruktur merupakan salah satu faktor penting yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan sebuah pembangunan. Pembangunan infrastruktur berpotensi memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih kuat serta sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim. Selain itu pembangunan infrastruktur yang baik dapat membentuk perekonomian daerah, lingkungan, dan sosial dalam beberapa dekade (sesuai dengan kerangka pembangunan berkelanjutan).

Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas daerah di Kota Pekanbaru. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar dan untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing daerah. Melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Business to Business (B to B)* Pemerintah Kota Pekanbaru telah memulai

peningkatan pembangunan infrastruktur terutama pada pemenuhan kebutuhan akses air bersih perpipaan masyarakat Kota Pekanbaru. Di samping peningkatan pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini menerima bantuan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik melalui program MSMIP (*Metropolitan Sanitation Management Investment Project*) yang hampir memasuki tahap penyelesaian pembangunan konstruksi. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPAL-DT) tersebut sudah dapat dirasakan aksesibilitasnya oleh masyarakat Kota Pekanbaru pada tahun 2023.

Melalui program peningkatan sistem jaringan transportasi diharapkan dapat menata infrastruktur transportasi yang ada di Kota Pekanbaru, terutama menyangkut aspek konektivitas sebagai berikut :

- a) Menghubungkan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten/ Kota lainnya;
- b) Menghubungkan antara pusat kegiatan satu dengan pusat kegiatan lainnya; dan
- c) Menghubungkan perumahan dengan pusat-pusat kegiatan.

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sistem jaringan transportasi diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah, peningkatan konektivitas regional dan nasional, serta untuk menguatkan posisi Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Riau. Di samping itu, pengembangan sarana transportasi publik menjadi perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengurangi beban arus distribusi orang dan barang serta memperkuat konektivitas antar wilayah.

Peningkatan pembangunan infrastuktur lainnya yang sampai saat ini terus berjalan adalah penanganan banjir dan genangan di Kota Pekanbaru berdasarkan Masterplan pengendalian banjir Kota Pekanbaru. Penanganan banjir dan genangan tersebut dalam rangka mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh beberapa hal berikut :

- a) Alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun;
- b) Alih fungsi lahan penampungan air sementara dan bantaran sungai menjadi tempat hunian penduduk;
- c) Curah hujan yang tinggi; dan
- d) Rendahnya kemampuan drainase Kota Pekanbaru dan kapasitas Sarana dan Prasarana pengendali banjir.

Melalui penerapan Masterplan Pengendalian Banjir tersebut diharapkan dapat ditangani 121 titik banjir/genangan serta 363 titik masalah yang ada di Kota Pekanbaru. Di samping peningkatan pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sampai saat ini, infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi yang telah tersedia di Kota Pekanbaru, terutama pada sektor energi di antaranya PLTU dan PLTG Tenayan serta Jaringan Gas.

Dengan memperkuat pembangunan di bidang infrastruktur, akan meningkatkan daya saing dan kekuatan ekonomi di masyarakat, sehingga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan sangat erat kaitannya dengan pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) yang merupakan isu pembangunan daerah dan nasional, karena bagian terbesar yang menggerakkan ekonomi kerakyatan Indonesia khususnya di Pekanbaru tidak lepas dari usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Sejarah telah mencatat bahwa ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh UMKM-K dapat bertahan di saat terjadi krisis moneter dan perlambatan ekonomi dunia. Isu pemberdayaan UMKM-K ini dapat dikaitkan dengan peningkatan daya saing dan produktivitas, pembenahan manajemen, dan kelembagaan, penguasaan teknologi, inovasi dan diversifikasi produk, peningkatan akses produk dan perluasan pasar, dukungan dan fasilitas dari pemerintah.

Sektor pariwisata juga perlu mendapat perhatian khusus karena dapat berdampak pada berkembangnya pariwisata seperti ekonomi kreatif, perhotelan, transportasi, dan lain-lain. Di samping itu diperlukan juga pengembangan ekonomi padat modal, terutama yang terkait sektor unggulan di Pekanbaru yaitu jasa, perdagangan, dan industri dengan meningkatkan iklim investasi. Pengembangan sektor perdagangan khususnya pasar diperlukan kerja sama dengan pihak swasta dalam mekanisme Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Kawasan Tenayan Raya (KIT) merupakan kawasan yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai kawasan industri yang kompetitif untuk investasi terutama di sektor industri padat modal.

❖ Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Kota Pekanbaru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau, telah memberikan efek terhadap pertumbuhan dan perkembangan kota beserta lingkungannya. Pertumbuhan kota yang tidak terkendali akan mempengaruhi terhadap lingkungan hidup. Peningkatan kualitas lingkungan hidup akan berdampak secara langsung pada peningkatan



daya saing daerah baik sebagai kota layak huni maupun untuk meningkatkan iklim investasi sehingga menambah minat berinvestasi di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengambil langkah-langkah konkrit dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan dengan pengelolaan persampahan, menjaga kelestarian lingkungan, seperti akibat aktivitas kehidupan masyarakat pada skala perumahan dan kawasan permukiman serta kebutuhan pergerakan masyarakat sehari-hari. Permasalahan yang ditimbulkan dari aktivitas masyarakat sehari-hari tersebut adalah resiko pencemaran lingkungan terutama pada air tanah yang disebabkan oleh penggunaan septic tank individual yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Penggunaan jangka panjang septic tank yang tidak SNI tersebut membentuk kebiasaan masyarakat tidak melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala (penyebab utama pencemaran air tanah).

Di samping hal tersebut di atas, pencemaran lingkungan lain yang berpotensi di Kota Pekanbaru adalah polusi udara, terutama yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor pribadi oleh sebagian besar masyarakat Kota Pekanbaru. Masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat disebabkan mudahnya masyarakat mengakses kepemilikan kendaraan bermotor dan tempat aktivitas yang dituju belum terjangkau oleh rute sarana transportasi publik.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru disusun dengan pendekatan berbasis kinerja (performance based planning), yang memastikan keterkaitan yang jelas antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap penggunaan sumber daya memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

2.1.1 Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai instrumen strategis untuk mengukur pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025. IKU disusun berdasarkan kerangka kebijakan, program, dan kegiatan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 serta memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Kerangka Konseptual IKU:

1. **Kebijakan:** Pedoman strategis yang ditetapkan oleh otoritas berwenang sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan.
2. **Program:** Rangkaian kegiatan terencana yang didanai APBD/APBN untuk mewujudkan tujuan spesifik sesuai mandat instansi.
3. **Kegiatan:** Implementasi operasional program melalui pengerahan sumber daya (SDM, anggaran, aset) dalam kurun waktu tertentu guna menghasilkan keluaran (*output*) yang terukur.

1. Latar Belakang

Dokumen SK IKU No. 879 Tahun 2025 menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Pekanbaru untuk periode 2025-2029 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dokumen ini berisi 30 indikator kinerja yang mencakup berbagai aspek pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.

2. Jumlah dan Jenis Indikator Kinerja

Berdasarkan SK IKU No 879 Tahun 2025, terdapat 16 indikator kinerja yang mencerminkan dimensi pembangunan daerah secara komprehensif. Secara substantif, indikator-indikator tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang sebagai berikut:

1. Bidang Perekonomian Daerah

Indikator pada bidang ini menggambarkan kondisi dan perkembangan perekonomian daerah serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Indikator yang termasuk dalam bidang ini yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Tingkat Inflasi
3. Indeks Daya Saing Daerah
4. Gini Rasio
5. Persentase Penduduk Miskin
6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator-indikator tersebut mencerminkan stabilitas ekonomi daerah, pemerataan pendapatan masyarakat, serta kemampuan daerah dalam menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Bidang Pembangunan Manusia

Bidang ini berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Indikator yang termasuk dalam bidang ini antara lain:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Prevalensi Stunting

Indikator tersebut menggambarkan kualitas hidup masyarakat yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, serta kondisi gizi masyarakat terutama pada anak.

3. Bidang Sosial dan Kebudayaan

Bidang ini berkaitan dengan penguatan nilai-nilai sosial, budaya, serta pembangunan karakter masyarakat. Indikator pada bidang ini yaitu: Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indikator ini mencerminkan upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan sebagai bagian penting dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.

4. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Bidang ini berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Indikator yang termasuk dalam bidang ini yaitu:

1. Indeks Layanan Infrastruktur
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator tersebut menunjukkan tingkat ketersediaan layanan infrastruktur dasar serta kualitas lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan pembangunan.

5. Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Bidang ini berkaitan dengan peningkatan kualitas birokrasi, akuntabilitas, serta pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Indikator pada bidang ini antara lain:

1. Nilai Reformasi Birokrasi
2. Nilai AKIP
3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator tersebut mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, indikator kinerja pembangunan Kota Pekanbaru dalam LKJIP dapat diklasifikasikan ke dalam lima bidang utama, yaitu:

1. Bidang Perekonomian Daerah
2. Bidang Pembangunan Manusia
3. Bidang Sosial dan Kebudayaan
4. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
5. Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan analisis kinerja pembangunan daerah secara lebih terstruktur serta menggambarkan kontribusi masing-masing bidang terhadap pencapaian tujuan pembangunan Kota Pekanbaru.:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Kota Pekanbaru Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Struktur Transformasi Pembangunan yang Berdaya Saing	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,80
2	Meningkatkan Kualitas SDM	IPM	Nilai	82,55



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
3	Mengarustamaan Budaya Melayu untuk Ketahanan sosial budaya masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	59,00
4	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	77,11
5	Meningkatnya Pemajuan Budaya Melayu	Persentase Pemajuan budaya melayu	Persen	6,40
6	Penyediaan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Peningkatan Konektivitas	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	73,90
7	Mewujudkan Perekonomian Inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,25
8	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,46
9	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	72,00
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,00
11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	Nilai	71,00
12	Pengentasan Kemiskinan	Penduduk Miskin	Persen	2,50
13	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,70
14	Penurunan Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	8,00
15	Tingkat Inflasi	Inflasi	Persen	2,30
16	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan	Gini Rasio	Nilai	0,36

2.1.2. Perjanjian Kinerja

Pemerintah Kota Pekanbaru menyelenggarakan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Mekanisme ini merupakan instrumen strategis dalam mengimplementasikan

prinsip *performance contract* antara Walikota selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan pimpinan Perangkat Daerah (PD).

Dimensi Legal-Operasional Perjanjian Kinerja 2025:**1. Basis Formulasi:**

- o Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) 2025-2029
- o Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025
- o Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025

2. Substansi Kesepakatan:

- o Penetapan target kinerja outcome yang mengakumulasi capaian multisektoral
- o Integrasi *output-outcome-impact linkage* dalam kerangka logis program
- o Penguatan sistem *performance-based budgeting*

Karakteristik Esensial Perjanjian Kinerja 2025:

1. Mengadopsi prinsip *rolling target* dengan mempertimbangkan *legacy outcome* tahun sebelumnya
2. Mengikat secara administratif dan manajerial melalui mekanisme:
 - o *Downward accountability* (pertanggungjawaban vertikal)
 - o *Horizontal coordination* (sinergi lintas PD)
3. Memuat klausul antisipatif terhadap dinamika makroekonomi regional

Inovasi Formulasi 2025:

1. Penerapan *cascading performance contract* hingga level unit kerja
2. Pengintegrasian indikator SDGs lokal dalam matriks kesepakatan
3. Penetapan *key performance driver* sebagai basis alokasi anggaran responsif

Implikasi Strategis:

1. Mengurangi *agency problem* melalui mekanisme *goal congruence*
2. Memperkuat *performance auditing* berbasis *result framework*
3. Mendorong transformasi birokrasi berbasis *data-driven governance*

Sebagai bentuk komitmen kinerja, berikut disajikan kerangka perjanjian kinerja Walikota Pekanbaru Tahun 2025 yang telah diselaraskan dengan:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Walikota Dalam Sasaran Strategis Sesuai Hasil Reviu 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Struktur Transformasi Pembangunan yang Berdaya Saing	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,81
2	Meningkatkan Kualitas SDM	IPM	Nilai	83,00
3	Mengarustamaan Budaya Melayu untuk Ketahanan sosial budaya masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	60,50
4	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	77,11
5	Meningkatnya Pemajuan Budaya Melayu	Persentase pemajuan budaya melayu	Persen	6,40
6	Penyediaan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Peningkatan Konektivitas	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	74,50
7	Mewujudkan Perekonomian Inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,65
8	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,81
9	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	72,65
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90,52
11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	Nilai	71,50
12	Pengentasan Kemiskinan	Penduduk Miskin	Persen	3,10
13	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,50
14	Penurunan Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	8,20
15	Tingkat Inflasi	Inflasi	Persen	2,2
16	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan	Gini Rasio	Nilai	0,385

Terdapat 16 Sasaran Strategis dengan 16 target indikator kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun 2025. Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja tersebut maka terdapat 91 Program beserta pagu anggaran yang dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2025

No	Program		(Rp.)
1.	Pengelolaan Pendidikan	Rp.	234.439.548.957
2.	Pendidikan dan Tenaga Pendidikan	Rp.	27.194.719.968
3.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Dinas Pendidikan)	Rp.	572.998.005.581
4.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	165.765.659.081
5.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	943.701.296
6.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp.	449.490.678
7.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.	340.794.146
8.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Dinas Kesehatan)	Rp.	254.683.963.136
9.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (DPRD)	Rp.	82.967.439.136
10.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BKPSDM)	Rp.	14.529.191.008
11.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (DP3APM)	Rp.	8.079.666.805
12.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BPP)	Rp.	8.193.539.528
13.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Damkar)	Rp.	13.408.252.303
14.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pertanahan)	Rp.	5.702.022.189
15.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Disdukcapil)	Rp.	21.471.670.345
16.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas PUPR)	Rp.	42.285.797.062
17.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp.	15.798.178.259
18.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp.	28.943.497.330
19.	Penataan Bangunan Gedung	Rp.	20.355.748.410
20.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Disperkim)	Rp.	11.068.342.748
21.	Kawasan Permukiman	Rp.	17.320.159.430



No	Program		(Rp.)
22.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp.	2.430.657.850
23.	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp.	175.100.287.600
24.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Satpol PP)	Rp.	26.613.580.107
25.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	1.590.966.000
26.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BPKAD)	Rp.	27.732.771.319
27.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Disdalduk KB)	Rp.	6.678.617.394
28.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinsos)	Rp.	9.079.860.713
29.	Pemberdayaan Sosial	Rp.	942.346.310
30.	Rehabilitasi Sosial	Rp.	960.412.795
31.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	5.857.768.773
32.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Disnaker)	Rp.	7.696.297.894
33.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	1.005.182.156
34.	Penempatan Tenaga Kerja	Rp.	1.733.429.061
35.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Disketapang)	Rp.	6.703.375.350
36.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp.	1.996.880.048
37.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (DLHK)	Rp.	55.345.544.390
38.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	4.646.735.500
39.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp.	1.755.774.950
40.	Pengelolaan Persampahan	Rp.	54.884.228.122
41.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotapen (Bapenda)	Rp.	75.943.680.350
42.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dishub)	Rp.	97.416.702.216
43.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.	18.411.756.077



No	Program		(Rp.)
44.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BPBD)	Rp.	8.655.187.706
45.	Aplikasi Informatika	Rp.	3.320.237.500
46.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Diskominfo)	Rp.	9.352.705.728
47.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Diskop)	Rp.	7.211.760.848
48.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.	2.120.410.476
49.	Pengembangan UMKM	Rp.	1.282.519.690
50.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (DPMPTSP)	Rp.	22.380.217.685
51.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp.	1.465.643.230
52.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp.	6.594.637.920
53.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dispora)	Rp.	10.020.774.138
54.	Pembinaan Perpustakaan	Rp.	844.566.392
55.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dispusip)	Rp.	12.260.718.556
56.	Pengembangan Kebudayaan	Rp.	1.880.955.110
57.	Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp.	279.709.701
58.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp.	455.992.430
59.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Disbudpar)	Rp.	7.885.105.239
60.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp.	841.767.194
61.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp.	252.878.614
62.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	2.050.023.680
63.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Distantan)	Rp.	14.682.988.153
64.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Disperindag)	Rp.	12.383.888.425
65.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	793.821.385



No	Program		(Rp.)
66.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.	19.177.493.671
67.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Sekretariat)	Rp.	103.417.196.206
68.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bappeda)	Rp.	12.876.025.346
69.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	5.117.210.568
70.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	2.218.961.000
71.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Inspektorat)	Rp.	18.643.943.500
72.	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.	1.797.750.000
73.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kesbangpol))	Rp.	7.821.934.591
74.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.	3.118.494.845
75.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Kulim)	Rp.	9.334.796.824
76.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Senapelan)	Rp.	10.275.037.725
77.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Payung Sekaki)	Rp.	11.373.349.411
78.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Binawidya)	Rp.	10.125.522.066
79.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Rumbai Timur)	Rp.	9.633.094.645
80.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Limapuluh)	Rp.	9.125.502.070
81.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Pekanbaru Kota)	Rp.	9.774.317.413
82.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec Sail)	Rp.	7.804.674.687
83.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Marpoyan Damai)	Rp.	12.144.958.083
84.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Sukajadi)	Rp.	11.664.964.036



No	Program		(Rp.)
85.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Rumbai Barat)	Rp.	9.981.305.063
86.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Bukit Raya)	Rp.	10.430.882.742
87.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Tenayan Raya)	Rp.	12.541.542.402
88.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Rumbai)	Rp.	10.360.634.273
89.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Tuah Madani)	Rp.	10.324.096.050
TOTAL		Rp	2.596.566.439.655,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk transparansi capaian keberhasilan kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru kepada masyarakat selama satu tahun. Akuntabilitas Kinerja juga merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun secara periodik.

Pemerintah Kota Pekanbaru selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026, dan PK Perubahan Tahun 2025.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan serta indikator makro yang diberlakukan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
2	> 80 – 90	Memuaskan
3	> 70 – 80	Sangat Baik
4	> 60 – 70	Baik
5	> 50 – 60	Cukup
6	> 30 – 50	Kurang
7	0 – 30	Sangat Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Perhitungan pencapaian indikator sasaran menggunakan asumsi

- a. Jika semakin tinggi realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin rendah / jelek adalah:

$$\text{Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100$$

- b. Sedangkan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian sasaran kinerja semakin rendah/jelek, atau sebaliknya realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin baik menggunakan perumusan:

$$\text{Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100$$

3.1. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun ini

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Pekanbaru. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekanbaru telah tercantum dalam Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 99 Tahun 2024 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023 – 2026. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu- isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Struktur Transformasi Pembangunan yang Berdaya Saing	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,81	4,24	100,00
2	Meningkatkan Kualitas SDM	IPM	Nilai	83,00	84,91	100,34
3	Mengarustamaan Budaya Melayu untuk Ketahanan sosial budaya masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	60,50	59,00	98,66
4	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	77,11	77,89	99,86
5	Meningkatnya Pemajuan Budaya Melayu	Persentase pemajuan budaya melayu	Persen	6,40	N/A	
6	Penyediaan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Peningkatan Konektivitas	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	74,50	73,90	113,66
7	Mewujudkan Perekonomian Inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,65	5,21	104,20
8	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,81	67,17	109,22
9	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	72,65	77,54	98,97
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90,52	91,12	100,69
11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	Nilai	71,50	68,24	100,65

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
12	Pengentasan Kemiskinan	Penduduk Miskin	Persentase	3,10	3,19	102,90
13	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	4,50	5,24	116,44
14	Penurunan Stunting	Prevalensi Stunting	Persentase	8,20	1,85	443,24
15	Tingkat Inflasi	Inflasi	Persentase	2,20	4,83	219,55
16	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan	Gini Rasio	Nilai	0,385	0,37	98,67

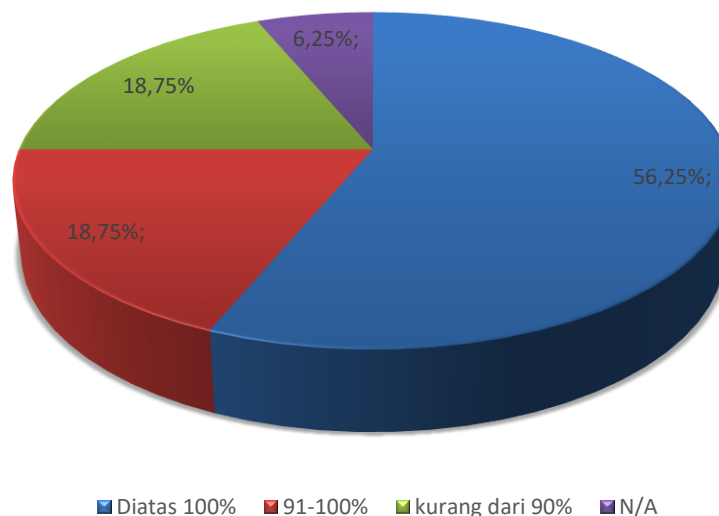
Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Pekanbaru, 2025

Dari tabel diatas terlihat gambaran bahwa dari 16 Indikator sasaran yang telah ditetapkan terdapat 9 sasaran (56,25%) yang mencapai diatas 100%, yang mencapai 91-100% sebanyak 4 sasaran (18,75%), capaian kurang dari 90% terdapat 3 sasaran (18,75%) dan 1 sasaran (6,25%) belum tersedia datanya (N/A).

Untuk lebih jelasnya persentase untuk tiap-tiap capaian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran



3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

Guna melihat perkembangan realisasi kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2025, perlu di bandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya, agar lebih mudah di baca akan disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 3.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Selisih % (+ / -)
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Struktur Transformasi Pembangunan yang Berdaya Saing	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4,2	4,2	0,00
2	Meningkatkan Kualitas SDM	IPM	Nilai	82,89	84,91	102,44
3	Mengarustamaan Budaya Melayu untuk Ketahanan sosial budaya masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	59,00	
4	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	84,23	84,23	100,00
5	Meningkatnya Pemajuan Budaya Melayu	Persentase pemajuan budaya melayu	Persen	6,78	N/A	
6	Penyediaan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Peningkatan Konektivitas	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	N/A	73.90	
7	Mewujudkan Perekonomian Inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,61	5,21	113,02
8	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	56,97	67,17	117,90
9	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	75,94	77,54	98,97
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90,14	91,12	101,09



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Selisih % (+ / -)
1	2	3	4	5	6	7
11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	Nilai	67,16	68,24	101,61
12	Pengentasan Kemiskinan	Penduduk Miskin	Persentase	3,15	3,19	101,27
13	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	4,63	5,24	113,17
14	Penurunan Stunting	Prevalensi Stunting	Persentase	8,7	8,20	94,25
15	Tingkat Inflasi	Inflasi	Persentase	1,24	4,83	25,67
16	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan	Gini Rasio	Nilai	N/A	0,37	

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Pekanbaru, 2025

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis, secara umum capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan kondisi yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, serta beberapa indikator yang mampu mempertahankan capaian pada level yang sama.

Beberapa indikator yang menunjukkan kinerja sangat baik antara lain Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian sebesar 113,02 persen dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian 117,90 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas lingkungan hidup berjalan secara optimal.

Selain itu, indikator lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Nilai AKIP juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan pada aspek pembangunan manusia, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Sementara itu, beberapa indikator menunjukkan capaian yang relatif stabil, seperti Indeks Daya Saing Daerah, Indeks Kerukunan Umat Beragama, dan Nilai Reformasi Birokrasi, yang nilainya sama dengan capaian pada tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas kinerja pada indikator tersebut masih dapat dipertahankan.

Di sisi lain, terdapat beberapa indikator yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut, seperti Tingkat Pengangguran Terbuka yang mengalami peningkatan dari 4,63 persen pada tahun 2024 menjadi 5,24 persen pada tahun 2025, serta Tingkat Inflasi yang meningkat dari 1,24 persen menjadi 4,83 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya penguatan kebijakan dalam penciptaan lapangan kerja dan pengendalian stabilitas harga.

Selain itu, terdapat beberapa indikator yang belum memiliki data pembandingan pada tahun sebelumnya, seperti Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Layanan Infrastruktur, dan Gini Rasio, sehingga analisis tren kinerja belum dapat dilakukan secara komprehensif.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan pada beberapa indikator untuk mencapai target pembangunan daerah secara optimal.

Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis antara lain:

1. Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
2. Sinergi dan koordinasi yang baik antara perangkat daerah dalam pelaksanaan program pembangunan.
3. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendorong peningkatan kualitas pembangunan di berbagai sektor.
4. Partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.
5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Faktor Penghambat

Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Dinamika kondisi perekonomian yang mempengaruhi stabilitas harga dan tingkat inflasi.
2. Terbatasnya ketersediaan lapangan kerja yang berdampak pada peningkatan tingkat pengangguran terbuka.
3. Keterbatasan data pada beberapa indikator kinerja sehingga belum dapat dilakukan analisis secara menyeluruh.
4. Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia pada beberapa sektor pembangunan.

5. Pengaruh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi nasional maupun global.

Upaya Perbaikan yang Akan Dilakukan

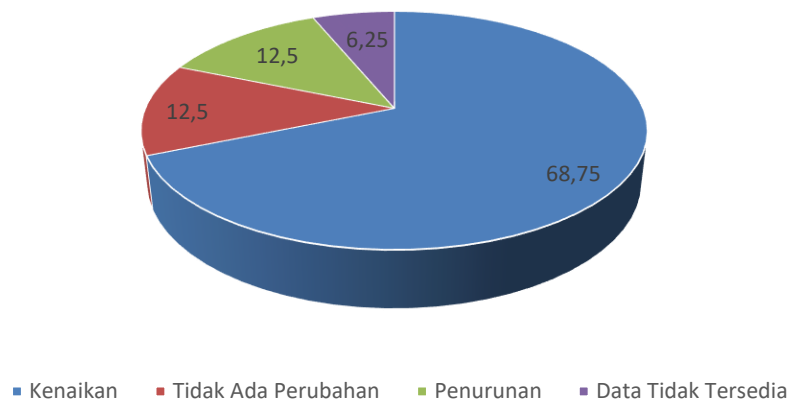
Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya, beberapa langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program pembangunan.
2. Mendorong pengembangan sektor ekonomi produktif guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.
3. Memperkuat program pengendalian inflasi daerah melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
5. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan data dan informasi guna mendukung proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah.

Untuk lebih jelasnya prosentase untuk tiap-tiap capaian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.2. Prosentase Perbandingan Capaian IKU 2024 dan 2025

Prosentase Perbandingan Capaian IKU 2024 dengan 2025



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis, secara umum terdapat peningkatan capaian pada beberapa indikator utama, meskipun masih terdapat indikator yang stagnan maupun belum optimal.

1. Dampak terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 82,89 menjadi 84,91 menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli.

Selain itu, kenaikan pertumbuhan ekonomi dari 4,61% menjadi 5,21% memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi daerah, termasuk peluang kerja dan investasi. Namun demikian, kenaikan angka pengangguran (4,63 menjadi 5,24) mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.

2. Dampak terhadap Stabilitas Sosial dan Budaya

Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama yang stabil pada angka 84,23 menunjukkan kondisi sosial masyarakat yang tetap harmonis. Hal ini menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas daerah.

Sementara itu, indikator terkait budaya seperti Indeks Pembangunan Kebudayaan dan pemajuan budaya Melayu belum sepenuhnya dapat dievaluasi karena keterbatasan data, sehingga dampaknya terhadap ketahanan sosial budaya belum dapat diukur secara komprehensif.

3. Dampak terhadap Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur

Peningkatan signifikan pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (56,97 menjadi 67,17) mencerminkan keberhasilan upaya pengelolaan lingkungan serta meningkatnya kesadaran terhadap isu keberlanjutan dan mitigasi bencana.

Namun, pada sektor infrastruktur, capaian belum dapat dianalisis secara optimal karena data indikator belum tersedia secara lengkap.

4. Dampak terhadap Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indeks daya saing daerah yang stagnan menunjukkan bahwa upaya peningkatan daya saing masih perlu diperkuat, khususnya dalam inovasi dan efisiensi pelayanan.

Di sisi lain, peningkatan pada indikator pelayanan publik dan akuntabilitas (berdasarkan data lain dalam tabel) menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

5. Dampak terhadap Stabilitas Ekonomi Daerah

Kenaikan inflasi dari 1,24% menjadi 4,83% memberikan dampak negatif terhadap daya beli masyarakat. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena dapat mengurangi manfaat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai.

Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 menunjukkan:

1. Dampak positif pada peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas lingkungan hidup.
2. Dampak netral pada stabilitas sosial dan daya saing daerah yang cenderung stagnan.
3. Dampak negatif/perlu perhatian pada inflasi dan pengangguran.
4. Keterbatasan evaluasi pada beberapa indikator akibat belum tersedianya data

3.1.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Awal RPD

Tahun 2025 merupakan tahun ketiga RPD periode 2023 – 2026, sehingga untuk perbandingan realisasi tahun ini dan tahun awal RPD mirip dengan perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

3.1.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Nasional

Realisasi kinerja Kota Pekanbaru telah menyesuaikan dengan beberapa target nasional karena capaian kinerja pemerintah daerah tidak terlepas dari target pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pada dasarnya sasaran dan indikator yang disusun oleh pemerintah daerah sama dengan sasaran dan indikator nasional, begitu juga dengan targetnya.

Adapun capaian kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2025 sesuai dengan sasaran dan indikator Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Indikator Kinerja Kota Pekanbaru Terhadap Target Indikator Nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Nasional	Realisasi Kota Pekanbaru	Realisasi Prov. Riau	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
1.	IPM	Nilai	N/A	84,91	76,31	75,9
2.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	78	84,23	84,23	77,89
3.	Penduduk Miskin	Persentase	4,5-5	3,19	6,3	23,85
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	4,5-5	5,24	4,16	4,85
5.	Prevalensi Stunting	Persentase	18,8	1,85	10	19,8
6.	Inflasi	Persentase	2,5	4,83	3,58	2,92

Untuk melihat posisi kinerja pembangunan daerah secara komparatif, dilakukan perbandingan capaian beberapa indikator strategis antara Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan tingkat nasional. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja pembangunan Kota Pekanbaru berada di atas atau di bawah capaian wilayah yang lebih luas.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru pada tahun pengukuran tercatat sebesar 84,91, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi Riau sebesar 76,31 dan nasional sebesar 75,9. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Pekanbaru berada pada tingkat yang lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. IPM Provinsi Riau sendiri tercatat mencapai 76,31 dan termasuk kategori tinggi, menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembangunan manusia di wilayah tersebut. Dengan capaian tersebut, Kota Pekanbaru dapat dikatakan memiliki kondisi yang relatif lebih maju dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.

2. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Pekanbaru mencapai 84,23, yang juga lebih tinggi dibandingkan dengan nilai nasional sebesar 77,89, serta setara dengan capaian Provinsi Riau yaitu 84,23. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Kota Pekanbaru berada pada kategori sangat baik dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Secara nasional, indeks kerukunan umat beragama mencapai 77,89 pada tahun 2025, yang merupakan capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

3. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin di Kota Pekanbaru tercatat sebesar 3,19 persen, jauh lebih rendah dibandingkan Provinsi Riau sebesar 6,3 persen dan nasional sebesar 23,85 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun nasional. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru telah menunjukkan hasil yang cukup baik.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekanbaru tercatat sebesar 5,24 persen, yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Riau sebesar 4,16 persen dan nasional sebesar 4,85 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kota Pekanbaru merupakan pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Riau, tingkat pengangguran masih relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh tingginya arus urbanisasi dan pertumbuhan angkatan kerja di wilayah perkotaan.

5. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting di Kota Pekanbaru tercatat sebesar 8,2 persen, lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau sebesar 10 persen dan nasional sebesar 19,8 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan dan status gizi anak di Kota Pekanbaru relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Hal tersebut mencerminkan keberhasilan berbagai program intervensi gizi dan kesehatan masyarakat.

6. Inflasi

Tingkat inflasi di Kota Pekanbaru tercatat sebesar 4,83 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Riau sebesar 3,58 persen dan nasional sebesar 2,92 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi di Kota Pekanbaru relatif lebih besar dibandingkan wilayah lainnya, yang dapat dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi perkotaan yang lebih tinggi.

Secara umum, kinerja pembangunan Kota Pekanbaru menunjukkan hasil yang cukup baik dibandingkan dengan Provinsi Riau dan nasional, terutama pada indikator:

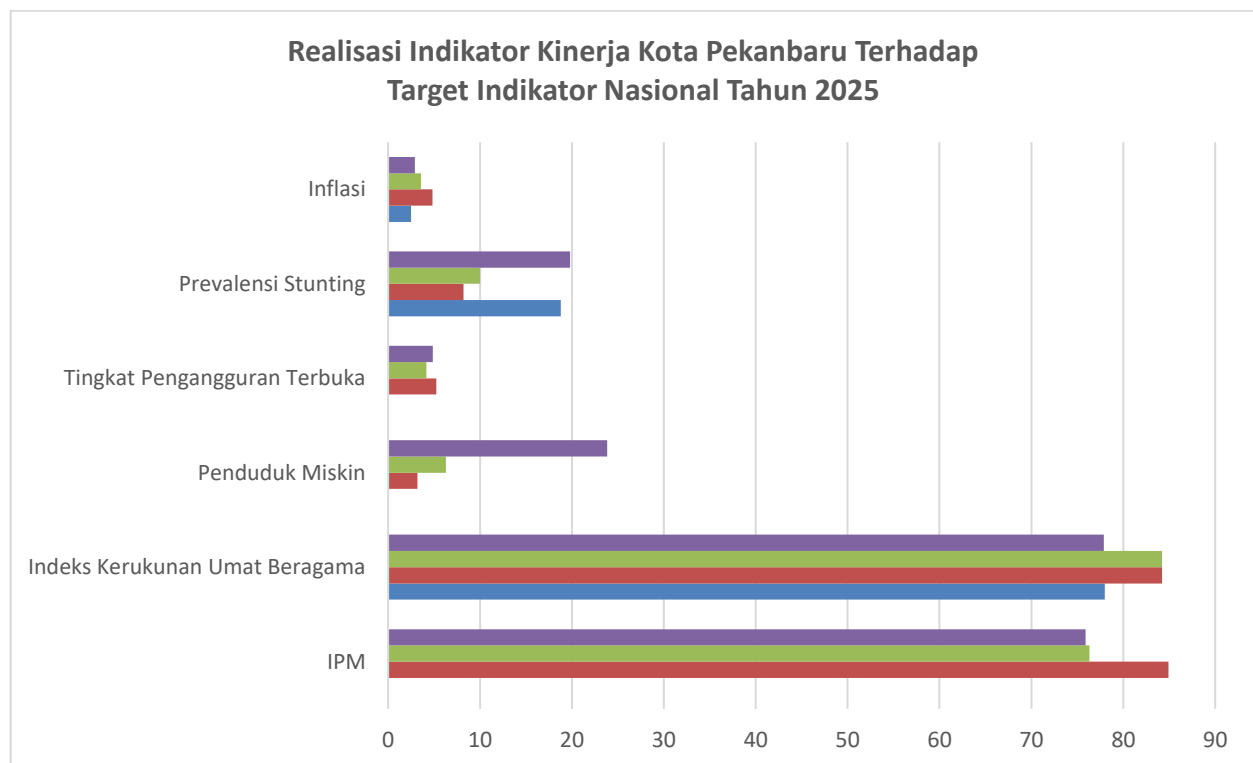
- Indeks Pembangunan Manusia
- Indeks Kerukunan Umat Beragama
- Persentase Penduduk Miskin
- Prevalensi Stunting

Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut, khususnya:

- Tingkat Pengangguran Terbuka
- Tingkat Inflasi

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan sosial dan kualitas hidup masyarakat di Kota Pekanbaru relatif baik, penguatan kebijakan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan masih perlu terus dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Gambar 3.3. Prosentase Realisasi Indikator Kinerja Kota Pekanbaru Terhadap Target Indikator Nasional Tahun 2025



3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta *alternative* solusi yang telah dilakukan.

Analisis akibat keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta *alternative* solusi yang telah dilakukan akan disajikan berdasarkan sasaran kinerja yang di kelompokkan berdasarkan Sasaran.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan Struktur Transformasi Pembangunan yang Berdaya Saing	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,81	4,24	100

Analisis Capaian Indikator Indeks Daya Saing Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025

1. Capaian Kinerja

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan daerah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan produktivitas, investasi, inovasi, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan target Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,81, sedangkan realisasi yang dicapai adalah sebesar 4,24. Dengan demikian tingkat capaian indikator ini mencapai 111,29% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan daya saing daerah berada pada kategori sangat baik dan telah melampaui target kinerja yang direncanakan. Hal ini mencerminkan bahwa berbagai program pembangunan daerah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan iklim usaha, penguatan sektor ekonomi, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

2. Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator Indeks Daya Saing Daerah ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- Komitmen Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Daya Saing Pemerintah Kota Pekanbaru secara konsisten mengarahkan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan daya saing daerah melalui penguatan sektor ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

- Perkembangan Sektor Perdagangan dan Jasa Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Riau memiliki aktivitas ekonomi yang cukup dinamis sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan daya saing ekonomi daerah.
- Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, fasilitas publik, serta sarana pendukung kegiatan ekonomi turut memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta jasa.
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari peningkatan indikator pembangunan manusia turut mendukung produktivitas masyarakat dan daya saing tenaga kerja.
- Perbaikan Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha Berbagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha telah mendorong peningkatan aktivitas investasi dan pengembangan usaha di Kota Pekanbaru.

3. Permasalahan

Meskipun capaian indikator telah melampaui target, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

- Masih terdapat kebutuhan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi.
- Penguatan ekosistem inovasi daerah masih perlu ditingkatkan agar mampu mendorong produktivitas dan nilai tambah ekonomi daerah.
- Kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha masih perlu ditingkatkan melalui program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerja.
- Persaingan antar daerah dalam menarik investasi semakin meningkat sehingga diperlukan strategi yang lebih kompetitif dalam pengembangan potensi daerah.

4. Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Indeks Daya Saing Daerah pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kota Pekanbaru akan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan pembangunan dan kualitas infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi daerah.
- Mendorong penguatan ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.

- Mengembangkan program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kompetensi tenaga kerja.
- Meningkatkan iklim investasi daerah melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan pelayanan investasi, serta promosi potensi daerah.
- Mengoptimalkan pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah guna meningkatkan daya saing ekonomi Kota Pekanbaru.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatkan Kualitas SDM	IPM	Nilai	83,00	84,91	100,34 %

Analisis Capaian IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia yang dilihat dari tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM menggambarkan kualitas hidup masyarakat serta menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru Tahun 2025

1. Capaian Kinerja

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Indikator ini mencerminkan kualitas hidup masyarakat serta tingkat kesejahteraan yang dicapai melalui berbagai program pembangunan.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan target Indeks Pembangunan Manusia sebesar 83,00, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 84,91. Dengan demikian, tingkat capaian indikator ini mencapai 102,30% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia di Kota Pekanbaru berada pada kategori sangat baik dan telah melampaui target yang direncanakan. Nilai IPM yang tinggi mencerminkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang didukung oleh perbaikan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta peningkatan daya beli masyarakat.

2. Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui berbagai program, seperti peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta dukungan terhadap program wajib belajar.
- Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui fasilitas kesehatan yang lebih memadai, program kesehatan masyarakat, serta upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Pertumbuhan aktivitas ekonomi di Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa turut memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sehingga berkontribusi terhadap peningkatan standar hidup layak.
- Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.
- Sinergi Antar Perangkat Daerah dalam Pembangunan SDM Koordinasi dan sinergi antara perangkat daerah dalam melaksanakan program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial turut mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia.

3. Permasalahan

Meskipun capaian IPM telah melampaui target, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

- Masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan dan akses layanan pendidikan pada beberapa kelompok masyarakat.
- Peningkatan kualitas layanan kesehatan masih perlu terus dioptimalkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

- Kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat masih perlu ditekan melalui peningkatan kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

4. Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kota Pekanbaru akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan serta penguatan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- Mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta program promotif dan preventif.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- Memperkuat program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengurangi kesenjangan kesejahteraan.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kualitas pembangunan manusia di Kota Pekanbaru dapat terus meningkat sehingga mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
3.	Mengarustamaan Budaya Melayu untuk Ketahanan sosial budaya masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	60,50	59,00	98,66

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan kebudayaan di suatu daerah. Indeks ini menggambarkan bagaimana kebudayaan dilestarikan, dikembangkan, serta dimanfaatkan sebagai bagian dari pembangunan nasional maupun daerah. Pengukuran IPK mencakup beberapa dimensi utama, antara lain ekonomi budaya, pendidikan budaya, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, serta tata kelola budaya.

Pada Tahun 2025, Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Pekanbaru tercatat sebesar 59,0, sementara target yang ditetapkan sebesar 60,5, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai sekitar 97,52 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan di Kota Pekanbaru telah berjalan cukup baik, meskipun masih sedikit di bawah target yang telah direncanakan.

Analisis Penyebab Belum Tercapainya Target

Belum tercapainya target Indeks Pembangunan Kebudayaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Belum optimalnya pengembangan ekonomi berbasis budaya
Pemanfaatan potensi budaya sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif masih perlu ditingkatkan. Kegiatan ekonomi yang berbasis pada seni, kerajinan, dan produk budaya lokal belum sepenuhnya berkembang secara optimal.
2. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya yang masih perlu ditingkatkan
Perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan yang semakin modern dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian budaya tradisional.
3. Keterbatasan pengelolaan dan pelestarian warisan budaya
Upaya inventarisasi, pelestarian, serta pemanfaatan warisan budaya daerah masih memerlukan penguatan, baik dari sisi kebijakan maupun dukungan sumber daya.
4. Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan kebudayaan
Pengembangan kebudayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan berbagai pihak seperti lembaga adat, komunitas budaya, serta masyarakat. Sinergi antar pihak tersebut masih perlu terus diperkuat.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan kebudayaan di Kota Pekanbaru secara umum telah berjalan dengan baik, namun masih belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam memperkuat identitas daerah serta ketahanan sosial budaya masyarakat.

1. Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung capaian indeks pembangunan kebudayaan di kota pekanbaru antara lain:

- Komitmen pemerintah daerah dalam pelestarian budaya melayu pemerintah kota pekanbaru terus berupaya menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya melayu melalui berbagai kegiatan kebudayaan, festival budaya, serta pembinaan terhadap pelaku seni dan

budaya.

- Penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya berbagai kegiatan seni dan budaya yang dilaksanakan secara rutin turut mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan daerah.
- Peran komunitas dan pelaku budaya keberadaan komunitas budaya, sanggar seni, serta pelaku budaya yang aktif berkontribusi dalam pengembangan seni dan budaya lokal turut mendukung pembangunan kebudayaan di kota pekanbaru.
- Penguatan identitas budaya daerah upaya pengarusutamaan budaya melayu dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat turut memperkuat identitas budaya daerah.

2. Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kota Pekanbaru akan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan pembinaan dan dukungan terhadap pelaku seni dan budaya lokal.
- Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebudayaan.
- Mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya Melayu sebagai potensi unggulan daerah.
- Melakukan inventarisasi, dokumentasi, dan pelestarian warisan budaya daerah secara lebih sistematis.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan melalui berbagai kegiatan budaya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
4.	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	77,11	84,23	109,23 %

Pada Tahun 2025, Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Pekanbaru tercatat sebesar 84,23, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 77,11, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai sekitar 109,23 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama



di Kota Pekanbaru berada pada kategori sangat baik dan bahkan melampaui target yang direncanakan.

Tingginya nilai indeks tersebut mencerminkan bahwa kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru yang terdiri dari berbagai latar belakang agama dapat hidup secara harmonis dan saling menghormati dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi dan saling menghargai antar umat beragama telah berkembang dengan baik dalam kehidupan masyarakat.

Keberhasilan capaian indeks ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga keagamaan. Berbagai kegiatan dialog antar umat beragama, forum kerukunan umat beragama, serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang melibatkan berbagai kelompok agama turut berkontribusi dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama di Kota Pekanbaru.

Selain itu, peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas kehidupan sosial masyarakat. FKUB berperan dalam memfasilitasi dialog antar pemuka agama serta memberikan rekomendasi terkait kehidupan keagamaan di daerah sehingga potensi konflik dapat diminimalkan sejak dini.

Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama yang melampaui target tersebut memberikan dampak positif terhadap stabilitas sosial masyarakat. Kondisi sosial yang harmonis akan mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pembangunan daerah, termasuk dalam mendukung aktivitas ekonomi, investasi, serta kehidupan sosial masyarakat yang damai.

Meskipun capaian indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan, pemerintah daerah tetap perlu mempertahankan dan meningkatkan berbagai program penguatan kerukunan umat beragama. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keharmonisan kehidupan beragama di Kota Pekanbaru dapat terus terjaga di tengah dinamika perkembangan masyarakat yang semakin beragam.

Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan dialog lintas agama, penguatan peran lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat, serta pengembangan kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat secara inklusif.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan tingkat kerukunan umat beragama di Kota Pekanbaru dapat terus terjaga dan menjadi salah satu modal sosial penting dalam mendukung pembangunan daerah yang harmonis, aman, dan berkelanjutan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
5.	Meningkatnya Pemajuan Budaya Melayu	Persentase pemajuan budaya melayu	Persen	6,40	N/A	

Pada Tahun 2025 terdapat sebanyak 555 Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada dimasyarakat kota Pekanbaru. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.

Tabel 3.5 Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Pekanbaru

NO.	OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	JUMLAH
1	Tradisi Lisan	71
2	Manuskrip	3
3	Adat Istiadat	36
4	Ritus	46
5	Pengetahuan Tradisional	231
6	Teknologi Tradisional	44
7	Seni	55
8	Bahasa	22
9	Permainan Rakyat	32
10	Olahraga Tradisional	5
11	Diduga Cagar Budaya	10
Total		555

Sumber : Data PPKD Tahun 2019 (Bidang Pembinaan Seni Dan Budaya)

Pada Tahun 2025 sekitar 11 Objek Pemajuan Yang Mengalami Ketahanan Budaya dengan rincian sebagai berikut ;

Tabel 3.6 Target Objek Pemajuan Yang mengalami Ketahanan Budaya Tahun 2025

No.	Objek Pemajuan Kebudayaan	Target Tahun 2025
1	Tradisi Lisan	71
2	Manuskrip	3
3	Adat Istiadat	36
4	Ritus	46
5	Pengetahuan Tradisional	231
6	Teknologi Tradisional	44
7	Seni	55
8	Bahasa	22
9	Permainan Rakyat	32
10	Olahraga Tradisional	5
11	Cagar Budaya	58
Total		603

Formulasi Perhitungannya adalah

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Pemajuan} &= \frac{\text{Jumlah Objek Pemajuan yang Mengalami Ketahanan Budaya Tahun } n}{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun } (n=0)} \times 100 \\
 \text{Budaya Melayu} &= \frac{12}{177} \times 100 \\
 &= 6,78
 \end{aligned}$$

Tabel 3.7 Hasil Evaluasi Persentase Cagar Budaya Yang terlindungi s/d Tahun 2025

NO	CAGAR BUDAYA	JENIS	KONDISI	ALAMAT	KONDISI S/D TAHUN 2025			KET.
					PROSES (ceklis)	USULAN (ceklis)	PENETAPAN	
1	Rumah Tuan Khadi H. Zakaria	Bangunan	Terawat	Senapelan			√	
2	Rumah Haji Sulaiman	Bangunan	Terawat	Senapelan			√	
3	Rumah Bathin Senapelan	Bangunan	Terawat	Senapelan			√	
4	Rumah Havenmeester	Bangunan	Kurang Terawat	Senapelan			√	
5	Rumah Controleur (Gedung PRRI)	Bangunan	Terawat	Senapelan			√	
6	Rumah Bekas Tentara Jepang (Rumah Fateh Ali)	Bangunan	Kurang Terawat	Bangunan			√	
7	SMAN 1 Pekanbaru	Bangunan	Terawat	Senapelan			√	
8	Halte Ternimal Lama	Struktur	Kurang Terawat	Limapuluh			√	
9	Pompa Bensin Nasco	Struktur	Kurang Terawat	Senapelan			√	
10	Makam Marhum Bukit (Sultan Abdul Jalil Alamuddin)	Situs	Kurang Terawat	Senapelan			√	
11	Makam Haji Sulaiman	Situs	Kurang Terawat	Senapelan			√	
12	Makam Thahir Imam Districhoofd Negeri Pekanbaru	Situs	Kurang Terawat	Senapelan			√	
13	Makam Haji Muhammad Amin Perintis Kemerdekaan	Situs	Kurang Terawat	Senapelan			√	
14	Rumah Singgah Sultan Siak/Rumah Mertua Tuan Khadi	Bangunan	Terawat	Senapelan			√	



NO	CAGAR BUDAYA	JENIS	KONDISI	ALAMAT	KONDISI S/D TAHUN 2025			KET.
					PROSES (ceklis)	USULAN (ceklis)	PENETAPAN	
15	Prasasti Pengibaran Merah Putih Pertama di Pekanbaru	Stuktur	Kurang Terawat	Senapelan			√	
16	Tugu Titik Nol Pekanbaru	Stuktur	Terawat	Senapelan			√	
17	Makam Marhum Pekan (Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah)	Situs	Terawat	Senapelan			√	
18	Makam Pahlawan Kerja	Situs	Kurang Terawat	Bukit Raya			√	
19	Lelo I Koleksi H.R Soebrantas	Benda	Kurang Terawat	Senapelan			√	
20	Lelo II Koleksi H.R Soebrantas	Benda	Kurang Terawat	Senapelan			√	
21	Lelo III Koleksi H.R Soebrantas	Benda	Kurang Terawat	Senapelan			√	
22	Lelo IV Koleksi H.R Soebrantas	Benda	Kurang Terawat	Senapelan			√	
23	Lelo V Koleksi H.R Soebrantas	Benda	Kurang Terawat	Senapelan			√	
24	Kain Tenun Sultan Syarif Kasim I	Benda	Terawat	Limapuluh			√	
25	Kedai Kopi Kim Teng	Bangunan	Terawat	Senapelan			√	
26	Usaha Roti Senapelan	Bangunan	Terawat	Senapelan			√	
27	Rumah Kho Sin Bin	Bangunan	Kurang Terawat	Senapelan			√	
28	Bekas Pos Imigrasi	Bangunan	Kurang Terawat	Senapelan			√	
29	Rumah Melayu Haji Yahya	Bangunan	Kurang Terawat	Senapelan			√	
30	Sin Tong Lam	Bangunan	Kurang Terawat	Senapelan			√	
31	Kereta Angin Soeman HS	Benda	Terawat	Marpoyan Damai			√	
32	Koin Satu Keping Bugis (1250 H)	Benda	Terawat	Marpoyan Damai			√	
33	Koin Satu Keping Deli (1251 H)	Benda	Terawat	Marpoyan Damai			√	
34	Koin Satu Keping Negeri Siak (1251 H)	Benda	Terawat	Marpoyan Damai			√	
35	Lima Rupiah Oeang Republik Indonesia Daerah Riau	Benda	Terawat	Marpoyan Damai			√	
36	Potongan Lokomotif Pekanbaru	Benda	Kurang Terawat	Lima Puluh			√	
37	Nisan Laki-Laki Tipe Aceh	Benda	Terawat	Marpoyan Damai			√	



NO	CAGAR BUDAYA	JENIS	KONDISI	ALAMAT	KONDISI S/D TAHUN 2025			KET.
					PROSES (ceklis)	USULAN (ceklis)	PENETAPAN	
38	Nisan Marhum Bukit	Benda	Terawat	Marpoyan Damai			√	
39	Nisan Marhum Pekan	Benda	Terawat	Marpoyan Damai			√	
40	Nisan Sulthannah Khodijah	Benda	Terawat	Marpoyan Damai			√	
41	Nisan Tengku Embung Badariah	Benda	Terawat	Marpoyan Damai			√	
42	Potongan Rel Kereta Api Pekanbaru	Benda	Kurang Terawat	Senapelan			√	
43	Struktur Masjid Raya Pekanbaru	Struktur	Terawat	Senapelan			√	
44	Vajra	Benda	Terawat	Marpoyan Damai			√	
45	Arca Dewi	Benda	Terawat	Marpoyan Damai			√	
46	Angkusa	Benda	Terawat	Marpoyan Damai			√	
47	Lapik Arca	Benda	Terawat	Marpoyan Damai			√	
48	Arca Ganapati/Ganeśa	Benda	Terawat	Marpoyan Damai			√	
49	Cermin Berlapis Emas	Benda	Terawat	Marpoyan Damai			√	
50	Uang Kertas 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus) Rupiah Seri Hewan	Benda	Terawat	Marpoyan Damai			√	
51	Penetapan Uang Kertas 1.000 (Seribu) Rupiah Seri Hewan	Benda	Terawat	Marpoyan Damai			√	
52	Uang Kertas 5 (Lima) Rupiah Seri Riau	Benda	Terawat	Marpoyan Damai			√	
53	Uang Kertas 100 (Seratus) Rupiah Seri Pekerja	Benda	Terawat	Marpoyan Damai			√	
54	Manuskrip Azimat Pelindung Diri	Benda	Terawat	Marpoyan Damai			√	
55	Manuskrip Tafsir Qur'an	Benda	Terawat	Marpoyan Damai			√	
56	Manuskrip Kitab Nahwu Shorof	Benda	Terawat	Marpoyan Damai			√	
57	Mimbar Masjid Raya Pekanbaru	Benda	Terawat	Senapelan			√	
58	Bangsai Rumah Sakit Kodya Pekanbaru	Bangunan	Terawat	Sukajadi			√	

Sumber data Bidang Seni Dan Budaya Disbudpar Kota Pekanbaru Tahun 2025

Program dan Kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran termaksud adalah :

Tabel 3.8 Program, kegiatan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Program/ kegiatan	Anggaran	Realisasi	Output program/ kegiatan yang dihasilkan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
					Menunjang pencapaian iku	Kurang menunjang pencapaian iku
1	2	3	4	5	6	7
I	Pengembangan Kebudayaan	Rp2.964.193.358	Rp2.630.595.162	Persentase Terselenggaranya Program Pengembangan Kebudayaan		
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp783.464.844	Rp570.996.244		√	
2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.180.728.514	Rp2.059.598.918		√	
II	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp378.263.932	Rp346.046.412	Persentase Terselenggaranya Program Pengembangan Kebudayaan		
1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Rp193.204.202	Rp187.004.202		√	
2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Rp185.059.730	Rp159.042.210		√	

Pada Tahun 2025, target Persentase Pemajuan Budaya Melayu ditetapkan sebesar 6,40 persen, namun realisasi capaian indikator belum tersedia atau belum dapat dihitung (N/A) pada tahun pelaporan. Kondisi ini menyebabkan capaian kinerja terhadap indikator tersebut belum dapat diukur secara kuantitatif.

Belum tersedianya nilai realisasi tersebut umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Belum optimalnya sistem pengukuran indikator kinerja kebudayaan, khususnya dalam pengumpulan data kegiatan pemajuan budaya Melayu yang dilaksanakan oleh berbagai pihak.

2. Keterbatasan data pendukung dari perangkat daerah dan lembaga terkait, sehingga proses perhitungan indikator belum dapat dilakukan secara komprehensif.
3. Belum terintegrasinya sistem pelaporan kegiatan budaya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, lembaga adat, komunitas budaya, maupun masyarakat.

Meskipun capaian indikator belum dapat dihitung, Pemerintah Kota Pekanbaru tetap melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka pemajuan budaya Melayu, antara lain melalui penyelenggaraan festival budaya, pertunjukan seni tradisional, pelestarian adat istiadat Melayu, serta penguatan peran lembaga adat dan komunitas budaya. Berbagai kegiatan budaya tersebut juga mendapat antusiasme masyarakat, seperti pelaksanaan festival budaya Melayu yang melibatkan partisipasi masyarakat luas dan menjadi sarana pelestarian budaya daerah.

Kedepan, pemerintah daerah perlu melakukan penguatan sistem pengelolaan data kebudayaan, termasuk penyusunan indikator yang lebih terukur dan mekanisme pelaporan kegiatan budaya yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, capaian indikator Persentase Pemajuan Budaya Melayu dapat diukur secara lebih akurat pada tahun-tahun berikutnya.

Selain itu, peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat Melayu, komunitas seni budaya, serta dunia pendidikan juga perlu terus diperkuat agar upaya pelestarian dan pengembangan budaya Melayu dapat berjalan lebih optimal.

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan pemajuan budaya Melayu di Kota Pekanbaru dapat terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas budaya daerah serta mendukung pembangunan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

Capaian indikator kinerja Persentase Pemajuan Budaya Melayu tahun 2025 menunjukkan keberhasilan yang signifikan dengan realisasi 6,78% dari target 6,40%, atau pencapaian 105,94%. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor kunci:

1. Pengelolaan Program yang Efektif:
 - Implementasi Program Pengembangan Kebudayaan dengan realisasi kinerja mencapai 100% menunjukkan efektivitas pengelolaan program
 - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebudayaan yang tepat sasaran dengan realisasi anggaran Rp334,480,356 dari pagu Rp478,932,500
 - Pelestarian kesenian tradisional yang berhasil mencapai target dengan realisasi Rp303,887,268



2. Penguatan Kelembagaan:

- Pembentukan struktur organisasi yang jelas dengan Jabatan Fungsional Pamong Budaya yang fokus pada kesenian, nilai-nilai budaya, serta sejarah dan kepurbakalaan
- Koordinasi efektif antar unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan pemajuan budaya
- Penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur

3. Strategi Pelestarian yang Komprehensif:

- Berhasil mengelola 12 objek pemajuan kebudayaan dari total 177 objek yang terdata
- Pelaksanaan program perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan secara sistematis
- Pendekatan holistik dalam pemajuan budaya yang mencakup aspek seni, adat istiadat, dan cagar budaya

4. Dukungan Stakeholder:

- Partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian budaya
- Kerjasama yang baik dengan lembaga/kelompok kesenian daerah
- Dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dalam pemajuan budaya Melayu

5. Inovasi dan Adaptasi:

- Pengembangan metode pelestarian budaya yang sesuai dengan perkembangan zaman
- Pemanfaatan teknologi dalam dokumentasi dan promosi budaya
- Integrasi nilai-nilai budaya Melayu dalam pembangunan daerah

Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam melestarikan dan memajukan budaya Melayu sebagai identitas daerah, sekaligus memberikan kontribusi pada pengembangan kebudayaan nasional Indonesia.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
6.	Penyediaan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Peningkatan Konektivitas	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	74,5	80	107,38

Analisis Capaian Indikator Indeks Layanan Infrastruktur Kota Pekanbaru Tahun 2025

1. Capaian Kinerja

Indeks Layanan Infrastruktur merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan, kualitas, serta aksesibilitas infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas masyarakat dan kegiatan perekonomian di daerah. Infrastruktur yang dimaksud meliputi antara lain infrastruktur jalan, transportasi, sanitasi, air bersih, serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan target Indeks Layanan Infrastruktur sebesar 74,5, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 80,00. Dengan demikian tingkat capaian indikator ini mencapai 107,38% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyediaan dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur di Kota Pekanbaru berada pada kategori sangat baik dan telah melampaui target yang direncanakan. Hal ini mencerminkan bahwa berbagai program pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan infrastruktur bagi masyarakat.

2. Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator Indeks Layanan Infrastruktur didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar
Pemerintah Kota Pekanbaru secara konsisten melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, serta sarana prasarana publik yang mendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi.
- Peningkatan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Perkotaan
Upaya peningkatan kualitas layanan infrastruktur perkotaan, termasuk fasilitas publik dan sarana pendukung pelayanan masyarakat, turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai indeks layanan infrastruktur.
- Perencanaan Pembangunan Infrastruktur yang Lebih Terarah
Perencanaan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah memungkinkan pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
- Dukungan Anggaran dan Prioritas Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah sehingga mendapatkan dukungan penganggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan.

- Sinergi Antar Perangkat Daerah

Koordinasi dan kerja sama antar perangkat daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur turut mendukung tercapainya peningkatan kualitas layanan infrastruktur.

3. Permasalahan

Meskipun capaian indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

- Kebutuhan peningkatan kualitas dan pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas perkotaan.
- Masih terdapat beberapa wilayah yang memerlukan peningkatan akses terhadap layanan infrastruktur dasar.
- Keterbatasan kapasitas infrastruktur tertentu yang perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi perkembangan kota yang semakin pesat.

4. Tindak Lanjut

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan infrastruktur di Kota Pekanbaru, pemerintah daerah akan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- Melanjutkan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang mendukung kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
- Meningkatkan program pemeliharaan infrastruktur secara berkala untuk menjaga kualitas dan fungsi infrastruktur yang telah dibangun.
- Mengoptimalkan perencanaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan kebutuhan perkembangan kota.
- Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pengelolaan dan pengembangan infrastruktur daerah.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kualitas layanan infrastruktur di Kota Pekanbaru dapat terus meningkat sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan..

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
7.	Mewujudkan Perekonomian Inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,65	5,21	78,35%

Analisis Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru Tahun 2025

1. Capaian Kinerja

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menggambarkan perkembangan aktivitas perekonomian suatu daerah yang diukur dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Indikator ini menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam menciptakan nilai tambah ekonomi melalui berbagai sektor usaha yang ada.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,65%, sedangkan realisasi yang dicapai adalah sebesar 5,21%. Dengan demikian tingkat capaian indikator ini mencapai sekitar 78,35% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru belum mencapai target yang direncanakan, meskipun aktivitas ekonomi daerah tetap menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi sehingga belum mampu mencapai tingkat pertumbuhan yang diharapkan.

2. Faktor Pendukung

Meskipun belum mencapai target, beberapa faktor tetap mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru, antara lain:

- Perkembangan Sektor Perdagangan dan Jasa

Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Riau memiliki aktivitas ekonomi yang cukup dinamis sehingga tetap memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

- Meningkatnya Aktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Perkembangan UMKM di berbagai sektor usaha turut memberikan kontribusi dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

- Perbaikan Infrastruktur Perkotaan
Peningkatan kualitas infrastruktur daerah turut mendukung mobilitas barang dan jasa sehingga membantu memperlancar kegiatan ekonomi.
- Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah
Berbagai program pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan investasi turut berperan dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Permasalahan

Belum tercapainya target pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Dinamika Perekonomian Nasional dan Global
Kondisi ekonomi nasional dan global yang berfluktuasi turut mempengaruhi aktivitas ekonomi di daerah.
- Keterbatasan Investasi Baru
Investasi yang belum tumbuh secara optimal dapat mempengaruhi peningkatan kapasitas produksi dan penciptaan lapangan kerja.
- Ketergantungan pada Sektor Tertentu
Struktur ekonomi yang masih didominasi oleh beberapa sektor tertentu dapat membuat pertumbuhan ekonomi kurang optimal ketika terjadi perlambatan pada sektor tersebut.
- Daya Beli Masyarakat yang Belum Optimal
Daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih juga dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kota Pekanbaru akan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- Mendorong peningkatan investasi daerah melalui peningkatan pelayanan perizinan dan promosi potensi investasi.
- Mengembangkan sektor ekonomi unggulan daerah, khususnya sektor perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif.
- Memperkuat pemberdayaan UMKM melalui akses pembiayaan, pelatihan usaha, dan pengembangan pasar.

- Meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi dan distribusi barang serta jasa.
- Mendorong peningkatan daya beli masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru pada tahun-tahun mendatang dapat meningkat dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
8.	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,81	67,17	110,46 %

Analisis Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru Tahun 2025

1. Capaian Kinerja

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi kualitas lingkungan di suatu daerah yang meliputi kualitas air, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan. Indikator ini menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 60,81, sedangkan realisasi yang dicapai adalah sebesar 67,17. Dengan demikian tingkat capaian indikator ini mencapai sekitar 110,46% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kota Pekanbaru berada pada kategori baik dan telah melampaui target yang direncanakan. Hal ini mencerminkan bahwa berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan di daerah.

2. Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- Penguatan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintah Kota Pekanbaru terus melaksanakan berbagai program pengelolaan lingkungan hidup, seperti pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan sampah, serta upaya pelestarian lingkungan.

- **Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat**

Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta partisipasi dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

- **Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan**

Pelaksanaan program pengendalian pencemaran udara dan air serta pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran turut mendukung peningkatan kualitas lingkungan.

- **Pengembangan Ruang Terbuka Hijau**

Upaya peningkatan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan juga memberikan kontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

- **Sinergi Antar Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan**

Koordinasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup turut memperkuat keberhasilan program-program lingkungan.

3. Permasalahan

Meskipun capaian indikator ini telah melampaui target, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

- Pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas perkotaan yang berpotensi meningkatkan tekanan terhadap kualitas lingkungan.
- Pengelolaan sampah perkotaan yang masih memerlukan peningkatan dalam hal pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah.
- Potensi pencemaran udara dan air akibat aktivitas transportasi dan kegiatan industri.
- Keterbatasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan yang perlu terus ditingkatkan.

4. Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Pekanbaru, pemerintah daerah akan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan program pengelolaan dan pengurangan sampah berbasis masyarakat.

- Mengoptimalkan pengawasan terhadap potensi pencemaran lingkungan dari kegiatan usaha dan industri.
- Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai program pelestarian lingkungan hidup.
- Mengembangkan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kualitas lingkungan hidup di Kota Pekanbaru dapat terus terjaga dan meningkat sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat..

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
9.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	72,65	77,54	106,73 %

Berikut adalah rincian nilai dan catatan dari masing-masing indikator penilaian:

Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi 64,29%

Indikator mencapai target baik: 9

Indikator dengan target baik: 14

Total indikator: 14

5 indikator dengan capaian bobot tertinggi

- Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 97,50%
- Tingkat Digitalisasi Arsip 92,80%
- Indeks Reformasi Hukum 87,20%
- Indeks Pelayanan Publik 83,50%
- Indeks Sistem Merit 82,50%



5 indikator dengan capaian bobot terendah

- Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE 0,00%
- Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI 14,29%
- Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan 40,00%
- Tingkat Maturitas SPIP 50,25%
- Indeks Pembangunan Statistik 58,00%

Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi 57,14%

Indikator mencapai target baik: 4

Indikator dengan target baik: 7

Total indikator: 8

3 indikator dengan capaian bobot tertinggi

- Survei Kepuasan Masyarakat 91,13%
- Capaian IKU Makro 89,25%
- Indeks SPBE 77,89%

3 indikator dengan capaian bobot terendah

- Opini BPK 66,60%
- Survei Penilaian Integritas 67,70%
- Capaian IKU Non Makro 68,17%

RB General

- Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi
- Total Score Index 37,79
- Total Bobot 50,00
- Persentase 75,58%

Strategi Pelaksanaan RB General

- Total Score Index 6,21
- Total Bobot 10,00
- Persentase 62,10%

Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi

- Total Score Index 24,52
- Total Bobot 40,00



- Persentase 61,30%

RB Tematik

Capaian Indikator Dampak

- Total Score Index 7,07
- Total Bobot 15,00
- Persentase 47,13%

Strategi Pembangunan

- Total Score Index 1,95
- Total Bobot 5,00
- Persentase 39,00%

Strategi Pembangunan

- Total Score Index 0,00
- Total Bobot 0,04
- Persentase 0,00%

Analisis Capaian Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kota Pekanbaru Tahun 2025

1. Capaian Kinerja

Reformasi Birokrasi merupakan upaya pemerintah dalam melakukan pembenahan sistem penyelenggaraan pemerintahan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nilai Reformasi Birokrasi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan target Nilai Reformasi Birokrasi sebesar 72,65, sedangkan realisasi yang dicapai adalah sebesar 77,54. Dengan demikian tingkat capaian indikator ini mencapai sekitar 106,73% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Pekanbaru berada pada kategori baik dan telah melampaui target yang direncanakan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan dalam sistem tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

2. Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator Nilai Reformasi Birokrasi didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- **Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**
Pemerintah Kota Pekanbaru secara konsisten melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang mendukung implementasi Reformasi Birokrasi pada seluruh perangkat daerah.
- **Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**
Upaya penguatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan kinerja perangkat daerah turut mendukung peningkatan nilai Reformasi Birokrasi.
- **Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik**
Berbagai inovasi dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh perangkat daerah turut meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- **Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Tata Kelola Pemerintahan**
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas pelayanan administrasi pemerintahan.
- **Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara**
Upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi turut mendukung keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

3. Permasalahan

Meskipun capaian indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, antara lain:

- Masih perlunya peningkatan konsistensi implementasi Reformasi Birokrasi pada seluruh perangkat daerah.
- Penguatan budaya kerja birokrasi yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik masih perlu terus ditingkatkan.
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

4. Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Reformasi Birokrasi pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kota Pekanbaru akan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan konsistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh perangkat daerah.
- Memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penguatan pengukuran kinerja.
- Mengembangkan inovasi pelayanan publik guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
- Mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah melalui program pengembangan kompetensi ASN.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Pekanbaru dapat terus meningkat sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas..

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90,5	91,12	100,69 %

Analisis Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Pekanbaru Tahun 2025

1. Capaian Kinerja

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Penilaian IKM mencerminkan persepsi masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan seperti prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya layanan, kompetensi petugas, serta sarana dan prasarana pelayanan.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan target Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 90,50, sedangkan realisasi yang dicapai adalah sebesar 91,12. Dengan demikian tingkat capaian indikator ini mencapai sekitar 100,69% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru berada pada kategori sangat baik dan telah melampaui target yang direncanakan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**
Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan kecepatan pelayanan, serta peningkatan transparansi pelayanan kepada masyarakat.
- **Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik**
Berbagai inovasi pelayanan yang dilakukan oleh perangkat daerah turut meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan publik.
- **Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan**
Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelayanan publik membantu meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat.
- **Peningkatan Kompetensi Aparatur Pelayanan**
Upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pelayanan melalui pelatihan dan pembinaan turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- **Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Lebih Baik**
Peningkatan fasilitas pelayanan publik turut memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan.

3. Permasalahan

Meskipun capaian indikator ini telah melampaui target, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

- Masih terdapat perbedaan kualitas pelayanan antar unit layanan pada beberapa perangkat daerah.
- Perlunya peningkatan konsistensi standar pelayanan publik pada seluruh unit pelayanan.
- Masih perlunya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

4. Tindak Lanjut

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Pekanbaru, pemerintah daerah akan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan standar kualitas pelayanan publik pada seluruh perangkat daerah.
- Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Meningkatkan kompetensi aparatur pelayanan melalui pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan.
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kualitas pelayanan publik guna memastikan pelayanan yang diberikan semakin efektif dan berkualitas.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kualitas pelayanan publik di Kota Pekanbaru dapat terus meningkat sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, Indeks Kepuasan Kota Pekanbaru sebesar 91,12 dan masuk pada kategori SANGAT BAIK, dengan rincian nilai rata rata unsur sebagai berikut:

Tabel 3.9 Hasil Survey Kepuasan Konsumen Kota Pekanbaru Tahun 2025

Unsur Layanan	Nilai Rata Rata per unsur	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	3,57	89,16	A	SANGAT BAIK
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,58	89,44	A	SANGAT BAIK
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian	3,55	88,66	A	SANGAT BAIK
Unsur 4 : Biaya/Tarif	3,9	97,57	A	SANGAT BAIK
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,58	89,42	A	SANGAT BAIK
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	3,61	90,25	A	SANGAT BAIK
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	3,62	90,58	A	SANGAT BAIK
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,54	88,38	A	SANGAT BAIK
Unsur 9 : Sarana dan prasarana	3,86	96,58	A	SANGAT BAIK
IKM	3.61	90.14	A	SANGAT BAIK

Sumber : Hasil Survey, 2025

Berdasarkan tabel 5.1 di atas, terlihat bahwa 8 unsur yaitu unsur persyaratan pelayanan; unsur sistem, mekanisme dan prosedur; Unsur biaya /tarif; unsur kompetensi pelaksana; unsur perilaku pelaksana; serta unsur sarana dan prasarana berada pada mutu pelayanan A dengan kategori kinerja pelayanan Sangat Baik sementara unsur waktu penyelesaian; unsur produk spesifikasi jenis pelayanan dan unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada Mutu B dengan kategori kinerja pelayanan baik.

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Pekanbaru sudah sangat baik akan tetapi diperlukan perbaikan, dan konsistensi dalam melaksanakan SOP dan Standar Pelayanan tidak menjadi otomatisasi dalam peningkatan pelayanan kemudian Pegawai sebaiknya diberikan penghargaan Servis Excellent untuk meningkatkan semangat pegawai dalam melayani masyarakat. Berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kemampuan atau kompetensi serta perilaku dari aparatur menjadi sangat penting diperhatikan. Pelayanan prima yang menjadi salah satu slogan dalam pelayanan publik menurut responden belum tercermin dari kompetensi dan perilaku yang ditunjukkan oleh aparatur dalam memberikan pelayanan. Beberapa keluhan yang disampaikan oleh responden berkaitan dengan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan

dan tindak lanjut, Untuk penanganan Pengaduan dengan cepat diperlukan sebuah Aplikasi Pengaduan Masyarakat Khusus Pelayanan yang di berikan OPD se-Kota Pekanbaru, kemudian Aplikasi ini juga berafiliasi dengan survey kepuasan masyarakat yang berbasiskan real time sehingga pimpinan daerah dapat melihat secara langsung kinerja OPD.

Penguatan Pelayanan Berbasis Aplikasi sebaiknya setiap Tahun dilakukan Evaluasi untuk mengetahui kekurangan aplikasi tersebut sehingga dapat dilakukan Perbaikan yang lebih sempurna. Pemberian penghargaan Kepada ASN terbaik dengan berbagai Kategori dalam Hal Pelayanan Publik Per OPD dapat menjadikan Motivasi Kepada ASN dalam memberikan Pelayanan OPD Se-Kota pekanbaru perlu melakukan Up grade informasi yang berbasiskan Online mengenai kegiatan dan program kerja OPD tersebut sehingga seluruh kegiatan OPD terinformasikan kepada masyarakat.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	3	4	5		
11.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	Nilai	71,5	68,24	95,44%

Analisis Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Pekanbaru Tahun 2025

1. Capaian Kinerja

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada suatu instansi pemerintah. Penilaian ini mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, serta capaian kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan target Nilai AKIP sebesar 71,50, sedangkan realisasi yang dicapai adalah sebesar 68,28. Dengan demikian tingkat capaian indikator ini mencapai sekitar 95,50% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di Kota Pekanbaru telah berjalan dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan peningkatan dalam beberapa aspek pengelolaan kinerja pemerintahan agar sistem akuntabilitas kinerja dapat berjalan secara lebih optimal.

2. Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan Sistem AKIP di Kota Pekanbaru antara lain:

- **Komitmen Pemerintah Daerah dalam Penerapan SAKIP**

Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong penerapan sistem akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan kinerja secara berkala.

- **Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah**

Integrasi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah turut mendukung implementasi sistem AKIP.

- **Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Kinerja**

Upaya peningkatan kapasitas aparatur melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pelatihan terkait pengelolaan kinerja turut mendukung pelaksanaan SAKIP.

- **Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Secara Berkala**

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik membantu dalam memantau pencapaian indikator kinerja serta mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.

3. Permasalahan

Belum tercapainya target nilai AKIP dipengaruhi oleh beberapa permasalahan, antara lain:

- **Kualitas Perencanaan Kinerja yang Masih Perlu Ditingkatkan**

Beberapa indikator kinerja masih perlu disempurnakan agar lebih terukur dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

- **Konsistensi Pengukuran dan Pelaporan Kinerja**

Proses pengukuran dan pelaporan kinerja pada beberapa perangkat daerah masih perlu ditingkatkan agar lebih akurat dan tepat waktu.

- **Pemanfaatan Hasil Evaluasi Kinerja yang Belum Optimal**

Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan.

- **Pemahaman Perangkat Daerah terhadap Implementasi SAKIP yang Belum Merata**

Tingkat pemahaman dan implementasi SAKIP pada masing-masing perangkat daerah masih bervariasi.

4. Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan nilai AKIP pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kota Pekanbaru akan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan memastikan keselarasan antara tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja.
- Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mengoptimalkan proses pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara lebih sistematis dan terintegrasi.
- Meningkatkan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
- Mendorong peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan kinerja melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Pekanbaru dapat terus ditingkatkan sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, Nilai AKIP Kota Pekanbaru Tahun 2025 memperoleh predikat “B” dengan rincian nilai pada masing-masing komponen sebagai berikut:

Tabel 3.10 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kota Pekanbaru 2025

Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2024	Nilai 2025
Perencanaan Kinerja	30	22,78	23,07
Pengukuran Kinerja	30	18,97	19,27
Pelaporan Kinerja	15	10,93	11,07
Evaluasi Internal	25	14,48	14,83
Total Nilai AKIP	100	67,19	68,24

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru telah berjalan dengan kategori baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat kualitas implementasi SAKIP secara berkelanjutan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
12.	Pengentasan Kemiskinan	Penduduk Miskin	Persentase	3,1	3,19	97,18 %

Analisis Capaian Indikator Persentase Penduduk Miskin Kota Pekanbaru Tahun 2025

1. Capaian Kinerja

Persentase penduduk miskin merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dengan melihat proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Indikator ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan target persentase penduduk miskin sebesar 3,10%, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 3,19%. Dengan demikian capaian indikator ini sekitar 97,18% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru relatif masih terkendali, namun belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Selisih capaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga memerlukan perhatian dan intervensi program yang lebih optimal.

2. Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung upaya penurunan tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru antara lain:

- Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial

Pemerintah Kota Pekanbaru melaksanakan berbagai program perlindungan sosial yang bertujuan membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar.

- Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat

Berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi masyarakat turut memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Perkembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pertumbuhan UMKM di berbagai sektor usaha memberikan peluang peningkatan pendapatan bagi masyarakat.

- Peningkatan Akses terhadap Layanan Dasar

Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial turut mendukung upaya pengurangan kemiskinan.

5. Permasalahan

Belum tercapainya target penurunan tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Dinamika Kondisi Ekonomi

Perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat dapat berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

- Keterbatasan Kesempatan Kerja

Ketersediaan lapangan kerja yang belum sepenuhnya mampu menyerap seluruh angkatan kerja berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat.

- Kerentanan Kelompok Masyarakat Tertentu

Masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan, seperti pekerja sektor informal dan masyarakat berpenghasilan rendah.

- Keterbatasan Akses terhadap Sumber Daya Ekonomi

Sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam mengakses modal usaha, pelatihan keterampilan, serta peluang ekonomi lainnya.

4. Tindak Lanjut

Dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kota Pekanbaru akan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pelaksanaan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu.
- Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui penguatan UMKM dan ekonomi kerakyatan.
- Mendorong penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan sektor ekonomi produktif.
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial

dasar.

- Memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru dapat terus menurun sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
13.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	4,5	5,24	85,88 %

Sumber : diolah dari data BPS Kab. Pekanbaru

Analisis Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pekanbaru Tahun 2025

1. Capaian Kinerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase jumlah angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan dibandingkan dengan total angkatan kerja. Indikator ini menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja serta kemampuan perekonomian daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan target Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,5%, sedangkan realisasi yang dicapai adalah sebesar 5,24%. Dengan demikian capaian indikator ini sekitar 86,0% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekanbaru belum mencapai target yang direncanakan, yang berarti jumlah pencari kerja yang belum terserap di pasar tenaga kerja masih relatif tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja masih perlu ditingkatkan agar mampu menyerap pertumbuhan jumlah angkatan kerja.

2. Faktor Pendukung

Meskipun tingkat pengangguran masih di atas target, beberapa faktor tetap mendukung upaya penurunan tingkat pengangguran di Kota Pekanbaru, antara lain:

- Perkembangan Sektor Perdagangan dan Jasa

Aktivitas ekonomi di sektor perdagangan dan jasa sebagai sektor dominan di Kota Pekanbaru memberikan peluang kerja bagi masyarakat.

- Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Pertumbuhan UMKM di berbagai bidang usaha turut membuka peluang kerja serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
- Program Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Pemerintah daerah melalui berbagai program pelatihan kerja berupaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar lebih siap memasuki dunia kerja.
- Dukungan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga turut membantu menciptakan peluang usaha mandiri bagi masyarakat.

3. Permasalahan

Belum tercapainya target tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Pertumbuhan Angkatan Kerja yang Lebih Cepat
- Pertambahan jumlah angkatan kerja setiap tahun belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai.
- Kesesuaian Kompetensi Tenaga Kerja dengan Kebutuhan Dunia Usaha
- Masih terdapat kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha sehingga sebagian tenaga kerja sulit terserap di pasar kerja.
- Terbatasnya Investasi yang Menciptakan Lapangan Kerja Baru
- Investasi yang belum berkembang secara optimal dapat mempengaruhi penciptaan lapangan kerja baru.
- Dominasi Sektor Informal
- Sebagian masyarakat masih bekerja pada sektor informal yang memiliki tingkat produktivitas dan kepastian pendapatan yang relatif rendah.

4. Tindak Lanjut

Dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kota Pekanbaru akan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan

kebutuhan pasar kerja.

- Mendorong peningkatan investasi daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja baru.
- Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan.
- Memperkuat pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah yang memiliki potensi penyerapan tenaga kerja tinggi.
- Meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam pengembangan tenaga kerja yang kompeten.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekanbaru dapat menurun sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
14.	Penurunan Stunting	Prevalensi Stunting	Persentase	8,2	1,85	443,24

Analisis Capaian Indikator Prevalensi Stunting Kota Pekanbaru Tahun 2025

1. Capaian Kinerja

Prevalensi stunting merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase balita yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang lama. Indikator ini menjadi salah satu fokus utama pembangunan kesehatan karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan target prevalensi stunting sebesar 8,20%, sedangkan realisasi yang dicapai adalah sebesar 1,85%. Dengan demikian capaian indikator ini mencapai sekitar 443,24% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya percepatan penurunan stunting di Kota Pekanbaru sangat berhasil, bahkan jauh melampaui target yang telah direncanakan. Kondisi ini mencerminkan efektivitas berbagai program intervensi gizi dan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan berbagai pemangku kepentingan.

2. Faktor Keberhasilan

Keberhasilan penurunan prevalensi stunting di Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- **Penguatan Program Percepatan Penurunan Stunting**
Pemerintah Kota Pekanbaru secara aktif melaksanakan berbagai program percepatan penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif yang dilakukan secara terpadu.
- **Peningkatan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak**
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita melalui fasilitas kesehatan dan posyandu turut berkontribusi dalam pencegahan stunting.
- **Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Gizi dan Kesehatan**
Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang serta pola hidup sehat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah stunting.
- **Sinergi Program Lintas Sektor**
Pelaksanaan program penanganan stunting melibatkan berbagai perangkat daerah sehingga intervensi yang dilakukan menjadi lebih terintegrasi dan efektif.
- **Peningkatan Akses terhadap Sanitasi dan Air Bersih**
Perbaikan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak serta air bersih turut mendukung upaya pencegahan stunting.

3. Permasalahan

Meskipun capaian indikator ini sangat baik, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian agar keberhasilan tersebut dapat dipertahankan, antara lain:

- Potensi terjadinya kasus stunting baru apabila upaya pencegahan tidak dilakukan secara berkelanjutan.
- Masih perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pola asuh anak dan pemenuhan gizi yang optimal.
- Perlunya penguatan sistem pemantauan dan pendataan kasus stunting secara berkelanjutan.

4. Tindak Lanjut

Dalam rangka mempertahankan keberhasilan penurunan prevalensi stunting di Kota Pekanbaru, pemerintah daerah akan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- Melanjutkan program percepatan penurunan stunting secara terintegrasi dan berkelanjutan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui fasilitas kesehatan dan posyandu.
- Mengoptimalkan program edukasi masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang dan pola hidup sehat.
- Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program pencegahan stunting.
- Meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi gizi masyarakat secara berkala.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan prevalensi stunting di Kota Pekanbaru dapat tetap terjaga pada tingkat yang rendah sehingga mampu mendukung terwujudnya generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing..

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
15.	Tingkat Inflasi	Inflasi	Persentase	2,20	4,83	45,55 %

Analisis Capaian Indikator Tingkat Inflasi Kota Pekanbaru Tahun 2025

1. Capaian Kinerja

Tingkat inflasi merupakan indikator yang menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu. Inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah karena berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan kestabilan harga komoditas.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan target tingkat inflasi sebesar 2,20%, sedangkan realisasi yang dicapai adalah sebesar 4,83%. Dengan demikian capaian indikator ini sekitar 45,55% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Kota Pekanbaru belum sesuai dengan target yang direncanakan. Realisasi inflasi yang lebih tinggi dari target menunjukkan adanya tekanan kenaikan harga pada beberapa komoditas, terutama komoditas kebutuhan pokok masyarakat yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi daerah.

2. Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung upaya pengendalian inflasi di Kota Pekanbaru antara lain:

- **Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)**
Pemerintah Kota Pekanbaru melalui TPID secara aktif melakukan koordinasi dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.
- **Pelaksanaan Operasi Pasar dan Stabilitas Harga**
Pelaksanaan operasi pasar serta berbagai program stabilisasi harga turut membantu mengendalikan kenaikan harga pada beberapa komoditas tertentu.
- **Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat**
Sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga komoditas strategis turut mendukung pengendalian inflasi.

3. Permasalahan

Belum tercapainya target inflasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- **Fluktuasi Harga Komoditas Pangan**
Kenaikan harga beberapa komoditas pangan seperti beras, cabai, dan bahan pangan lainnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan inflasi daerah.
- **Gangguan Distribusi dan Pasokan Barang**
Kendala dalam distribusi dan pasokan barang dapat mempengaruhi ketersediaan barang di pasar sehingga berdampak pada kenaikan harga.
- **Pengaruh Kondisi Ekonomi Nasional dan Global**
Dinamika ekonomi nasional maupun global juga dapat mempengaruhi stabilitas harga di daerah.
- **Meningkatnya Permintaan pada Periode Tertentu**

Peningkatan permintaan masyarakat pada waktu-waktu tertentu seperti hari besar keagamaan dapat menyebabkan kenaikan harga komoditas.

4. Tindak Lanjut

Dalam rangka mengendalikan tingkat inflasi pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kota Pekanbaru akan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- Memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam memantau perkembangan harga dan ketersediaan komoditas strategis.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas pasokan dan distribusi barang.
- Mengoptimalkan pelaksanaan operasi pasar serta program stabilisasi harga komoditas kebutuhan pokok.
- Mendorong peningkatan produksi dan ketersediaan komoditas pangan melalui kerja sama dengan daerah penghasil.
- Meningkatkan sistem pemantauan harga secara berkala guna mengantisipasi potensi kenaikan harga di pasar.

Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan tingkat inflasi di Kota Pekanbaru pada tahun-tahun mendatang dapat lebih terkendali sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mempertahankan daya beli masyarakat.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
16.	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan	Gini Rasio	Nilai	0,375	0,37	101,35

Analisis Capaian Indikator Gini Rasio Kota Pekanbaru Tahun 2025

1. Capaian Kinerja

Gini Rasio merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Nilai Gini Rasio berada pada rentang 0 sampai dengan 1, di mana semakin mendekati 0 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin rendah, sedangkan semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang

semakin tinggi.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan target Gini Rasio sebesar 0,375, sedangkan realisasi yang dicapai adalah sebesar 0,37. Dengan demikian capaian indikator ini mencapai sekitar 101,35% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Kota Pekanbaru berada pada kondisi yang relatif terkendali dan bahkan sedikit lebih baik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan daerah mulai memberikan dampak terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat.

2. Faktor Keberhasilan

Keberhasilan dalam menjaga tingkat ketimpangan pendapatan agar tetap terkendali dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, turut membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Perkembangan UMKM memberikan kesempatan usaha bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan serta mengurangi kesenjangan ekonomi.
- Pelaksanaan program perlindungan sosial, dan program bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu membantu mengurangi kesenjangan kesejahteraan.
- Peningkatan Akses terhadap Pendidikan dan Keterampilan Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan turut membantu masyarakat dalam memperoleh peluang ekonomi yang lebih baik.
- Pertumbuhan Aktivitas Ekonomi Daerah di sektor perdagangan dan jasa di Kota Pekanbaru turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

3. Permasalahan

Meskipun capaian indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

- Masih adanya kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah.
- Keterbatasan akses sebagian masyarakat terhadap peluang usaha dan sumber daya

ekonomi.

- Dominasi sektor informal yang memiliki tingkat pendapatan yang relatif tidak stabil.

4. Tindak Lanjut

Dalam rangka menjaga dan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Pekanbaru, pemerintah daerah akan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
- Mendorong pengembangan UMKM serta meningkatkan akses masyarakat terhadap permodalan dan pasar.
- Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.
- Memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Pekanbaru dapat terus ditekan sehingga tercipta pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian *output* tersebut menggunakan *input* seminimal mungkin. Dalam melaksanakan Program Dukungan Manajemen, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Pemerintah Kota Pekanbaru.



Tabel 3.11 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis / Program		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Kinerja	Capaian Penggunaan Anggaran	Efisiensi
1.	Mewujudkan Struktur Transformasi Pembangunan yang Berdaya Saing					81,46	- 81,46
	1.1	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi	301.439.854	291.128.232			
	1.2	Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.297.616.370	1.826.189.680			
	Total		2.599.056.224	2.117.317.912			
2.	Meningkatkan Kualitas SDM				84,91	58,39	26,52
	2.1	Pengelolaan Pendidikan	260.312.941.770	85.565.022.026			
	2.2	Pendidik danTenaga Pendidikan	22.256.625.464	19.224.382.088			
	2.3	Pembinaan Perpustakaan	1.266.811.606	1.214.162.329			
	2.4	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	146.699.548.027	142.690.393.850			
	2.5	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman.	437.250.378	380.495.125			
	2.6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.252.723.592	960.923.375			
	2.7	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	214.510.000	101.940.000			
	2.8	Perlindungan Dan Jaminan Sosial.	4.027.595.727	3.926.689.970			
	2.9	Rehabilitasi Sosial.	1.757.358.270	1.656.970.650			
	2.10	Pemberdayaan Sosial.	509.965.460	459.658.100			
	Total		438.735.330.294	256.180.637.513			
3.	Mengarustamaan Budaya Melayu untuk Ketahanan sosial budaya masyarakat					91,48	- 91,48
	3.1	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.	378.263.932	346.046.412			
	Total		378.263.932	346.046.412			



No	Sasaran Strategis / Program		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Kinerja	Capaian Penggunaan Anggaran	Efisiensi
4.	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat				81,92	-	81,92
	4.1	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.118.122.412	1.711.924.248			
	4.2	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	6.804.372.258	5.162.185.594			
	4.3	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	407.434.976	300.000.000			
	4.4	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.182.536.360	3.075.493.800			
	Total		12.512.466.006	10.249.603.642			
5.	Meningkatnya Pemajuan Budaya Melayu				88,75	-	88,75
	5.1	Pengembangan Kebudayaan	2.964.193.358	2.630.595.162			
	5.2	Pengembangan Kesenian Tradisional	-	-			
	Total		2.964.193.358	2.630.595.162			
6.	Penyediaan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Peningkatan Konektivitas				90,98	-	90,98
	6.1	Penyelenggaraan Jalan	191.909.653.875	181.935.567.415			
	6.2	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	31.970.341.247	30.178.544.428			
	6.3	Kawasan Permukiman	5.798.604.639	5.317.815.197			
	6.4	Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	614.228.630	176.680.550			
	6.5	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	160.938.048.827	138.321.250.642			
	Total		391.230.877.218	355.929.858.232			
7.	Mewujudkan Perekonomian Inklusif				104,20	97,33	6,87
	7.1	Pengembangan UMKM	1.586.105.376	1.564.242.986			
	7.2	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.048.739.454	1.004.615.400			
	7.3	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.863.530.384	3.744.443.664			
	7.4	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.470.045.480	1.446.188.860			
	7.5	Pelayanan Penanaman Modal	171.249.370	170.805.500			
	7.6	Promosi Penanaman Modal	177.300.000	165.000.000			
	Total		8.316.970.064	8.095.296.410			



No	Sasaran Strategis / Program		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Kinerja	Capaian Penggunaan Anggaran	Efisiensi
							%
8.	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim					96,69	- 96,69
	8.1	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.697.850.826	10.533.642.071			
	8.2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	18.369.296.567	17.571.491.035			
	Total		29.067.147.393	28.105.133.106			
9.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik					85,50	- 85,50
	9.1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.613.092.418	2.034.066.410			
	9.2	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi	11.957.504.898	11.278.641.896			
	Total		15.570.597.316	13.312.708.306			
10.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					85,89	- 85,89
	10.1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
	10.2	Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.570.166.720	3.111.081.760			
	10.3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	122.683.975	60.773.200			
	Total		3.692.850.695	3.171.854.960			
11.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				68,24	70,80	- 2,56
	11.1	Rogram Penyelenggaraan Pengawasan	2.051.459.000	1.927.859.000			
	11.2	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1.324.951.140	462.670.620			
	Total		3.376.410.140	2.390.529.620			
12.	Pengentasan Kemiskinan				79,75	78,16	1,59
	12.1	Pemberdayaan Sosial	509.965.460	459.658.100			
	12.2	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	-			
	12.3	Rehabilitasi Sosial	1.757.358.270	1.656.970.650			
	12.4	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	4.027.595.727	3.926.689.970			
	12.5	Penanganan Bencana	4.585.681.687	2.461.475.000			
	Total		10.880.601.144	8.504.793.720			
13.	Menurunnya Tingkat Pengangguran				5,24	99,13	-
	13.1	Pelatihan Kerja dan Produktivitas	322.965.000	322.965.000			
	13.2	Penempatan Tenaga Kerja	427.798.546	421.270.500			
	13.3	Perselisihan Hubungan Industrial					
	Total		750.763.546	744.235.500			
14.	Penurunan Stunting					97,06	- 97,06
	14.1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	146.701.771.327	142.690.393.850			
	14.2	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	214.510.000	207.890.000			
	14.3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	437.250.378	380.495.125			



No	Sasaran Strategis / Program		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Kinerja	Capaian Penggunaan Anggaran	Efisiensi
							%
	14.4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.252.723.592	960.923.375			
	Total		148.606.255.297	144.239.702.350			
15	Tingkat Inflasi						
	15.1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.301.756.930	1.219.875.138	4,83	94,78	-
	15.2	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	301.439.854	291.128.232			
	15.3	Penanganan Kerawanan Pangan	571.704.743	555.765.589			
	15.4	Pengawasan Keamanan Pangan	357.432.530	333.403.300			
	Total		2.532.334.057	2.400.172.259			
16.	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan						
	16.1	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	322.965.000	322.965.000	0,37	84,00	-
	16.2	Penempatan Tenaga Kerja	427.798.546	421.270.500			
	16.3	Hubungan Industrial	2.599.834.820	2.070.159.200			
	Total		3.350.598.366	2.814.394.700			

Efisiensi penggunaan anggaran menggambarkan tingkat optimalisasi pemanfaatan sumber daya keuangan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Efisiensi dihitung dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan tingkat penggunaan anggaran pada masing-masing sasaran strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik. Hal ini terlihat dari sebagian besar sasaran strategis yang mampu mencapai target kinerja dengan tingkat penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah dibandingkan pagu yang tersedia.

Pada Sasaran Strategis Mewujudkan Struktur Transformasi Pembangunan yang Berdaya Saing, capaian kinerja tercatat sebesar 81,46 persen dengan tingkat penggunaan anggaran yang relatif sejalan, sehingga menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif dan efisien dalam mendukung transformasi pembangunan daerah.

Selanjutnya pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas SDM, capaian kinerja mencapai 84,91 persen dengan penggunaan anggaran sebesar 58,39 persen, sehingga

menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 26,52 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa program peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilaksanakan secara optimal dengan pemanfaatan anggaran yang relatif hemat.

Pada Sasaran Strategis Mengarusutamakan Budaya Melayu untuk Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat, capaian kinerja tercatat sebesar 91,48 persen dengan tingkat penggunaan anggaran yang sebanding, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Sasaran Strategis Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat menunjukkan capaian kinerja sebesar 81,92 persen, yang mencerminkan bahwa berbagai kegiatan penguatan nilai kebangsaan, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta peningkatan kewaspadaan sosial telah memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu, capaian kinerja mencapai 88,75 persen dengan penggunaan anggaran yang sebanding dengan capaian kinerja, yang menunjukkan pengelolaan program kebudayaan berjalan cukup efektif.

Selanjutnya pada Sasaran Strategis Penyediaan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Peningkatan Konektivitas, capaian kinerja tercatat sebesar 90,98 persen, yang menunjukkan bahwa pembangunan dan peningkatan infrastruktur perkotaan dapat dilaksanakan dengan tingkat efisiensi yang baik.

Pada Sasaran Strategis Mewujudkan Perekonomian Inklusif, capaian kinerja bahkan mencapai 104,20 persen, dengan tingkat penggunaan anggaran sebesar 97,33 persen, sehingga menunjukkan adanya efisiensi sebesar 6,87 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program pembangunan ekonomi mampu memberikan hasil yang melampaui target dengan penggunaan anggaran yang tetap terkendali.

Selanjutnya pada Sasaran Strategis Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi terhadap Bencana, capaian kinerja mencapai 96,69 persen, yang menunjukkan bahwa berbagai program pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana telah dilaksanakan secara efektif.

Pada Sasaran Strategis Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, capaian kinerja tercatat sebesar 85,50 persen, yang menunjukkan bahwa reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah telah berjalan cukup baik.

Sementara itu pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, capaian

kinerja mencapai 85,89 persen, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat melalui penguatan sistem pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi.

Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, capaian kinerja tercatat sebesar 68,24 persen dengan tingkat penggunaan anggaran 70,80 persen, sehingga menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam optimalisasi pemanfaatan anggaran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan.

Pada Sasaran Strategis Pengentasan Kemiskinan, capaian kinerja mencapai 79,75 persen dengan penggunaan anggaran 78,16 persen, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program perlisndungan sosial dan pemberdayaan masyarakat telah berjalan cukup efektif.

Secara keseluruhan, hasil pengukuran efisiensi menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran strategis mampu dicapai dengan tingkat penggunaan anggaran yang terkendali, bahkan pada beberapa sasaran strategis terdapat efisiensi anggaran yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pembangunan di lingkungan pemerintah daerah telah dilaksanakan secara relatif efektif, efisien, dan berorientasi pada pencapaian kinerja.

Kedepan, pemerintah daerah akan terus meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program agar penggunaan anggaran dapat semakin optimal dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pernyataan kinerja.

Seluruh sasaran kinerja yang dijadikan indikator kinerja utama di bagi menjadi beberapa program kegiatan agar pencapaian indikator kinerja utama lebih maksimal. Secara lengkap program kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12 Program Kegiatan Tahun 2025

No	Sasaran	Program Kegiatan	Ket
1.	Mewujudkan Struktur Transformasi Pembangunan yang Berdaya Saing	1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia	



No	Sasaran	Program Kegiatan	Ket
4.	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat	1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 3. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
5.	Meningkatnya Pemajuan Budaya Melayu	1. Pengembangan Kebudayaan. 2. Pengembangan Kesenian Tradisional.	
6.	Penyediaan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Peningkatan Konektivitas	1. Penyelenggaraan Jalan	
		2. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 3. Kawasan Permukiman 4. Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 5. Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	
7.	Mewujudkan Perekonomian Inklusif	1. Pengembangan UMKM 2. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	
		4. Perlindungan Dan Jaminan Sosial 5. Penanganan Bencana	
13.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	1. Pelatihan Kerja dan Produktivitas 2. Penempatan Tenaga Kerja 3. Perselisihan Hubungan Industrial	
14	Penurunan Stunting	1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 4. Peningkatan Kapasitas Sumber DAYA MANUSIA KESEHATAN	

No	Sasaran	Program Kegiatan	Ket
15	Tingkat Inflasi	1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 3. Penanganan Kerawanan Pangan 4. Pengawasan Keamanan Pangan	
16	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan	1. Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Penempatan Tenaga Kerja 3. Hubungan Industrial	

3.2 REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Realisasi anggaran berhubungan dengan efisiensi. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah ± rendahnya (*spending well*).

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan.

Analisa efisiensi didasarkan pada capaian kinerja dan besaran sisa anggaran yang tidak diserap pada masing-masing sasaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai dengan target yang direncanakan.

Uraian realisasi Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja terdapat pada Tabel Berikut :



Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN			
SEKRETARIAT DAERAH	32.769.784.673	26.979.303.267	82,33
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	29.585.835.599	24.287.216.373	82,09
<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>	<i>1.727.882.370</i>	<i>1.640.940.676</i>	<i>94,97</i>
Penataan Administrasi Pemerintahan	581.287.710	552.994.887	95,13
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	368.381.670	363.985.140	98,81
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	521.499.300	500.858.960	96,04
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	174.271.070	153.104.427	87,85
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	82.442.620	69.997.262	84,90
<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>24.653.307.665</i>	<i>20.120.629.535</i>	<i>81,61</i>
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.011.687.350	1.688.845.610	83,95
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	7.879.214.580	6.221.853.475	78,97
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	14.762.405.735	12.209.930.450	82,71
<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>	<i>2.330.026.787</i>	<i>1.727.931.309</i>	<i>74,16</i>
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	635.946.670	558.923.497	87,89
Fasilitasi Bantuan Hukum	1.225.177.723	778.357.827	63,53
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	468.902.394	390.649.985	83,31
<i>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</i>	<i>874.618.777</i>	<i>797.714.853</i>	<i>1,21</i>
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	657.713.327	625.079.807	95,04
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	127.805.360	105.054.718	82,20
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	89.100.090	67.580.328	75,85
Perekonomian dan Pembangunan	3.183.949.074	2.692.086.894	84,55
<i>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>	<i>775.695.140</i>	<i>422.861.927</i>	<i>54,51</i>
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	414.271.540	180.869.288	43,66



Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	331.901.590	216.278.469	65,16
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	29.522.010	25.714.170	87,10
<i>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>	<i>122.353.440</i>	<i>107.534.440</i>	<i>87,89</i>
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	31.999.580	22.744.580	71,08
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	90.353.860	84.789.860	93,84
<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	<i>2.210.807.310</i>	<i>2.107.998.977</i>	<i>95,35</i>
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.659.450.750	1.574.069.860	94,85
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	368.207.770	352.529.507	95,74
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	183.148.790	181.399.610	99,04
<i>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</i>	<i>75.093.184</i>	<i>53.691.550</i>	<i>71,50</i>
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	26.542.640	7.237.750	27,27
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	38.374.664	36.288.800	94,56
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	10.175.880	10.165.000	99,89
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.871.414.271	1.577.894.520	84,32
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	503.611.790	428.107.550	85,01
<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>51.731.000</i>	<i>47.439.000</i>	<i>91,70</i>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	4.292.000		-
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	47.439.000	47.439.000	100,00
<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>26.760.250</i>	<i>14.440.250</i>	<i>53,96</i>
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	26.760.250	14.440.250	53,96
<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>425.120.540</i>	<i>366.228.300</i>	<i>86,15</i>
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6.520.800	3.040.000	46,62



Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	408.599.780	363.188.300	88,89
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.999.960		-
Perlindungan Perempuan	237.193.556	165.246.596	69,67
<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>59.553.300</i>	<i>28.223.300</i>	<i>47,39</i>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59.553.300	28.223.300	47,39
<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>177.640.256</i>	<i>137.023.296</i>	<i>77,14</i>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	177.640.256	137.023.296	77,14
Peningkatan Kualitas Keluarga	207.579.330	169.841.950	81,82
<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>20.272.950</i>	<i>3.140.000</i>	<i>15,49</i>
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20.272.950	3.140.000	15,49
<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>19.750.550</i>	<i>4.181.720</i>	<i>21,17</i>
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4.381.720	4.181.720	95,44
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.368.830		-
<i>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>167.555.830</i>	<i>162.520.230</i>	<i>96,99</i>
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	166.515.830	161.600.230	97,05
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.040.000	920.000	88,46
Pemenuhan Hak anak (PHA)	371.029.740	392.767.164	105,86



<i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	326.171.374	219.405.278	67,27
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	154.138.650	66.666.000	43,25
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten	172.032.724	152.739.278	88,79
<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	44.858.366	26.277.536	58,58
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	22.163.666	13.755.936	62,07
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.694.700	12.521.600	55,17
Perlindungan Khusus Anak	551.999.855	421.931.260	76,44
<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	142.943.820	127.843.820	89,44
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	69.642.620	69.312.620	99,53
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	73.301.200	58.531.200	79,85
<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	328.745.220	252.727.440	76,88
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	328.745.220	252.727.440	76,88
<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	80.310.815	41.360.000	51,50
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	80.310.815	41.360.000	51,50
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.251.003.125	1.940.086.175	59,68
Pengendalian Penduduk	648.507.000	543.552.650	83,82
<i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>	177.465.000	104.865.000	59,09



Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	57.515.000	1.715.000	2,98
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur			
Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	37.950.000	21.150.000	55,73
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	82.000.000	82.000.000	100,00
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	471.042.000	438.687.650	93,13
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	42.655.000	41.395.000	97,05
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	87.087.000	78.150.000	89,74
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	172.200.000	172.200.000	100,00
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	162.000.000	146.942.650	90,71
Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	7.100.000	-	-
Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.602.496.125	1.396.533.525	53,66
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	443.095.000	218.132.400	49,23
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	128.510.000		-
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	51.774.813	51.774.813	100,00
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	120.000.000	111.976.800	93,31
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	58.424.187	34.944.787	59,81
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	5.200.000	5.200.000	100,00
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	79.186.000	14.236.000	17,98



<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	2.159.401.125	1.178.401.125	54,57
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	981.000.000		-
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.178.401.125	1.178.401.125	100,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.775.458.500	2.370.185.297	85,40
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.775.458.500	2.370.185.297	85,40
<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	2.471.619.500	2.122.585.297	85,88
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1.147.612.000	1.100.420.482	95,89
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.324.007.500	1.022.164.815	77,20
<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>	303.839.000	247.600.000	81,49
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	303.839.000	247.600.000	81,49
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.118.122.412	1.711.924.248	80,82
Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.118.122.412	1.711.924.248	80,82
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	2.118.122.412	1.711.924.248	80,82
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, embauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	207.055.290	82.700.000	39,94
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	23.612.000	23.191.900	98,22
Pembentukan Paskibraka	1.887.455.122	1.606.032.348	85,09
DINAS KESEHATAN	148.604.031.997	144.133.752.350	96,99
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	146.699.548.027	142.690.393.850	97,27
<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	23.204.323.921	21.422.059.257	92,32



Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	6.225.754.860	6.117.640.357	98,26
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis			
Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	14.894.717.891	13.300.891.000	89,30
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	2.083.851.170	2.003.527.900	96,15
<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>123.354.703.986</i>	<i>121.140.123.513</i>	<i>98,20</i>
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	199.940.000	169.352.256	84,70
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.500.000		-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4.446.600		-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	12.600.000	12.600.000	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.223.300		-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	71.473.300	69.055.000	96,62
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.223.300		-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	91.006.318	49.600.000	54,50
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	419.500.000	250.000.000	59,59
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	8.486.316	3.120.000	36,77
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.006.998.599	944.853.500	93,83
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	64.793.717		-
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	952.966.894	598.771.180	62,83
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	22.494.000	22.494.000	100,00
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	127.204.800	62.640.250	49,24
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.363.128.050	1.218.805.800	89,41
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	114.664.945.000	114.539.291.650	99,89
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	2.223.300		-
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	494.361.948	41.600.000	8,41
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	38.990.000		-



Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.045.561.746	864.027.064	82,64
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	82.852.048	66.560.200	80,34
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	2.392.710.660	2.009.223.013	83,97
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	170.792.324	160.132.500	93,76
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	102.281.766	57.997.100	56,70
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	140.520.120	128.211.080	91,24
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	140.520.120	128.211.080	91,24
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.252.723.592	960.923.375	76,71
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	390.775.072	364.130.875	93,18
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	390.775.072	364.130.875	93,18
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	861.948.520	596.792.500	69,24
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	861.948.520	596.792.500	69,24
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	437.250.378	380.495.125	87,02
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.076.980	50.480.000	80,03
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.076.980	50.480.000	80,03
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	374.173.398	330.015.125	88,20
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	374.173.398	330.015.125	88,20
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	214.510.000	101.940.000	47,52
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105.950.000	-	-
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	105.950.000	-	-



<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	108.560.000	101.940.000	93,90
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	108.560.000	101.940.000	93,90
DINAS PENDIDIKAN	282.569.567.234	104.789.404.114	37,08
Pengelolaan Pendidikan	282.569.567.234	104.789.404.114	37,08
<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</i>	140.836.350.695	39.531.778.181	28,07
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	488.672.000	466.297.403	95,42
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	174.185.000	174.185.000	100,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.972.249.600	6.954.466.471	99,74
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	476.060.000	474.050.353	99,58
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	227.992.240	227.068.448	99,59
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	207.852.400	206.651.697	99,42
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	456.984.480	454.175.718	99,39
Pengadaan Mebel Sekolah	5.549.512.310	5.528.669.892	99,62
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	55.302.000	55.302.000	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	101.052.500.304		-
Pemeliharaan Mebel Sekolah	200.000.000	198.967.500	99,48
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.039.863.200	1.029.502.800	99,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.030.178.048	2.955.989.741	97,55
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.316.604.440	4.298.135.108	99,57
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	139.673.500	139.673.500	100,00
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	238.179.000	224.408.469	94,22
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	12.795.227.173	12.740.225.898	99,57
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3.415.315.000	3.404.008.185	99,67
<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	97.909.212.057	42.898.086.111	43,81
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.146.540.400	4.136.718.930	99,76



Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.931.220.680	3.719.255.529	94,61
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	479.815.960	472.908.718	98,56
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	471.984.480	468.745.286	99,31
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.815.134.000	2.724.551.720	96,78
Pengadaan Mebel Sekolah	3.323.240.580	3.153.593.470	94,90
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	354.875.800	262.863.840	74,07
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	78.040.000	8.040.000	10,30
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	30.003.700	29.189.000	97,28
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	53.063.697.000	583.500.000	1,10
Pemeliharaan Mebel Sekolah	200.000.000	198.967.500	99,48
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	9.373.170.605	8.029.959.680	85,67
Pembangunan Ruang Kelas Baru	14.207.013.724	13.878.581.874	97,69
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	942.306.648	939.435.200	99,70
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.058.116.400	1.045.986.300	98,85
Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	1.799.165.600	1.620.522.577	90,07
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	471.984.480	470.058.887	99,59
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.162.902.000	1.155.207.600	99,34
<i>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i>	<i>12.386.751.428</i>	<i>2.674.627.408</i>	<i>21,59</i>
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	535.636.600	531.427.537	99,21
Pengadaan Mebel PAUD	528.823.860	528.652.500	99,97
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	401.179.600	252.117.080	62,84
Pengelolaan Dana BOP PAUD	9.338.400.000		
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	25.450.000		-
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	10.933.540	3.518.540	32,18
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	279.139.590	100.764.580	36,10



Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	400.015.000	395.578.470	98,89
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	342.574.998	339.819.840	99,20
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	70.326.000	70.326.000	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	454.272.240	452.422.861	99,59
<i>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	9.180.627.590	460.530.326	5,02
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	8.669.112.900		-
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	44.720.000		-
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	299.684.320	296.092.056	98,80
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	167.110.370	164.438.270	98,40
<i>Pendidikan Tenaga Pendidikan</i>	22.256.625.464	19.224.382.088	86,38
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	329.728.000	236.545.928	71,74
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	21.926.897.464	18.987.836.160	86,60
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.337.246.578	1.280.228.139	95,74
Pembinaan Perpustakaan	1.266.811.606	1.214.162.329	95,84
<i>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.010.777.712	958.128.435	94,79
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	233.699.592	220.043.106	94,16
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.100.000	19.749.000	93,60
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	704.021.472	668.992.681	95,02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	100,00
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	46.956.648	44.343.648	94,44
<i>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	256.033.894	256.033.894	100,00
Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	145.947.477	145.947.477	100,00
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	10.879.056	10.879.056	100,00
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	99.207.361	99.207.361	100,00



Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	70.434.972	66.065.810	93,80
<i>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>70.434.972</i>	<i>66.065.810</i>	<i>93,80</i>
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalih mediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	70.434.972	66.065.810	93,80
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.362.783.195	1.313.101.168	96,35
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.362.783.195	1.313.101.168	96,35
<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</i>	<i>770.303.195</i>	<i>721.474.818</i>	<i>93,66</i>
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	50.635.000	50.635.000	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	719.668.195	670.839.818	93,22
<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>592.480.000</i>	<i>591.626.350</i>	<i>99,86</i>
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	592.480.000	591.626.350	99,86
DINAS SOSIAL	2.267.323.730	2.116.628.750	93,35
Pemberdayaan Sosial	509.965.460	459.658.100	90,14
<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>509.965.460</i>	<i>459.658.100</i>	<i>90,14</i>
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	41.126.400	41.126.400	100,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	160.836.500	141.248.500	87,82
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	107.423.000	91.833.200	85,49
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200.579.560	185.450.000	92,46
Rehabilitasi Sosial	1.757.358.270	1.656.970.650	94,29
<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	<i>1.757.358.270</i>	<i>1.656.970.650</i>	<i>94,29</i>
Penyediaan Permakanan	149.749.000	120.362.700	80,38



Penyediaan Sandang	93.057.264	92.609.000	99,52
Penyediaan Alat Bantu	835.678.670	826.250.450	98,87
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	14.052.000		-
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	256.814.374	229.757.000	89,46
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	126.344.490	122.630.600	97,06
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	16.290.000	15.404.600	94,56
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	245.042.472	229.626.300	93,71
Pemberian Layanan Kedaruratan	20.330.000	20.330.000	100,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.102.126.968	3.497.788.460	68,56
Kepegawaian Daerah	2.804.510.598	1.671.598.780	59,60
<i>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</i>	<i>556.516.200</i>	<i>414.394.000</i>	<i>74,46</i>
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	523.378.180	384.195.000	73,41
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	33.138.020	30.199.000	91,13
<i>Mutasi dan Promosi ASN</i>	<i>2.009.907.988</i>	<i>1.035.942.220</i>	<i>51,54</i>
Pengelolaan Mutasi ASN	89.342.710	89.342.710	100,00
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	22.775.000	22.775.000	100,00
Pengelolaan Promosi ASN	1.897.790.278	923.824.510	48,68
<i>Pengembangan Kompetensi ASN</i>	<i>13.466.800</i>	<i>10.522.950</i>	<i>78,14</i>
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	3.252.850	3.252.850	100,00
Pengelolaan Assessment Center	10.213.950	7.270.100	71,18
<i>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	<i>224.619.610</i>	<i>210.739.610</i>	<i>93,82</i>
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	1.491.840	1.491.840	100,00
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	2.368.270	2.368.270	100,00
Pembinaan Disiplin ASN	210.222.850	196.342.850	93,40
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	8.696.650	8.696.650	100,00



Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1.840.000	1.840.000	100,00
Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.297.616.370	1.826.189.680	79,48
<i>Pengembangan Kompetensi Teknis</i>	<i>474.600.980</i>	<i>58.534.490</i>	<i>12,33</i>
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	474.600.980	58.534.490	12,33
<i>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>	<i>1.823.015.390</i>	<i>1.767.655.190</i>	<i>96,96</i>
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	349.839.750	324.908.550	92,87
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.473.175.640	1.442.746.640	97,93
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	641.539.646	590.863.356	92,10
Pendaftaran Penduduk	461.084.346	421.500.246	91,41
<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>166.442.808</i>	<i>143.942.808</i>	<i>86,48</i>
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	41.033.464	41.033.464	100,00
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	102.206.900	79.706.900	77,99
Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	23.202.444	23.202.444	100,00
<i>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>294.641.538</i>	<i>277.557.438</i>	<i>94,20</i>
Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	215.165.420	199.711.300	92,82
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	17.502.888	16.702.888	95,43
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	61.973.230	61.143.250	98,66
Pencatatan Sipil	180.455.300	169.363.110	93,85
<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	<i>59.665.040</i>	<i>50.000.000</i>	<i>83,80</i>
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipi	59.665.040	50.000.000	83,80
<i>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>	<i>120.790.260</i>	<i>119.363.110</i>	<i>98,82</i>
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	51.972.110	51.972.110	100,00



Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	68.818.150	67.391.000	97,93
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	21.253.428.111	20.243.635.823	95,25
Pelayanan Penanaman Modal	171.249.370	170.805.500	99,74
<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>171.249.370</i>	<i>170.805.500</i>	<i>99,74</i>
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	171.249.370	170.805.500	99,74
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.897.500.625	19.900.990.323	95,23
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>20.363.530</i>	<i>18.137.500</i>	<i>89,07</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.143.780	5.713.600	93,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.310.350	6.356.900	86,96
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.909.400	6.067.000	87,81
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.347.735.310	12.064.235.603	97,70
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.341.499.100	12.058.571.203	97,71
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.236.210	5.664.400	90,83
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.494.640	10.589.800	78,47
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.811.000	4.503.400	93,61
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3.998.170	2.678.500	66,99
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.685.470	3.407.900	72,73
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.313.126.676	1.175.410.879	89,51
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	125.560.088	124.823.308	99,41
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	842.104.560	727.654.870	86,41
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	131.189.148	129.292.000	98,55
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	214.272.880	193.640.701	90,37
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.202.780.469	6.632.616.541	92,08
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.978.160	143.300.449	93,07



Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.676.935.647	1.613.940.082	96,24
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.722.500	123.160.000	99,55
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.646.044.112	4.214.243.476	90,71
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	153.367.600	138.145.024	90,07
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	255.482.200	214.237.260	83,86
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	162.856.250	155.646.250	95,57
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.394.000	29.944.000	98,52
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	184.678.116	171.840.000	93,05
<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	<i>7.378.116</i>	<i>6.840.000</i>	<i>92,71</i>
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	7.378.116	6.840.000	92,71
Promosi Penanaman Modal	177.300.000	165.000.000	93,06
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	177.300.000	165.000.000	93,06
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	3.570.166.720	3.111.081.760	87,14
Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.570.166.720	3.111.081.760	87,14
<i>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>3.570.166.720</i>	<i>3.111.081.760</i>	<i>87,14</i>
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	12.523.780	12.400.000	99,01
Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	292.000.000	270.800.000	92,74
Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	1.468.200		-
Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	4.561.980		-
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	837.908.950	790.524.950	94,34
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	339.000.000	303.300.000	89,47
Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	2.082.703.810	1.734.056.810	83,26
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.938.043.558	2.496.737.030	50,56



Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.613.092.418	2.034.066.410	56,30
<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	<i>2.879.575.108</i>	<i>1.731.665.410</i>	<i>60,14</i>
Pelaksanaan Konsultasi Publik	69.201.760	33.290.000	48,11
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	34.509.748	13.198.000	38,24
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	65.062.670	15.033.000	23,11
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	31.988.950	6.594.000	20,61
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2.678.811.980	1.663.550.410	62,10
<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>442.112.030</i>	<i>287.815.000</i>	<i>65,10</i>
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	361.342.980	284.935.000	78,85
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	69.769.050	2.880.000	4,13
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	11.000.000		-
<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>291.405.280</i>	<i>14.586.000</i>	<i>5,01</i>
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	196.837.120	2.419.000	1,23
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	94.568.160	12.167.000	12,87
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.324.951.140	462.670.620	34,92
<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	<i>763.867.420</i>	<i>232.378.550</i>	<i>30,42</i>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	51.439.210	9.161.600	17,81
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	69.301.560	21.421.750	30,91
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	33.529.890	5.810.400	17,33
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	34.711.660	17.874.100	51,49
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	92.941.130	16.267.100	17,50
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16.299.420	7.018.200	43,06



Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	465.644.550	154.825.400	33,25
<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	<i>257.692.270</i>	<i>135.539.550</i>	<i>52,60</i>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	105.166.890	96.274.050	91,54
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	22.091.430	17.157.000	77,66
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3.019.390		-
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42.648.700	3.450.000	8,09
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	51.024.070	15.218.000	29,83
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	33.741.790	3.440.500	10,20
<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	<i>303.391.450</i>	<i>94.752.520</i>	<i>31,23</i>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	144.848.870	68.555.000	47,33
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	107.568.540	19.793.000	18,40
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	47.289.100	4.300.000	9,09
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3.684.940	2.104.520	57,11
INSPEKTORAT	2.051.459.000	1.927.859.000	93,98
Penyelenggaraan Pengawasan	2.051.459.000	1.927.859.000	93,98
<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	<i>2.051.459.000</i>	<i>1.927.859.000</i>	<i>93,98</i>
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	160.896.500	160.896.500	100,00
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	227.190.000	208.990.000	91,99
Reviu Laporan Kinerja	326.850.000	284.950.000	87,18
Reviu Laporan Keuangan	459.672.500	425.172.500	92,49



Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	200.450.000	183.450.000	91,52
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	391.400.000	379.400.000	96,93
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	285.000.000	285.000.000	100,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.041.669.905	6.251.598.440	88,78
Pengelolaan Keuangan Daerah	5.502.845.025	4.853.956.090	88,21
<i>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	<i>3.372.295.545</i>	<i>2.878.102.170</i>	<i>85,35</i>
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	112.194.480	106.685.600	95,09
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	103.663.530	101.103.500	97,53
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	232.027.180	185.427.060	79,92
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	262.502.880	192.060.280	73,17
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.274.056.910	1.068.607.500	83,87
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	896.450.425	864.346.230	96,42
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	491.400.140	359.872.000	73,23
<i>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	<i>1.078.337.050</i>	<i>991.746.600</i>	<i>91,97</i>
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	62.224.710	48.684.060	78,24
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	149.896.770	104.572.700	69,76
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	762.417.920	742.732.240	97,42
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	103.797.650	95.757.600	92,25
<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>	<i>1.052.212.430</i>	<i>984.107.320</i>	<i>93,53</i>



Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	151.942.560	136.937.500	90,12
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	768.769.870	715.669.820	93,09
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	131.500.000	131.500.000	100,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.538.824.880	1.397.642.350	90,83
<i>Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<i>1.538.824.880</i>	<i>1.397.642.350</i>	<i>90,83</i>
Penyusunan Standar Harga	184.973.920	178.941.500	96,74
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	191.700.000	191.700.000	100,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	159.000.070	141.496.250	88,99
Penilaian Barang Milik Daerah	495.283.360	421.816.700	85,17
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	297.718.580	277.700.000	93,28
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	102.563.950	79.272.900	77,29
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	107.585.000	106.715.000	99,19
BADAN PENDAPATAN DAERAH	11.768.917.566	11.044.026.649	93,84
Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.768.917.566	11.044.026.649	93,84
<i>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	<i>11.768.917.566</i>	<i>11.044.026.649</i>	<i>93,84</i>
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	174.783.220	173.210.500	99,10
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	4.688.720		-
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	26.132.240	25.796.000	98,71
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	483.341.680	423.897.690	87,70
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	407.999.624	345.474.182	84,68
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	34.499.400	14.593.200	42,30
enetapan Wajib Pajak Daerah	20.056.240	19.880.000	99,12



Penagihan Pajak Daerah	7.159.451.282	7.155.074.637	99,94
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	3.326.400	3.326.400	100,00
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3.427.720.000	2.867.120.000	83,65
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	16.828.720	8.164.000	48,51
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	10.090.040	7.490.040	74,23
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMABANGAN DAERAH	1.698.609.674	1.594.158.660	93,85
Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.698.609.674	1.594.158.660	93,85
<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	<i>189.164.520</i>	<i>163.910.000</i>	<i>86,65</i>
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	189.164.520	163.910.000	86,65
<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	<i>368.342.050</i>	<i>348.082.230</i>	<i>94,50</i>
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	368.342.050	348.082.230	94,50
<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	<i>612.814.940</i>	<i>608.022.620</i>	<i>99,22</i>
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	612.814.940	608.022.620	99,22
<i>Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan</i>	<i>84.513.310</i>	<i>75.481.000</i>	<i>89,31</i>
Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	84.513.310	75.481.000	89,31
<i>Invensi dan Inovasi</i>	<i>443.774.854</i>	<i>398.662.810</i>	<i>89,83</i>
Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	171.821.680	171.520.750	99,82
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	53.743.666	29.565.900	55,01
Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	218.209.508	197.576.160	90,54
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	528.288.164	474.143.810	89,75
Riset dan Inovasi Daerah	528.288.164	474.143.810	89,75
<i>Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan</i>	<i>84.513.310</i>	<i>75.481.000</i>	<i>89,31</i>
Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	84.513.310	75.481.000	89,31
<i>Invensi dan Inovasi</i>	<i>443.774.854</i>	<i>398.662.810</i>	<i>89,83</i>
Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	171.821.680	171.520.750	99,82



Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	53.743.666	29.565.900	55,01
Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	218.209.508	197.576.160	90,54
DINAS PERTANAHAN	5.891.195.758	4.227.830.869	71,77
Penatagunaan Tanah	5.891.195.758	4.227.830.869	71,77
<i>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>5.891.195.758</i>	<i>4.227.830.869</i>	<i>71,77</i>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	5.891.195.758	4.227.830.869	71,77
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	389.935.011.077	370.429.366.894	95,00
Penyelenggaraan Jalan	191.909.653.875	181.935.567.415	94,80
<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>191.909.653.875</i>	<i>181.935.567.415</i>	<i>94,80</i>
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3.617.836.033	3.195.929.493	88,34
Pembangunan Jalan	31.489.305.252	26.503.549.745	84,17
Rekonstruksi Jalan	20.910.620.700	20.683.880.643	98,92
Pemeliharaan Berkala Jalan	92.496.067.890	91.064.505.914	98,45
Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.000.934.000	1.552.566.000	77,59
Pembangunan Jembatan	957.069.215	954.711.495	99,75
Pelebaran Jalan Menambah Lajur	17.910.663.260	16.517.814.360	92,22
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.429.685.315	1.194.933.315	83,58
Pemeliharaan Rutin Jalan	21.097.472.210	20.267.676.450	96,07
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	12.230.458.278	11.827.939.098	96,71
<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>12.230.458.278</i>	<i>11.827.939.098</i>	<i>96,71</i>
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.370.320.000	1.322.690.000	96,52
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	10.860.138.278	10.505.249.098	96,73
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	17.292.693.026	17.135.395.878	99,09



<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	17.292.693.026	17.135.395.878	99,09
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	5.346.548.400	5.346.548.400	100,00
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	8.540.928.446	8.393.827.078	98,28
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	3.405.216.180	3.395.020.400	99,70
<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</i>	10.697.850.826	10.533.642.071	98,47
<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	10.697.850.826	10.533.642.071	98,47
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	4.832.478.392	4.773.953.392	98,79
7 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	311.149.500	302.300.000	97,16
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.753.407.958	1.730.103.059	98,67
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	3.432.934.976	3.361.945.620	97,93
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	367.880.000	365.340.000	99,31
<i>Penyelenggaraan Penataan Ruang</i>	1.482.886.430	1.328.849.590	89,61
<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i>	1.423.631.960	1.283.524.860	90,16
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	934.116.900	815.944.800	87,35
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	452.201.560	452.001.560	99,96
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Penataan Ruang	37.313.500	15.578.500	41,75
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	59.254.470	45.324.730	76,49
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	59.254.470	45.324.730	76,49
<i>Penataan Bangunan Gedung</i>	137.350.247.135	131.379.048.506	95,65
<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	137.350.247.135	131.379.048.506	95,65
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	102.315.932.873	99.929.417.551	97,67
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.090.217.594	3.346.112.722	54,94
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	27.221.083.668	26.521.305.233	97,43



Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1.723.013.000	1.582.213.000	91,83
Pengelolaan Sumber Daya Air	18.971.221.507	16.288.924.336	85,86
<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>18.971.221.507</i>	<i>16.288.924.336</i>	<i>85,86</i>
Operasi dan Pemeliharaan Sungai	6.581.410.790	5.479.320.000	83,25
Normalisasi/Restorasi Sungai	9.557.626.470	8.024.395.000	83,96
Pembangunan Tanggul Sungai	2.293.420.588	2.248.560.936	98,04
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	538.763.659	536.648.400	99,61
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	168.932.267.581	145.546.617.961	86,16
Kawasan Permukiman	5.798.604.639	5.317.815.197	91,71
<i>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</i>	<i>41.422.020</i>	<i>22.127.268</i>	<i>53,42</i>
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	5.196.300	5.028.000	96,76
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	36.225.720	17.099.268	47,20
<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	<i>126.955.230</i>	<i>125.534.600</i>	<i>98,88</i>
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	7.268.370	6.912.650	95,11
Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	8.896.760	8.430.200	94,76
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	110.790.100	110.191.750	99,46
<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	<i>5.630.227.389</i>	<i>5.170.153.329</i>	<i>91,83</i>
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	4.495.409.669	4.040.670.979	89,88
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	557.344.570	553.965.500	99,39
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	577.473.150	575.516.850	99,66



Pengembangan Perumahan	2.195.614.115	1.907.552.122	86,88
<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	<i>74.407.250</i>	<i>74.406.500</i>	<i>100,00</i>
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	7.513.750	7.513.500	100,00
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	7.361.750	7.361.500	100,00
Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.210.000	2.210.000	100,00
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	57.321.750	57.321.500	100,00
<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	<i>139.179.750</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	139.179.750		-
<i>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>	<i>755.588.115</i>	<i>606.706.622</i>	<i>80,30</i>
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	755.588.115	606.706.622	80,30
<i>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>	<i>1.226.439.000</i>	<i>1.226.439.000</i>	<i>100,00</i>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.226.439.000	1.226.439.000	100,00
Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	160.938.048.827	138.321.250.642	85,95
<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	<i>160.938.048.827</i>	<i>138.321.250.642</i>	<i>85,95</i>
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2.821.490.725	2.819.254.985	99,92
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	108.203.115.096	89.177.511.418	82,42
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1.214.473.040	1.165.032.350	95,93
Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	9.400.000		-
Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.625.407.826	1.614.471.685	99,33
Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	46.506.141.000	43.458.654.504	93,45
Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	3.775.540	3.186.000	84,39
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	554.245.600	83.139.700	15,00
DINAS PERHUBUNGAN	31.970.341.247	30.178.544.428	94,40
Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	31.970.341.247	30.178.544.428	94,40



Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	22.421.162.523	21.861.301.639	97,50
Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	56.320.000	56.320.000	100,00
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	488.281.280	487.279.343	99,79
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.116.196.460	1.026.430.640	91,96
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	17.081.392.035	16.695.349.201	97,74
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.678.972.748	3.595.922.455	97,74
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1.234.502.460	1.215.338.680	98,45
Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	1.234.502.460	1.215.338.680	98,45
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.448.690.554	2.009.039.784	82,05
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	108.597.140	49.950.000	46,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	834.654.464	780.610.424	93,52
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	352.925.000	352.500.000	99,88
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.152.513.950	825.979.360	71,67
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5.733.185.870	4.960.364.485	86,52
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	5.733.185.870	4.960.364.485	86,52
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.000	-	-
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.000	-	-
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	132.499.840	132.499.840	100,00
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	132.499.840	132.499.840	100,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	125.696.935.222	119.138.703.143	94,78
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	407.957.420	343.897.230	84,30
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	407.957.420	343.897.230	84,30



Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	291.850.620	234.439.030	80,33
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	7.846.800	7.846.800	100,00
Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	108.260.000	101.611.400	93,86
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	18.369.296.567	17.571.491.035	95,66
<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>	<i>18.369.296.567</i>	<i>17.571.491.035</i>	<i>95,66</i>
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	18.369.296.567	17.571.491.035	95,66
Pengelolaan Persampahan	106.919.681.235	101.223.314.878	94,67
<i>Pengelolaan Sampah</i>	<i>106.919.681.235</i>	<i>101.223.314.878</i>	<i>94,67</i>
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	26.311.180	24.069.300	91,48
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	450.000		-
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	896.442.550	847.156.400	94,50
Penanganan sampah melalui pengangkutan	82.491.886.256	78.847.758.653	95,58
Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	53.605.630	51.349.860	95,79
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	385.194.155	378.239.327	98,19
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	23.061.215.344	21.070.168.438	91,37
Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	4.576.120	4.572.900	99,93
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.859.652.608	5.425.266.014	92,59
Penanggulangan Bencana	5.859.652.608	5.425.266.014	92,59
<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>60.832.500</i>	<i>56.900.000</i>	<i>93,54</i>
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	60.832.500	56.900.000	93,54
<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	<i>2.582.124.388</i>	<i>2.372.181.792</i>	<i>91,87</i>
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	5.813.200	5.063.200	87,10
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	2.124.425.088	1.926.799.592	90,70



Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	300.000.000	297.575.000	99,19
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	151.886.100	142.744.000	93,98
<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	3.216.695.720	2.996.184.222	93,14
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3.155.135.720	2.940.276.808	93,19
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	61.560.000	55.907.414	90,82
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	16.188.066.400	15.852.401.312	97,93
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	16.188.066.400	15.852.401.312	97,93
<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	16.188.066.400	15.852.401.312	97,93
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.382.272.000	11.121.106.262	97,71
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1.877.595.600	1.854.163.350	98,75
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.928.198.800	2.877.131.700	98,26
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	5.993.859.680	5.832.712.229	97,31
Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.863.530.384	3.744.443.664	96,92
<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	2.359.343.470	2.353.058.000	99,73
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2.147.750.000	2.147.750.000	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	211.593.470	205.308.000	97,03
<i>Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</i>	1.504.186.914	1.391.385.664	92,50
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	221.231.610	204.587.002	92,48
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1.282.955.304	1.186.798.662	92,51
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.079.919.296	2.044.008.565	98,27
<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	2.079.919.296	2.044.008.565	98,27
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.079.919.296	2.044.008.565	98,27
Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	50.410.000	44.260.000	87,80



Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	8.600.000	8.500.000	98,84
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	8.600.000	8.500.000	98,84
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	41.810.000	35.760.000	85,53
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	41.810.000	35.760.000	85,53
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.022.334.987	2.945.135.143	97,45
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.048.739.454	1.004.615.400	95,79
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.048.739.454	1.004.615.400	95,79
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	16.440.000	16.440.000	100,00
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	48.798.400	45.505.700	93,25
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	58.383.030	57.403.150	98,32
Pemulihan Usaha Mikro	190.948.794	162.888.000	85,30
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	734.169.230	722.378.550	98,39
Pengembangan UMKM	1.586.105.376	1.564.242.986	98,62
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.586.105.376	1.564.242.986	98,62
Pengembangan Usaha Mikro	1.586.105.376	1.564.242.986	98,62
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	294.680.447	284.725.407	96,62
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	294.680.447	284.725.407	96,62
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	60.907.890	58.857.850	96,63



Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	233.772.557	225.867.557	96,62
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	92.809.710	91.551.350	98,64
<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>92.809.710</i>	<i>91.551.350</i>	<i>98,64</i>
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	92.809.710	91.551.350	98,64
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	4.812.502.770	4.422.830.434	91,90
Program Pengembangan Kebudayaan	2.964.193.358	2.630.595.162	88,75
<i>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>783.464.844</i>	<i>570.996.244</i>	<i>72,88</i>
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	783.464.844	570.996.244	2,88
<i>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>2.180.728.514</i>	<i>2.059.598.918</i>	<i>94,45</i>
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2.180.728.514	2.059.598.918	94,45
Pelestrarian dan Pengembangan Cagar Budaya	378.263.932	346.046.412	91,48
<i>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</i>	<i>378.263.932</i>	<i>346.046.412</i>	<i>91,48</i>
Penetapan Cagar Budaya	193.204.202	187.004.202	96,79
Pelindungan Cagar Budaya	185.059.730	159.042.210	85,94
Pengembangan Sumberdaya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.470.045.480	1.446.188.860	98,38
<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	<i>1.436.018.310</i>	<i>1.412.945.710</i>	<i>98,39</i>
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	448.100.000	448.100.000	100,00
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	852.569.730	830.333.080	97,39
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	135.348.580	134.512.630	99,38
Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	34.027.170	33.243.150	97,70
Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/Kota	34.027.170	33.243.150	97,70



DINAS TENAGA KERJA	5.950.433.186	4.884.553.900	82,09
Pelatihan Kerja Produktivitas Tenaga Kerja	322.965.000	322.965.000	100,00
<i>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	<i>188.865.000</i>	<i>188.865.000</i>	<i>100,00</i>
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	150.825.000	150.825.000	100,00
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	38.040.000	38.040.000	100,00
<i>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>134.100.000</i>	<i>134.100.000</i>	<i>100,00</i>
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	134.100.000	134.100.000	100,00
Hubungan Industri	2.599.834.820	2.070.159.200	79,63
<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>2.599.834.820</i>	<i>2.070.159.200</i>	<i>79,63</i>
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	22.664.660	9.120.000	40,24
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	44.618.660	37.980.000	85,12
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.532.551.500	2.023.059.200	79,88
Penempatan Tenaga Kerja	3.027.633.366	2.491.429.700	82,29
<i>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>108.235.500</i>	<i>108.235.500</i>	<i>100,00</i>
Pelayanan antar Kerja	108.235.500	108.235.500	100,00
<i>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>	<i>319.563.046</i>	<i>313.035.000</i>	<i>97,96</i>
Job Fair/Bursa Kerja	319.563.046	313.035.000	97,96
<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>2.599.834.820</i>	<i>2.070.159.200</i>	<i>79,63</i>
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	22.664.660	9.120.000	40,24
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	44.618.660	37.980.000	85,12



Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.532.551.500	2.023.059.200	79,88
DINAS SOSIAL	8.613.277.414	6.388.164.970	74,17
Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.027.595.727	3.926.689.970	97,49
<i>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</i>	<i>20.644.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	4.400.000		-
Rujukan Anak-Anak Terlantar	16.244.000		-
<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>4.006.951.727</i>	<i>3.926.689.970</i>	<i>98,00</i>
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	100,00
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	74.633.097	72.035.940	96,52
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.903.343.630	3.825.679.030	98,01
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	18.975.000	18.975.000	100,00
Penanganan Bencana	4.585.681.687	2.461.475.000	53,68
<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	<i>4.585.681.687</i>	<i>2.461.475.000</i>	<i>53,68</i>
Penyediaan Makanan	4.078.566.225	1.986.196.263	48,70
Penyediaan Sandang	92.092.560	74.547.220	80,95
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	21.800.000	18.260.000	83,76
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	6.144.500		-
Pelayanan Dukungan Psikososial	4.073.005	2.777.000	68,18
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	383.005.397	379.694.517	99,14
DINAS KETAHANAN PANGAN	1.603.196.784	1.511.003.370	94,25
Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	301.439.854	291.128.232	96,58
<i>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>301.439.854</i>	<i>291.128.232</i>	<i>96,58</i>
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	301.439.854	291.128.232	96,58
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.301.756.930	1.219.875.138	93,71



Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.301.756.930	1.219.875.138	93,71
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	7.195.150		-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	14.500.900	12.945.300	89,27
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	271.294.830	251.897.000	92,85
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	978.022.080	929.324.128	95,02
Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3.164.550		-
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	27.579.420	25.708.710	93,22
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.584.170.411	2.115.162.658	81,85
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.168.423.830	770.503.180	65,94
Pengembangan Prasarana Pertanian	1.168.423.830	770.503.180	65,94
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	852.885.430	455.489.780	53,41
Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	315.538.400	315.013.400	99,83
Penyuluhan Pertanian	986.681.062	926.062.201	93,86
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	986.681.062	926.062.201	93,86
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	854.338.232	799.262.201	93,55
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	18.342.830	15.080.000	82,21
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	114.000.000	111.720.000	98,00
Pengelolaan Perikanan Budi Daya	429.065.519	418.597.277	97,56
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	429.065.519	418.597.277	97,56
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	429.065.519	418.597.277	97,56
KECAMATAN KULIM	8.589.637.302	8.277.680.082	96,37
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Kulim)	8.589.637.302	8.277.680.082	96,37
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.693.010	3.806.000	81,10



Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	707.650	562.000	79,42
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	566.120	562.000	99,27
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.853.120	2.682.000	94,00
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	566.120		-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.381.636.486	6.220.792.342	97,48
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.375.913.896	6.215.069.752	97,48
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.722.590	5.722.590	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.676.120	6.676.120	100,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.676.120	6.676.120	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.750.000	32.903.730	97,49
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	33.750.000	32.903.730	97,49
Administrasi Umum Perangkat Daerah	847.422.847	814.521.689	96,12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.670.430	12.670.430	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.155.200	41.155.200	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	51.217.170	50.444.860	98,49
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	573.335.460	572.172.860	99,80
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	104.506.587	104.506.539	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000	10.080.000	80,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000	10.080.000	80,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.338.000	13.411.800	34,09
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	363.636.000	363.636.000	100,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	363.636.000	363.636.000	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	833.952.839	742.506.848	89,03
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.390.200	62.797.124	84,42
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.429.095	19.000.000	97,79



Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	740.133.544	660.709.724	89,27
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	117.870.000	92.837.353	78,76
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.430.000	64.847.353	75,03
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.440.000	27.990.000	89,03
KECAMATAN SENAPELAN	7.607.199.645	7.098.772.139	93,32
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Senapelan)	7.607.199.645	7.098.772.139	93,32
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	8.205.140	6.091.140	74,24
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.645.950	3.645.950	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.445.190	2.445.190	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.114.000		-
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	5.444.835.364	5.336.132.169	98,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.438.179.854	5.333.121.789	98,07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.645.130		-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.010.380	3.010.380	100,00
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	10.285.950	-	-
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.629.120		-
<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>6.656.830</i>		<i>-</i>
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1.054.870.657	794.057.358	75,28
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.514.740	23.514.740	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	766.688.850	582.738.180	76,01
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	139.140.087	120.425.428	86,55
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.046.000	32.957.620	36,20
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	34.480.980	34.421.390	99,83



<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	221.062.380	190.661.100	86,25
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.401.280		-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.661.100	190.661.100	100,00
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	542.701.154	462.574.547	85,24
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.603.160	101.406.653	73,70
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.944.800	9.491.700	26,41
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	369.153.194	351.676.194	95,27
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	325.239.000	309.255.825	95,09
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.440.000	95.456.825	85,66
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.805.000	23.805.000	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	189.994.000	189.994.000	100,00
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI	9.284.882.641	8.468.676.194	91,21
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Payung Sekaki)	9.284.882.641	8.468.676.194	91,21
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	29.940.960	15.316.920	51,16
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.819.060	6.478.730	65,98
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.034.820	4.228.820	60,11
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.909.370	4.609.370	78,00
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3.423.300		-
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	3.754.410		-
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	7.267.789.852	7.068.020.812	97,25
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.257.616.732	7.057.847.692	97,25
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.678.270	4.678.270	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.494.850	5.494.850	100,00



Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.817.130	-	-
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.823.040	-	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.994.090	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.681.000	48.681.000	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.681.000	48.681.000	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	842.264.660	505.948.478	60,07
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.382.960	30.112.960	87,58
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.636.830	11.986.800	24,65
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	637.630.670	431.176.070	67,62
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.966.100	14.111.448	42,81
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.540.000	18.561.200	22,22
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.108.100		-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	973.381.039	751.927.766	77,25
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	222.785.599	184.520.691	82,82
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.005.200	68.618.600	43,70
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	593.590.240	498.788.475	84,03
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.008.000	78.781.218	68,50
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.800.000	72.781.218	91,20
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.654.000	6.000.000	19,57
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.554.000		-
KECAMATAN BINAWIDYA	9.790.220.320	9.205.451.235	94,03
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Binawidya)	9.790.220.320	9.205.451.235	94,03
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.186.230	13.186.230	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.205.690	4.205.690	100,00



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.028.840	6.028.840	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.951.700	2.951.700	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.109.409.272	7.001.019.305	98,48
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.083.324.332	6.974.934.365	98,47
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.847.960	11.847.960	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.236.980	14.236.980	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.114.880	9.114.880	100,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.412.600	5.412.600	100,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.702.280	3.702.280	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	936.128.578	796.438.175	85,08
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.364.830	14.865.680	85,61
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	834.861.780	739.133.230	88,53
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.533.968	15.413.265	78,90
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	9.000.000	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.368.000	18.026.000	32,56
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	341.516.400	309.907.500	90,74
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	181.716.400	150.238.000	82,68
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	159.800.000	159.669.500	99,92
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.118.760.960	894.159.661	79,92
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	317.399.640	214.292.432	67,52
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.295.080	32.780.991	38,89
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	717.066.240	647.086.238	90,24
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.104.000	181.625.484	69,30
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	177.847.000	118.038.484	66,37



Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.257.000	63.587.000	75,47
KECAMATAN RUMBAI TIMUR	7.112.534.194	6.273.676.846	88,21
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Rumbai Timur)	7.112.534.194	6.273.676.846	88,21
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>18.942.590</i>	<i>9.950.350</i>	<i>52,53</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.907.860	2.907.860	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.081.690	3.081.690	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.960.800	3.960.800	100,00
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3.079.590		-
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.912.650		-
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>4.956.490.590</i>	<i>4.654.225.116</i>	<i>93,90</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.950.068.370	4.647.802.896	93,89
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.033.240	3.033.240	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.388.980	3.388.980	100,00
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>7.974.880</i>	<i>7.974.880</i>	<i>100,00</i>
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.166.350	3.166.350	100,00
<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>4.808.530</i>	<i>4.808.530</i>	<i>100,00</i>
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>1.068.123.730</i>	<i>845.291.790</i>	<i>79,14</i>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72.981.300	46.485.300	63,69
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	882.797.110	726.450.410	82,29
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95.210.920	56.271.680	59,10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000	11.550.000	91,67
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.534.400	4.534.400	100,00
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>931.882.404</i>	<i>680.452.211</i>	<i>73,02</i>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	261.593.688	50.717.231	19,39



Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.306.980	95.306.980	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	574.981.736	534.428.000	92,95
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>129.120.000</i>	<i>75.782.499</i>	<i>58,69</i>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.900.000	55.562.499	51,02
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.220.000	20.220.000	100,00
KECAMATAN LIMAPULUH	7.225.212.649	7.032.065.216	97,33
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Limapuluh)	7.225.212.649	7.032.065.216	97,33
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>12.043.220</i>	<i>11.066.950</i>	<i>91,89</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.095.480	3.877.000	94,67
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.805.060	5.165.250	88,98
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.142.680	2.024.700	94,49
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>4.945.414.718</i>	<i>4.821.431.478</i>	<i>97,49</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.939.057.678	4.816.403.078	97,52
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.069.480	2.889.900	71,01
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.287.560	2.138.500	93,48
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>9.782.480</i>	<i>9.682.400</i>	<i>98,98</i>
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6.445.800	6.353.200	98,56
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.336.680	3.329.200	99,78
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>43.816.000</i>	<i>42.491.700</i>	<i>96,98</i>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32.250.000	32.250.000	100,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11.566.000	10.241.700	88,55
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>803.664.835</i>	<i>796.793.948</i>	<i>99,15</i>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.134.480	7.131.900	99,96



Penyediaan Bahan Logistik Kantor	743.380.190	739.680.350	99,50
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.672.165	38.524.600	99,62
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.478.000	11.457.098	79,13
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	814.576.850	812.639.602	99,76
Pengadaan Mebel	249.287.040	248.919.500	99,85
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	372.793.890	371.874.000	99,75
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	192.495.920	191.846.102	99,66
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480.324.546	440.123.761	91,63
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.507.990	105.023.418	79,26
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.082.500	1.082.500	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	346.734.056	334.017.843	96,33
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.590.000	97.835.377	84,64
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.250.000	89.570.377	84,30
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.340.000	8.265.000	88,49
KECAMATAN PEKANBARU KOTA	7.677.393.160	7.314.896.363	95,28
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Pekanbaru Kota)	7.677.393.160	7.314.896.363	95,28
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.206.640	18.164.100	94,57
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.592.880	7.158.500	94,28
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.470.200	5.173.700	94,58
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.146.000	3.859.900	93,10
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	873.780	861.000	98,54
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1.123.780	1.111.000	98,86
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.821.124.028	5.624.628.508	96,62
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.811.949.908	5.616.115.758	96,63



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.313.520	4.953.750	93,23
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.860.600	3.559.000	92,19
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.849.740	2.702.000	94,82
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.347.410	2.275.000	96,92
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	502.330	427.000	85,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	880.695.420	809.252.385	91,89
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	66.077.570	65.887.000	99,71
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.860.070	49.613.500	99,51
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	608.325.820	587.917.100	96,65
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.494.360	39.175.000	80,78
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000	12.600.000	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.436.000	50.559.785	55,30
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.901.600	3.500.000	89,71
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.996.160	59.900.000	99,84
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.996.160	59.900.000	99,84
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	746.611.172	661.298.999	88,57
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.073.400	117.518.985	74,82
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.380.300	134.374.200	97,81
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	452.157.472	409.405.814	90,54
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.910.000	138.950.371	94,58
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.180.000	111.695.371	96,14
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.730.000	27.255.000	88,69
KECAMATAN SAIL	6.679.050.018	6.354.776.244	95,14
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec Sail)	6.679.050.018	6.354.776.244	95,14



Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.183.110	10.703.560	66,14
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.030.400	4.203.560	69,71
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.193.750	1.500.000	35,77
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.979.480	2.500.000	83,91
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	2.979.480	2.500.000	83,91
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.307.915.610	5.131.522.392	96,68
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.302.092.350	5.126.372.742	96,69
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.816.700	3.260.000	85,41
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.006.560	1.889.650	94,17
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.593.500	4.500.000	59,26
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.138.300	4.500.000	87,58
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.455.200	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.132.000	20.115.100	86,96
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23.132.000	20.115.100	86,96
Administrasi Umum Perangkat Daerah	717.864.484	663.242.751	92,39
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.641.380	52.641.380	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	564.704.080	557.787.600	98,78
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.322.224	21.048.864	71,78
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.188.000	31.764.907	50,27
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.008.800	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	471.360.514	425.297.405	90,23
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.864.000	144.731.895	89,97
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.239.994	18.661.000	71,12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	284.256.520	261.904.510	92,14
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.000.800	99.395.036	73,63



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.670.000	87.545.036	92,47
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.330.800	11.850.000	29,38
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI	10.193.568.072	9.889.232.048	97,01
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Marpoyan Damai)	10.193.568.072	9.889.232.048	97,01
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>14.100.000</i>	<i>14.100.000</i>	<i>100,00</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.550.000	2.550.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.550.000	6.550.000	100,00
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.500.000	2.500.000	100,00
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	2.500.000	2.500.000	100,00
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>8.365.655.016</i>	<i>8.141.467.477</i>	<i>97,32</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.359.055.896	8.134.946.477	97,32
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.073.000	3.021.000	98,31
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.526.120	3.500.000	99,26
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1.750.000</i>	<i>100,00</i>
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.750.000	1.750.000	100,00
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>48.298.000</i>	<i>44.116.367</i>	<i>91,34</i>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.600.000	13.600.000	100,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34.698.000	30.516.367	87,95
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>745.173.700</i>	<i>708.801.010</i>	<i>95,12</i>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.400.950	30.735.500	94,86
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.294.720	31.200.000	99,70
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	584.477.940	558.669.000	95,58
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.860.090	54.004.710	94,98
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.140.000	34.191.800	85,18



<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>204.957.700</i>	<i>204.957.700</i>	<i>100,00</i>
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	204.957.700	204.957.700	100,00
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>691.003.656</i>	<i>662.726.628</i>	<i>95,91</i>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	189.857.424	186.878.330	98,43
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.380.000	6.360.000	99,69
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	494.766.232	469.488.298	94,89
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>122.630.000</i>	<i>111.312.866</i>	<i>90,77</i>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.160.000	87.842.866	88,59
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.470.000	23.470.000	100,00
KECAMATAN SUKAJADI	9.429.030.582	9.088.169.319	96,38
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Sukajadi)	9.429.030.582	9.088.169.319	96,38
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>14.722.670</i>	<i>14.716.600</i>	<i>99,96</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.225.460	8.222.200	99,96
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.451.560	4.449.900	99,96
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.045.650	2.044.500	99,94
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>7.381.782.258</i>	<i>7.174.147.695</i>	<i>97,19</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.374.796.718	7.167.163.175	97,18
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.410.020	3.409.000	99,97
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.575.520	3.575.520	100,00
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>1.694.960</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.694.960	-	-
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>23.132.000</i>	<i>20.864.700</i>	<i>90,20</i>



<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	23.132.000	20.864.700	90,20
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1.013.500.110	923.539.500	91,12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.996.230	45.948.200	99,90
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	789.346.720	778.837.400	98,67
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.492.320	74.709.800	87,39
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.010.000	20.391.000	22,91
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.654.840	3.653.100	99,95
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	670.018.584	662.719.781	98,91
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	214.971.624	209.299.884	97,36
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	455.046.960	453.419.897	99,64
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	324.180.000	292.181.043	90,13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.900.000	99.410.043	75,94
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.219.000	36.710.000	98,63
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	156.061.000	156.061.000	100,00
KECAMATAN RUMBAI BARAT	7.744.774.711	7.353.271.819	94,94
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Rumbai Barat)	7.744.774.711	7.353.271.819	94,94
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	15.377.875	15.377.875	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.349.020	5.349.020	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.424.430	4.424.430	100,00
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.983.775	2.983.775	100,00
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	2.620.650	2.620.650	100,00
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	5.715.414.944	5.547.317.084	97,06
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.710.259.046	5.542.161.186	97,06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.599.848	2.599.848	100,00



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.556.050	2.556.050	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.819.050	3.819.050	100,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.461.100	2.461.100	100,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.357.950	1.357.950	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.000.000	17.582.400	97,68
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18.000.000	17.582.400	97,68
Administrasi Umum Perangkat Daerah	700.074.970	677.751.703	96,81
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.902.220	36.902.220	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.943.920	74.943.920	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	454.039.350	453.845.640	99,96
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.963.480	43.905.755	99,87
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000	14.400.000	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.826.000	53.754.168	70,89
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.885.540	171.578.694	71,53
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	239.885.540	171.578.694	71,53
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	895.987.932	792.286.329	88,43
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.558.000	184.885.480	87,81
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.483.892	41.719.493	98,20
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	642.946.040	565.681.356	87,98
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.214.400	127.558.684	81,66
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.820.000	102.619.684	78,44
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.394.400	24.939.000	8,21
KECAMATAN BUKITRAYA	9.060.615.258	8.821.595.183	97,36
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Bukit Raya)	9.060.615.258	8.821.595.183	97,36



Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.440.120	10.440.120	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.611.800	3.611.800	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.008.220	3.008.220	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.327.860	2.327.860	100,00
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.492.240	1.492.240	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.020.521.136	6.828.326.611	97,26
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.016.342.916	6.824.148.391	97,26
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.889.480	2.889.480	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.288.740	1.288.740	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.369.480	2.369.480	100,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.369.480	2.369.480	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.783.900	46.718.000	99,86
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	46.783.900	46.718.000	99,86
Administrasi Umum Perangkat Daerah	478.179.030	465.731.970	97,40
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.050.180	24.050.180	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	363.466.480	363.466.480	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.578.370	33.578.370	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.084.000	44.636.940	78,20
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	402.775.010	398.867.000	99,03
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	402.775.010	398.867.000	99,03
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.227.482	715.350.498	97,96
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.350.000	133.313.126	97,06
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.998.478	62.998.478	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	529.879.004	519.038.894	97,95
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	369.319.100	353.791.504	95,80



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.560.000	161.502.454	91,99
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.320.000	42.320.000	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	151.439.100	149.969.050	99,03
KECAMATAN TENAYAN RAYA			
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Tenayan Raya)	11.416.336.989	11.034.269.580	96,65
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>11.178.370</i>	<i>11.165.900</i>	<i>99,89</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.776.580	6.769.900	99,90
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.401.790	4.396.000	99,87
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>8.503.228.284</i>	<i>8.243.114.464</i>	<i>96,94</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.492.241.354	8.232.133.264	96,94
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.880.670	5.878.200	99,96
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.106.260	5.103.000	99,94
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>1.527.313.730</i>	<i>1.487.649.127</i>	<i>97,40</i>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.519.500	49.472.600	99,91
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.812.240	100.810.600	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.080.980.090	1.080.831.700	99,99
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	236.029.900	236.029.900	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.480.000	14.040.000	90,70
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.492.000	6.464.327	14,53
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>1.166.600.205</i>	<i>1.088.945.373</i>	<i>93,34</i>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.439.532	132.155.490	86,69
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	302.484.593	295.077.400	97,55
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	711.676.080	661.712.483	92,98
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>208.016.400</i>	<i>203.394.716</i>	<i>97,78</i>



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.716.400	143.094.716	96,87
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.300.000	60.300.000	100,00
KECAMATAN RUMBAI	8.293.855.488	8.029.892.074	96,82
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Rumbai)	8.293.855.488	8.029.892.074	96,82
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>20.310.050</i>	<i>20.178.940</i>	<i>99,35</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.628.820	4.628.820	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.322.600	6.322.600	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.548.930	3.548.930	100,00
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3.157.780	3.157.780	100,00
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	2.651.920	2.520.810	95,06
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>6.367.688.570</i>	<i>6.218.790.798</i>	<i>97,66</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.360.754.080	6.212.054.608	97,66
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.532.960	3.334.660	94,39
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.401.530	3.401.530	100,00
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>10.976.490</i>	<i>10.376.490</i>	<i>94,53</i>
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.640.900	7.040.900	92,15
<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>3.335.590</i>	<i>3.335.590</i>	<i>100,00</i>
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>711.028.583</i>	<i>703.177.088</i>	<i>98,90</i>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.329.720	34.329.720	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.359.050	21.359.050	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.396.460	44.396.460	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	511.861.360	511.861.360	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.602.243	49.602.243	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000	12.600.000	100,00



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.786.000	16.934.505	68,32
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.093.750	12.093.750	100,00
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>41.075.000</i>	<i>41.075.000</i>	<i>100,00</i>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.075.000	41.075.000	100,00
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>829.797.075</i>	<i>753.818.072</i>	<i>90,84</i>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.205.037	159.831.028	75,68
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.744.270	85.744.270	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	532.847.768	508.242.774	95,38
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>312.979.720</i>	<i>282.475.686</i>	<i>90,25</i>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.060.000	154.287.259	83,82
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.550.000	22.550.000	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	106.369.720	105.638.427	99,31
KECAMATAN TUAH MADANI	9.041.952.650	8.683.221.605	96,03
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Tuah Madani)	9.041.952.650	8.683.221.605	96,03
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>26.438.430</i>	<i>23.003.900</i>	<i>87,01</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.986.950	4.986.950	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.977.390	4.977.390	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.728.420	4.728.420	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.732.280	4.732.280	100,00
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3.578.860	3.578.860	100,00
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	3.434.530		-
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>7.093.635.328</i>	<i>6.944.814.767</i>	<i>97,90</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.080.892.868	6.932.072.307	97,90
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.286.430	8.286.430	100,00



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.456.030	4.456.030	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.330.500	4.551.240	54,63
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.779.260		-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.551.240	4.551.240	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.580.000	73.770.720	96,33
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	41.250.000	41.250.000	100,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35.330.000	32.520.720	92,05
Administrasi Umum Perangkat Daerah	618.812.712	509.086.252	82,27
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.386.380	17.120.440	93,11
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	404.934.780	400.792.310	98,98
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	104.902.452	70.508.062	67,21
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.300.000	6.300.000	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.204.000	14.365.440	17,69
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.085.100		-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.253.860	238.850.000	99,42
Pengadaan Mebel	139.507.200	138.450.000	99,24
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.746.660	100.400.000	99,66
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	883.339.820	799.000.137	90,45
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	288.279.283	223.504.783	77,53
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.509.585	56.161.394	97,66
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	537.550.952	519.333.960	96,61
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.562.000	90.144.589	95,33
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.900.000	76.482.589	94,54
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.662.000	13.662.000	100,00

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Pekanbaru Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Laporan ini juga merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas. Penyusunan laporan ini dilakukan sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2025, secara umum menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal tersebut mencerminkan adanya upaya yang cukup optimal dari seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Beberapa indikator strategis seperti Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Daya Saing Daerah, Indeks Layanan Infrastruktur, Indeks Kepuasan Masyarakat, serta Nilai Reformasi Birokrasi menunjukkan capaian yang baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembangunan di berbagai sektor, termasuk pembangunan sumber daya manusia, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target yang direncanakan, seperti tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, nilai AKIP, serta persentase penduduk miskin. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang melalui penguatan perencanaan, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, serta optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.



Melalui penyusunan LKJIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan pada periode berikutnya agar lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Akhirnya, Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien guna mewujudkan pembangunan Kota Pekanbaru yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat menjadi pijakan untuk mewujudkan Pekanbaru yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera.



1. Perjanjian Kinerja Walikota Pekanbaru 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUNG NUGROHO**

Jabatan : **WALIKOTA PEKANBARU**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pekanbaru, Maret 2025

WALIKOTA PEKANBARU

AGUNG NUGROHO



**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2025**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan Struktur Transformasi Pembangunan yang Berdaya Saing	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,81
2.	Meningkatkan Kualitas SDM	IPM	Nilai	83,00
3.	Mengarustamaan Budaya Melayu untuk Ketahanan sosial budaya masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	60,50
4.	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	77,11
5.	Meningkatnya Pemajuan Budaya Melayu	Persentase pemajuan budaya melayu	Persen	6,40
6.	Penyediaan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Peningkatan Konektivitas	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	74,50
7.	Mewujudkan Perekonomian Inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,65
8.	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,81
9.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	72,65



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90,52
11.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	Nilai	71,50
12.	Pengentasan Kemiskinan	Penduduk Miskin	Persentase	3,10
13.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	4,50
14.	Penurunan Stunting	Prevalensi Stunting	Persentase	8,20
15.	Tingkat Inflasi	Inflasi	Persentase	2,2
16.	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan	Gini Rasio	Nilai	0,385

No	Program	(Rp.)
1.	Pengelolaan Pendidikan	Rp. 243.439.548.957
2.	Pendidikan dan Tenaga Pendidikan	Rp. 27.194.719.968
3.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Dinas Pendidikan)	Rp. 572.998.005.581
4.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 165.765.659.081
5.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 943.701.296
6.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan	Rp. 449.490.678



No	Program	(Rp.)
	Minuman	
7.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 340.794.146
8.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Dinas Kesehatan)	Rp. 254.683.963.403
9.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (DPRD)	Rp. 82.967.439.136
10.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BKPSDM)	Rp. 14.529.191.008
11.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (DP3APM)	Rp. 8.079.666.805
12.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BPP)	Rp. 8.193.539.528
13.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Damkar)	Rp. 13.408.252.303
14.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pertanahan)	Rp. 5.702.022.189
15.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Disdukcapil)	Rp. 21.471.670.345
16.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas PUPR)	Rp. 42.285.797.062
17.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 15.798.178.259
18.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 28.943.497.330
19.	Penataan Bangunan Gedung	Rp. 20.355.748.410
20.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Disperkim)	Rp. 11.068.342.748
21.	Kawasan Permukiman	Rp. 17.320.159.430
22.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 2.430.657.850
23.	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 175.100.287.600
24.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Satpol PP)	Rp. 26.613.580.107
25.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1.590.966.000
26.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BPKAD)	Rp. 27.732.771.319
27.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Disdalduk KB)	Rp. 6.678.617.394



No	Program		(Rp.)
28.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinsos)	Rp.	9.079.860.713
29.	Pemberdayaan Sosial	Rp.	942.346.310
30.	Rehabilitasi Sosial	Rp.	960.412.795
31.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	5.857.768.773
32.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Disnaker)	Rp.	7.696.297.894
33.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	1.005.182.156
34.	Penempatan Tenaga Kerja	Rp.	1.733.429.061
35.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Disketapang)	Rp.	6.703.375.350
36.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp.	1.996.880.048
37.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (DLHK)	Rp.	55.345.544.390
38.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	4.646.735.500
39.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp.	1.755.774.950
40.	Pengelolaan Persampahan	Rp.	54.884.228.122
41.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotapen (Bapenda)	Rp.	75.943.680.350
42.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dishub)	Rp.	97.416.702.216
43.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.	18.411.756.077
44.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BPBD)	Rp.	8.655.187.706
45.	Aplikasi Informatika	Rp.	3.320.237.500
46.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Diskominfo)	Rp.	9.352.705.728
47.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Diskop)	Rp.	7.211.760.848
48.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.	2.120.410.476
49.	Pengembangan UMKM	Rp.	1.282.519.690



No	Program		(Rp.)
50.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (DPMPTSP)	Rp.	22.380.217.685
51.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp.	1.465.643.230
52.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp.	6.594.637.920
53.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dispora)	Rp.	10.020.774.138
54.	Pembinaan Perpustakaan	Rp.	844.566.392
55.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dispusip)	Rp.	12.260.718.556
56.	Pengembangan Kebudayaan	Rp.	1.880.955.110
57.	Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp.	279.709.701
58.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp.	455.992.430
59.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Disbudpar)	Rp.	7.885.105.239
60.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp.	841.767.194
61.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp.	252.878.614
62.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	2.050.023.680
63.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Distantan)	Rp.	14.682.988.153
64.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Disperindag)	Rp.	12.383.888.425
65.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	793.821.385
66.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.	19.177.493.671
67.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Sekretariat)	Rp.	103.417.196.206
68.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bappeda)	Rp.	12.876.025.346
69.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	5.117.210.568
70.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	2.218.961.000
71.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	18.643.943.500



No	Program		(Rp.)
	Kabupaten/Kota (Inspektorat)		
72.	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	1.797.750.000
73.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kesbangpol))	Rp	7.821.934.591
74.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	3.118.494.845
75.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Kulim)	Rp	9.334.796.824
76.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Senapelan)	Rp	10.275.037.725
77.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Payung Sekaki)	Rp	11.373.349.411
78.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Binawidya)	Rp	10.125.522.066
79.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Rumbai Timur)	Rp	9.633.094.645
80.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Limapuluh)	Rp	9.125.502.070
81.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Pekanbaru Kota)	Rp	9.774.317.413
82.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec Sail)	Rp	7.804.674.687
83.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Marpoyan Damai)	Rp	12.144.958.083
84.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Sukajadi)	Rp	11.664.964.036
85.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Rumbai Barat)	Rp	9.981.305.063
86.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Bukit Raya)	Rp	10.430.882.742



No	Program		(Rp.)
87.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Tenayan Raya)	Rp	12.541.542.402
88.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Rumbai)	Rp	10.360.634.273
89.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kec. Tuah Madani)	Rp	10.324.096.050
TOTAL		Rp	2.596.566.439.655,-

Pekanbaru, Januari 2025

WALIKOTA PEKANBARU



AGUNG NUGROHO



**TARGET CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
WALIKOTA PEKANBARU
TAHUN 2025**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Ket
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Indeks Daya Saing Daerah	-	-	-	3,81	
2	IPM	-	-	-	83,00	
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	-	-	-	60,50	
4	Indeks Kerukunan Umat Beragama	-	-	-	77,11	
5	Persentase pemajuan budaya melayu	-	-	-	6,40	
6	Indeks Layanan Infrastruktur	-	-	-	74,50	
7	Pertumbuhan Ekonomi	-	-	-	6,65	
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-	60,81	
9	Nilai Reformasi Birokrasi	-	-	-	72,65	
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	90,52	
11	Nilai AKIP	-	-	-	71,50	
12	Penduduk Miskin	-	-	-	3,10	
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	-	-	-	4,50	
14	Prevalensi Stunting	-	-	-	8,20	
15	Inflasi	-	-	-	2,2	
16	Gini Rasio	-	-	-	0,385	

Pekanbaru, Maret 2025

WALIKOTA PEKANBARU

AGUNG NUGROHO



2. Surat Pernyataan Telah Direviu Atas LKjIP Kota Pekanbaru TA 2025



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU **INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Gedung LontioK. Lt. 3
Pekanbaru Riau, 28292 Laman : Inspektorat.pekanbaru.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Pekanbaru tahun anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Pekanbaru. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. **Berdasarkan hasil reviu, masih terdapat beberapa kondisi yang perlu diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2025.**

PEKANBARU, Maret 2026
INSPEKTUR DAERAH
KOTA PEKANBARU

Dr. Tr. H. ZULHELMI ARIFIN, S. STP., M.Si
NIP. 19810719 199912 1 001